Volume 8 No. 1, Juni 2018 ISSN: 2089-6980

JURNAL
KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 8	No. 1	Hal. 1 - 90	Jakarta Juni 2018	ISSN 2089-6980

Terakreditasi RISTEKDIKTI : **30/E/KPT/2018**

Diterbitkan bersama :

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Jaringan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

ISSN 2089-6980

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 8 Nomor 1, Juni 2018

Penanggung Jawab :
Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:
Prof. Dr. Zahri Nasution (*Sosiologi Perikanan*)

Anggota:
Dr. Agus Heri Purnomo (Ekonomi Sumber Daya)
Dr. Andy Ahmad Zailany (*Antropologi*)
Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)
Asep Agus Handaka, S. Pi, MT *(Sosial Ekonomi Perikanan)*

Redaksi Pelaksana :
Sinta Nurwijayanti, S. Pi, M. SE., M.A
Andrian Ramadhan, S. Pi, MT
Hertria Maharani Putri, MBA
Hakim Miftahul Huda, M.Si
Edwin Yulia Setyawan, S.T
Rahadi Susetyo Frendly Muhammad, S. Ikom

Desain dan Tata Letak :
Ilham Ferbiansyah, S. Kom

Alamat Redaksi :
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP Lt. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Email: pt.sosek@gmail.com
Jurnal Online: *http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse*

Jurnal ini merupakan perubahan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan mengalami perubahan cover dan judul

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKSEKP) menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar - besarnya kepada para Bebestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Bebestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 8 Nomor 1, Juni 2018 adalah:

1. Prof. Dr. Sonny Koeshendrajna (*Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*
2. Prof. Dra. Indah Susilowati, M.Sc. Ph.D *(Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan - Universitas Diponegoro)*
3. Dr. Pujo Semedi Hargo Yuwono, M.A *(Antropologi - Universitas Gajah Mada)*
4. Dr. Rilus a kinseng *(Sosiologi) - Institut Pertanian Bogor)*
5. Dr. Taryono *(Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir - Institut Pertanian Bogor)*
6. Dr. Ir. Istiqlaliyah Muflikhati, M.Si *Ekonomi Keluarga - Institut Pertanian Bogor)*
7. Benny Osta Nababan, M.Si *(Ekonomi Sumber daya - Institut Pertanian Bogor)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan Sertifikat Akreditasi No. 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/ PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, maka sejak tanggal 30 Maret 2017 terjadi perubahan nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Reklamasi di Teluk Jakarta dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Nelayan di Cilincing Jakarta Utara; (ii) Strategi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Tradisional: Studi di Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati; (iii) Strategi Kebijakan Penanggulangan Penggalian Pasir Pantai di Pantai Nasai – Kabupaten Merauke; (iv) Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar di Tinjuau Dari Aspek Kependudukan; (v) Strategi Pengembangan Pariwisata Pesisir di Desa Bentung Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;(vi) Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap di Kepulauan Aru, dan; (vii) Penilaian Sosial Dalam Membangun Entitas Bisnis Perikanan Pada SKPT Selat Lampa, Natuna.

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

Redaksi

ISSN 2089-6980

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 8 Nomor 1, Tahun 2018

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

REKLAMASI DI TELUK JAKARTA DAN PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT NELAYAN DI CILINCING JAKARTA UTARA

Oleh : Hikmah, Armen Zulham dan Zahri Nasution ..... 1 - 12

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PENANGKAPAN IKAN TRADISIONAL: STUDI DI DESA PECANGAAN, KECAMATAN BATANGAN, KABUPATEN PATI

Oleh : Herna Octivia Damayanti ..... 13 - 26

STRATEGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENGGALIAN PASIR PANTAI DI PANTAI NASAI – KABUPATEN MERAUKE

Oleh : Maria Maghdalena Diana Widiastuti, Godefridus Samderubun dan Taslim Arifin ..... 27 - 38

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU TERLUAR DI TINJUAU DARI ASPEK KEPENDUDUKAN

Oleh : Fadjri Alihar ..... 39 - 51

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PESISIR DI DESA BENTUNG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA

Oleh : Aldy Adrianus Tatali, Ridwan Lasabuda, Jardie A. Andaki dan Bet E. S. Lagarense ..... 53 - 62

SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KEPULAUAN ARU

Oleh : Retno Widihastuti dan Latifatul Rodiyah ..... 63 - 75

PENILAIAN SOSIAL DALAM MEMBANGUN ENTITAS BISNIS PERIKANAN PADA SKPT SELAT LAMPA, NATUNA

Oleh : Armen Zulham ..... 77 - 90

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)

Vol. 8 No. 1, Juni 2018

REKLAMASI DI TELUK JAKARTA DAN PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT NELAYAN DI CILINCING JAKARTA UTARA

Reclamation in The Jakarta Bay and Social Change of Fishing Community In The Cilincing of North Jakarta

Hikmah, Armen Zulham dan Zahri Nasution

ABSTRAK

Pembangunan pulau N di Teluk Jakarta telah mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Cilincing yang terkait dengan perubahan sumber pendapatan, pola aktivitas penangkapan ikan, serta sistem gender pada masyarakat perikanan. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi guna memperoleh kombinasi data yang akurat. Pemilihan informan melalui teknik bola salju dan dilakukan secara sengaja yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui secara detail mengenai gejala perubahan sosial akibat adanya pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Hasil penelitian menggambarkan adanya perubahan sosial yang terjadi akibat adanya pembangunan pulau reklamasi di sekitar Teluk Jakarta antara lain perubahan jenis sumber pendapatan, perubahan pola aktivitas penangkapan, perubahan struktur sosial masyarakat nelayan dan perubahan sistem gender. Tulisan ini merekomendasikan agar pemerintah melakukan asistensi pada masyarakat nelayan yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan karena pulau reklamasi dengan program mata pencaharian alternatif. Dan bagi masyarakat nelayan yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, Harus disiapkan skema bantuan yang jelas, sehingga perekonomian masyarakat nelayan dapat berkembang.

Kata Kunci: reklamasi; Teluk Jakarta; Cilincing; perubahan sosial; masyarakat nelayan

ABSTRACT

The development of the N-island of the Jakarta bay has affected on socio-economic life of the community in Cilincing, especially related to changes in income sources, patterns of fishing activities, and gender systems in fisheries communities. This research was a case study using qualitative method. Data collection techniques use a triangulation method to obtain accuracy data combinations. Informants were selected through snowball techniques and carried out intentionally was chosen for person who were considered understood in detail about the symptoms of social change due to the development of the Jakarta Bay reclamation. Qualitative data analysis was carried out interactively and ended continuously until complete until the data was saturated. Results of the study illustrate that social changes that occur due to the development of reclamation islands around the Bay of Jakarta include changes in the type of income sources, changes in patterns of fishing activities, changes in the social structure of fishing communities and changes in the gender system. This paper recommends that the government do assistant to fishermen communities who are unable to adapt to changes due to reclamation islands with alternative livelihood programs. And for fishing communities who are able to adapt to existing changes, a clear assistance scheme must be prepared, so that the economy of the fishing community can develop.

Keywords: reclamation; Jakarta Bay; cilincing; social change; fishing community

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PENANGKAPAN IKAN TRADISIONAL: STUDI KASUS DI DESA PECANGAAN, KECAMATAN BATANGAN, KABUPATEN PATI

Strategy For Developing Traditional Fishing Bussiness: Case Study in The Pecangaan Village, Batangan Subdistrict of Pati Regency

Herna Octivia Damayanti

ABSTRAK

Produktivitas yang rendah merupakan salah satu ciri umum nelayan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan prioritas strategi dalam rangka mengembangkan usaha penangkapan ikan tradisional di Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 di Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Data primer berasal dari 55 sampel responden (nelayan di Desa Pecangaan) dan data sekunder berasal dari Pemerintah Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metoda analisis *Strength Weakness Opportunity Threat* (*SWOT)* dan *Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)*. Hasil penelitian memberikan ilustrasi strategi pengembangan sebagai berikut. Strategi pertama adalah peningkatan produktivitas dengan penggunaan alat tangkap modern. Strategi kedua adalah pengawasan dan pemberian sanksi tegas tentang alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, strategi ketiga adalah perubahan tata niaga penjualan hasil tangkapan melalui proses lelang di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan pengembangan akses pemasaran, strategi keempat adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, strategi kelima adalah pembinaan berkaitan dengan dampak perubahan iklim, dan strategi keenam adalah kemudahan dalam pengajuan pinjaman modal.

Kata Kunci: Desa Pecangaan; perikanan tangkap tradisional; QSPM; strategi pengembangan; SWOT

ABSTRACT

Low of productivity is a one of common characteristics of traditional fishing business. This research aimed at formulating a priority development strategy in order to improve the traditional fishing bussiness in the Pecangaan village, Batangan subdistrict of Pati regency. The research uses a descriptive method with quantitative and qualitative approach and was conducted in October 2016 in the Pecangaan village, Batangan subdistrict of Pati regency. Primary data comes from 55 respondents were selected as a sample (fishers in the Pecangaan village) and secondary data ere collected from Government of the Pecangaan village level of Batangan Subdistrict. The sample was 55 people. Data was analyzed by using Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) and Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) analysis methods. Results of the research are: the first strategy is namely the increase of fishing productivity with the use of modern fishing gear. The second strategy is supervision and giving strict sanctions on fishing gear which is not environmentally friendly, the third strategy is the change of sales management throughauction process in fish auction and development of marketing access, the fourth strategy is to improve the quality of human resources, the fifth strategy is coaching related to the impacts of climate change, and the sixth strategy is the ease of capital lending.

Keywords: Pecangaan Village; tradisional fishing; QSPM; strategy for development; SWOT

STRATEGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENGGALIAN PASIR PANTAI DI PANTAI NASAI – KABUPATEN MERAUKE

Policy Strategy to Overcome Beach Sand Mining in The Nasai Beach – Merauke Regency

Maria Maghdalena Diana Widiastuti, Godefridus Samderubun dan Taslim Arifin

ABSTRAK

Penambangan pasir pantai menimbulkan eksternalitas. Bentuk eksternalitas yang terlihat adalah kerusakan jalan raya, penurunan produktivitas produk perikanan, dan kerusakan ekosistem hutan *mangrove* di pesisir pantai. Pemerintah telah mengeluarkan himbauan pelarangan penggalian pasir pantai, namun ekstraksi penggalian pasir di pesisir pantai masih terus terjadi. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi kebijakan penanggulangan penggalian pasir melalui analisis motivasi dan persepsi masyarakat terhadap usaha penggalian pasir pantai dengan pendekatan metodologi analisis *Strength Weakness Opportunity Threat* (*SWOT)* dan penentuan alternatif strategi

ABSTRACT

Beach sand mining caused externalities. Those type of externalities were shown by road damage, decreasing fisheries productivity, and destruction of mangrove forest ecosystems in coastal areas. Government has prohibited beach sand mining, however, extraction continues to occur. This study aims to analyze the policy strategy to overcome beach sand mining through motivation analysis and perception of community using the Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) and the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) analytical methods. Results of the study showed that people sell sand due to economic reason without having to work hard, its stable production and

dengan metode *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM). Hasil penelitian menyebutkan bahwa motivasi masyarakat menjual pasir karena tuntutan ekonomi, tidak perlu bekerja keras, hasilnya stabil dan harga tidak pernah turun dibandingkan usaha pertanian. Adanya anggapan menjual pasir adalah pekerjaan sampingan. Jika tidak ada permintaan pasir, maka masyarakat akan berkebun, berburu, meramu dan mengambil ikan di laut. Banyaknya permintaan masyarakat terhadap pasir. Masyarakat paham dampak negatif penggalian pasir dan menjadi kekuatan dalam penanggulangan penggalian pasir. Kebijakan pemerintah tidak ditegakkan dan terjadi penelantaran diduga sebagai penyebab tetap dilakukan praktek penambangan pasir pantai. Urutan strategi kebijakan yang dapat disarankan untuk pemerintah berdasarkan analisis QSPM adalah: (1) penetapan harga pasir lokal dengan menginternalisasi biaya eksternalitas; (2) penegakan ijin usaha pertambangan dan (3) membentuk kelompok peduli lingkungan pesisir untuk mengembangkan perekonomian masyarakat lokal.

Kata Kunci: strategi kebijakan; eksternalitas; penggalian pasir pantai; metoda SWOT; metoda QSPM

prices compared to agriculture activity. Selling sand is considered a temporary job. Whenever there is no demand for sand, the community will work for another job, i.e., hunting, fishing and other agricultural activities. Community is aware of negative impact of sand mining and it empower them to prevent sand mining. A weak enforcement of government policy was likely to be the reason of keep practicing beach sand mining. The policy strategy that we suggest for government to overcome the beach sand mining based on the QSPM analysis are: (1) determining the price of local sand by internalizing the externalities cost; (2) law enforcement of sand mining business permits, and; (3) establishing coastal environmental groups to develop other economic activities for local people.

Keywords: policy strategy; externalities; beach sand mining; SWOT method; QSPM method

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU TERLUAR DI TINJUAU DARI ASPEK KEPENDUDUKAN

Policies on The Management of The Outer Islands According to Population Aspect

Fadjri Alihar

ABSTRAK

Ada beberapa persoalan yang terkait dengan pulau-pulau terluar di Indonesia. Pertama, aspek keamanan yang berkaitan dengan aspek perlindungan dan pemeliharaan. Kedua, banyak di antara pulau-pulau tersebut yang tidak berpenghuni. Ketiga, aspek pemberdayaan masyarakat. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi berbagai data, baik hasil penelitian, naskah-naskah akademik dan berbagai data dari internet untuk memahami berbagai persoalan yang terjadi di pulau-pulau terluar Indonesia. Metoda analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia terlalu menyepelekan persoalan yang terjadi pulau-pulau terluar, padahal menyangkut harga diri dan martabat bangsa. Pemerintah dituntut untuk mendata kembali berbagai pulau-pulau terluar yang tersebar di daerah perbatasan dengan negara tetangga. Selain itu pemerintah juga dituntut mereklamasi beberapa pulau terluar karena terancam tenggelam dan ini berdampak terhadap garis perbatasan Indonesia. Untuk mengisi pulau-pulau terluar tersebut diperlukan sebuah program transmigrasi lokal yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan berbasis kelautan dan kepulauan.

Kata Kunci: penduduk pulau-pulau terluar; daerah perbatasan dan transmigrasi

ABSTRACT

There are several issues related to the outer islands in Indonesia. First, security aspects relating to aspects of conservation and management. Second, many of these islands are uninhabited. Third, the aspect of community empowerment. This paper tries to explore various data, both research results, academic texts and various data from the internet to understand the various problems that occur in Indonesia's outer islands. Qualitative descriptive analysis method was used in this study. The results of the study indicate that the Indonesian Government has undermined the problems that occur in the outer islands, even though it concerns the self-respect and dignity of the nation. The government is required to re-assessment various outermost islands scattered in the border area with neighboring countries. In addition, the government is also required to reclaim some of the outermost islands because they are threatened with sinking and this has an impact on the Indonesian border line. To fill the outer islands, a local transmigration program is needed which is equipped with marine and island-based knowledge and skills.

Keywords: inhabitant; island; nation or state-border; transmigration

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PESISIR DI DESA BENTUNG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA

Coastal Tourism Development Strategy in The Bentung Village, Sangihe Islands Regency of North Sulawesi

Aldy Adrianus Tatali, Ridwan Lasabuda, Jardie A. Andaki dan Bet E. S. Lagarense

ABSTRAK

Pengelolaan pariwisata pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe telah banyak diteliti namun penelitian yang menekankan pada pengembangan potensi pariwisata pesisir desa bentung belum dilakukan. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan kabupaten bahari yang memiliki Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan PERDA Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008, yaitu kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan Desa Bentung mempuyai atraksi wisata Mairokang Beach Game (MBG) yang diselenggarakan setiap tahun. Penelitian ini berfokus pada pengembangan atraksi wisata pesisir di Desa Bentung dengan bentuk diversifikasi produk-produk wisata yang masih banyak selain lomba MBG. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2016 hingga Maret 2017 mengunakan metode observasi, kualitatif dan kualitatif (campuran). Metoda analisis deskriptif dan SWOT digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian mmenunjukkan bahwa potensi sumber daya pesisir di Desa Bentung seperti terumbu karang, hutan mangrove yang memiliki luas 2,82 Ha, keadaan hutan Mangrove tergolong dalam kondisi tidak rusak. Potensi pariwisata pantai Desa Bentung memiliki tiga kawasan pantai yang memiliki pasir yang berbeda yaitu Pantai Bulo, Pantai Nagha, Pantai Mairokang Bentung. MBG melaksanakan kegiatan – kegiatan yang bernuansa budaya Sangihe dan menjadi daya tarik wisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, lomba ini merupakan lomba balap perahu. Hasil penelitian menyarankan perlunya fokus pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

Kata Kunci: strategi pengembangan pariwisata; pesisir; Sesa Bentung; Mairokang Beach Game

ABSTRACT

Management of Sangihe coastal tourism has been extensively researched; however, research emphasizing on the development of coastal tourism potentials in Bentung Villages has yet been carried out. The regency of Kepulauan Sangihe which is a maritime regency has a Tourism Strategic Area in Sangihe Islands Local Regulation No. 15 Year 2008 which tell that a region that has a major function of tourism or has potential for tourism development that has an important influence in one or more aspects such as economic, social and cultural growth, natural resources empowerment, environmental carrying capacity, defense and security. Bentung Village a tourist attraction such as Mairokang Beach Game (MBG) that held annually. This study focuses on the development of coastal tourism attractions in the village of Bentung with a diversified form of tourism products that are still many other than the MBG competition. This research was conducted between October 2016 until March 2017 using qualtitaive and quantitative observation method (mix method). A descriptive and SWOT analysis were used in this study. Results of the research showed that potential of coastal resources in Bentung Village such as coral reefs, mangrove forest has an area of 2.82 Ha and classified as undamaged. Bentung Beach tourism has three areas that have different sand such as Bulo Beach, Nagha Beach and Mairokang Beach. MBG carries out cultural activities of Sangihe and becomes a tourist attraction of Kepulauan Sangihe Regency, This attraction is a boat racing competition. The research suggests the need to be focused on the development of tourism's infrastructure and facilities.

Keywords: tourism development strategy; coastal; Bentung Village; Mairokang Beach Game

SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KEPULAUAN ARU

Profit Sharing System of Fishing Business in The Aru Islands

Retno Widihastuti dan Latifatul Rodiyah

ABSTRAK

Sistem bagi hasil usaha perikanan merupakan sistem yang diberlakukan dari pemilik kapal/perahu atau juragan kepada awak kapal. Sistem bagi hasil memiliki pengaruh penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup nelayan. Dari hasil pembagian usaha, ABK mendapatkan presentase yang paling rendah jika dibandingkan dengan awak lainnya. Sehingga pada musim paceklik, ABK seringkali menemui masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan ini menjadi masalah abadi yang menjadikan ABK di Kabupaten Kepulauan Aru terlilit oleh hutang dengan pihak peminjam informal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem bagi hasil pada usaha perikanan di Kepulauan Aru dan menyusun opsi rekomendasi sebagai strategi dalam mengatasi permasalahan ekonomi ABK sebagai nelayan kecil. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan Juli 2016. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis sistem bagi hasil pada usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Aru. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis pendapatan dari pemilik dan awal kapal/perahu. Hasil peneltian menunjukan bahwa pada sistem bagi hasil nelayan yang diberlakukan pada nelayan di Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan jenis alat tangkapnya, memiliki pendapatan diatas Upah Minimum Regional (UMR) per bulan. Meskipun demikian, nelayan ABK masih menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya ketika musim paceklik.Hal ini karena nelayan masih memiliki ketergantungan pada pemilik baik ketika akan melakukan kegiatan melaut, maupun ketika akan memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin tinggi. Dari analisa tersebut, maka disarankan perlunya kebijakan yang menjamin ketersediaan modal untuk nelayan kecil dan perlu adanya pendampingan usaha dari pemerintah. Hal ini penting agar nelayan kecil tidak tergantung kepada pemilik sehingga nelayan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya pada atau bukan saat musim paceklik.

Kata Kunci: sistem bagi hasil; anak buah kapal; Kepulauan Aru; upah minimum regional; modal, pendampingan

ABSTRACT

Sistem bagi hasil usaha perikanan merupakan sistem yang diberlakukan dari pemilik kapal/perahu atau juragan kepada awak kapal. Sistem bagi hasil memiliki pengaruh penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup nelayan. Dari hasil pembagian usaha, ABK mendapatkan presentase yang paling rendah jika dibandingkan dengan awak lainnya. Sehingga pada musim paceklik, ABK seringkali menemui masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan ini menjadi masalah abadi yang menjadikan ABK di Kabupaten Kepulauan Aru terlilit oleh hutang dengan pihak peminjam informal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem bagi hasil pada usaha perikanan di Kepulauan Aru dan menyusun opsi rekomendasi sebagai strategi dalam mengatasi permasalahan ekonomi ABK sebagai nelayan kecil. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan Juli 2016. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis sistem bagi hasil pada usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Aru. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis pendapatan dari pemilik dan awal kapal/perahu. Hasil peneltian menunjukan bahwa pada sistem bagi hasil nelayan yang diberlakukan pada nelayan di Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan jenis alat tangkapnya, memiliki pendapatan diatas Upah Minimum Regional (UMR) per bulan. Meskipun demikian, nelayan ABK masih menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya ketika musim paceklik.Hal ini karena nelayan masih memiliki ketergantungan pada pemilik baik ketika akan melakukan kegiatan melaut, maupun ketika akan memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin tinggi. Dari analisa tersebut, maka disarankan perlunya kebijakan yang menjamin ketersediaan modal untuk nelayan kecil dan perlu adanya pendampingan usaha dari pemerintah. Hal ini penting agar nelayan kecil tidak tergantung kepada pemilik sehingga nelayan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya pada atau bukan saat musim paceklik.

Keywords: profit sharing system; lowest crews member; Aru Islands, regional minimum wage, capital; assistanships

PENILAIAN SOSIAL DALAM MEMBANGUN ENTITAS BISNIS PERIKANAN PADA SKPT SELAT LAMPA, NATUNA

Social Assessment on The Development of The Fishery Business Entity in SKPT Selat Lampa, Natuna

Armen Zulham

ABSTRAK

Kehadiran nelayan asing pelaku *Illegal Unreported and Unregulated fishing* (*IUU- Fishing*) pada Laut Natuna Utara merupakan sinyal, perairan tersebut cukup potensial. Keberhasilan menangkap pelaku *IUU Fishing* pada perairan itu, seharusnya mendorong pelaku usaha perikanan Natuna memanfaatkan peluang itu. Namun, hal itu belum terwujud, karena struktur sosial dan jaringan sosial entitas bisnis perikanan diluar SKPT Selat Lampa, kapasitasnya belum dipetakan. Pemetaan perlu dilakukan untuk mengukur: kemampuan pemupukan modal, kemampuan akses potensi ikan, membangun industri pengolahan, membangun akses pasar dan jaringan perdagangan ikan, serta perilaku bisnis pelaku usaha perikanan di Natuna. Upaya meningkatkan peran entitas bisnis perikanan di Natuna, dilaksanakan melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa. SKPT yang dimulai sejak tahun 2016. Lokasi ini dipilih karena kontruksi sosialnya masih *premature* sehingga perlu strategi untuk memfungsikannya. Penilaian sosial ini, bertujuan memberi informasi tentang struktur sosial dan jaringan sosial entitas bisnis perikanan diluar SKPT Selat Lampa, sebagai bahan untuk operasionalisasi SKPT tersebut. Informasi tulisan ini diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di Ranai. Informasi FGD itu, diperkaya dengan mewawancara 50 nelayan, 5 pedagang, 5 pengolah dan 3 pengusaha yang melakukan bisnis perikanan di Natuna. Informasi dikumpulkan pada bulan Juli dan Oktober 2017. Hasil analisis merekomendasikan pedagang besar pada jaringan bisnis ikan di Natuna harus diintegrasikan dalam entitas bisnis usaha patungan, sebagai wadah pedagang tersebut berperan di SKPT Selat Lampa.

Kata Kunci: perikanan; Natuna; struktur sosial; jaringan sosial

ABSTRACT

The presence of foreign fishermen committing Illegal Unreported and Unregulated fishing (IUU- Fishing) in North Natuna Sea indicates that the sea is highly potential. The arrest of IUU-Fishing actors is supposed to encourage the local businessmen to take the opportunities. However, the role has not been established yet due to lack of capacity mapping of social structure and social networking for the fishing business outside SKPT Lampa Strait. The mapping was required to measure the ability of capital accumulation, access to fish resources, development of processing industry, development of market access and fish trading network, and behaviour of fish businessmen in Natuna. The Integrated Centre of Marine and Fisheries (SKPT) in Lampa Strait, which has been initiated since 2016, is developed to empower the role of fish business in Natuna. This location was chosen due to the prematurity social construction, therefore, a particular strategy is necessary to function it. This social assessment aimed to inform social structure and social networking of fish business outside SKPT Lampa Strait as a subject to operate the SKPT. The information of this article were collected through Focus Group Discussion (FGD) in Ranai, as well as interview with 50 fishermen, 5 traders, and 3 businessmen doing fish business in Natuna. The information was collected on July and October 2017. The result of the analysis recommended that fish wholesaler in Natuna network business should be integrated in joint venture to encourage their engagement in business activities at SKPT Lampa strait.

Keywords: fishing; Natuna; social structure; social networking

REKLAMASI DI TELUK JAKARTA DAN PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT NELAYAN DI CILINCING JAKARTA UTARA

Reclamation in The Jakarta Bay and Social Change of Fishing Community In the Cilincing of North Jakarta

***Hikmah, Armen Zulham dan Zahri Nasution**
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 22 Januari 2018 Diterima setelah perbaikan: 8 Maret 2018
Disetujui terbit: 6 Juni 2018
*email: hikmah_madani@yahoo.com

ABSTRAK

Pembangunan pulau N di Teluk Jakarta telah mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Cilincing yang terkait dengan perubahan sumber pendapatan, pola aktivitas penangkapan ikan, serta sistem gender pada masyarakat perikanan. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi guna memperoleh kombinasi data yang akurat. Pemilihan informan melalui teknik bola salju dan dilakukan secara sengaja yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui secara detail mengenai gejala perubahan sosial akibat adanya pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Hasil penelitian menggambarkan adanya perubahan sosial yang terjadi akibat adanya pembangunan pulau reklamasi di sekitar Teluk Jakarta antara lain perubahan jenis sumber pendapatan, perubahan pola aktivitas penangkapan, perubahan struktur sosial masyarakat nelayan dan perubahan sistem gender. Tulisan ini merekomendasikan agar pemerintah melakukan asistensi pada masyarakat nelayan yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan karena pulau reklamasi dengan program mata pencaharian alternatif. Dan bagi masyarakat nelayan yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, Harus disiapkan skema bantuan yang jelas, sehingga perekonomian masyarakat nelayan dapat berkembang.

Kata Kunci: reklamasi; Teluk Jakarta; Cilincing; perubahan sosial; masyarakat nelayan

ABSTRACT

The development of the N-island of the Jakarta bay has affected on socio-economic life of the community in Cilincing, especially related to changes in income sources, patterns of fishing activities, and gender systems in fisheries communities. This research was a case study using qualitative method. Data collection techniques use a triangulation method to obtain accuracy data combinations. Informants were selected through snowball techniques and carried out intentionally was chosen for person who were considered understood in detail about the symptoms of social change due to the development of the Jakarta Bay reclamation. Qualitative data analysis was carried out interactively and ended continuously until complete until the data was saturated. Results of the study illustrate that social changes that occur due to the development of reclamation islands around the Bay of Jakarta include changes in the type of income sources, changes in patterns of fishing activities, changes in the social structure of fishing communities and changes in the gender system. This paper recommends that the government do assistant to fishermen communities who are unable to adapt to changes due to reclamation islands with alternative livelihood programs. And for fishing communities who are able to adapt to existing changes, a clear assistance scheme must be prepared, so that the economy of the fishing community can develop.

Keywords: reclamation; Jakarta Bay; cilincing; social change; fishing community

**Korespodensi Penulis:*
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

PENDAHULUAN

Pembangunan pulau di Teluk Jakarta karena kebijakan reklamasi, berakibat pada beberapa perubahan. Perubahan tersebut mencakup perubahan pada ekosistem di Teluk Jakarta (Puspasari *et al.,* 2017), perubahan oseanografi di dalam Teluk Jakarta (Pranowo *et al.,* 2014), maupun perubahan flora dan fauna pada pesisir Teluk Jakarta (Kusmana, 2014). Perubahan tersebut secara tidak langsung telah mendorong terjadinya perubahan sosial pada masyarakat perikanan di Teluk Jakarta (Zulham *et al.,* 2017).

Studi perubahan sosial telah dilakukan pada berbagai kelompok masyarakat seperti yang dilakukan oleh Bellwood & Dizon (2013) di Filipina dan Estrada (1999) di Eropa. Pemahaman perubahan sosial tersebut dalam pandangan Parson (1951), harus dilakukan dengan memahami struktur sosial dalam masyarakat tersebut. Struktur sosial adalah tatanan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang tersusun secara vertikal atau horizontal. Pada pandangan ini kelompok tersebut memiliki identitas untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Kelompok sosial pada masyarakat perikanan umumnya terdiri dari nelayan (pemilik kapal dan ABK), pengolah hasil perikanan, maupun pedagang.

Perubahan lingkungan (karena pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta) menyebabkan kelompok-kelompok sosial di desa pesisir beradaptasi menghadapi perubahan yang terjadi di Teluk Jakarta. Adaptasi tersebut merupakan bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat setelah pulau reklamasi di Teluk Jakarta tersebut dibangun. Simandjuntak (2007), mengemukakan perubahan sosial merupakan ciri khas dari masyarakat dan kebudayaan yang berubah. Pada masyarakat modern perubahan itu sangat cepat, sedang dalam masyarakat tradisional sangat lambat. Dalam konteks perubahan sosial akibat pembangunan reklamasi di pesisir Teluk Jakarta, dapat digambarkan sebagai sesuatu akan terjadi setelah jangka waktu tertentu. Fenomena perubahan itu diamati antara sebelum dan sesudah jangka waktu tertentu.

Masyarakat pada Kelurahan Cilincing dengan jumlah penduduk 57.061 jiwa (jumlah nelayan 1.600 orang) merupakan salah satu masyarakat yang menghadapi dinamika perubahan sosial karena pembangunan pulau N di Teluk Jakarta. Pada satu sisi keberadaan pulau N melindungi aktivitas nelayan yang berbasis di pinggir muara Cakung Drain, namun pada sisi lain keberadaan pulau N telah menghilangkan *fishing ground* nelayan tradisional dan masyarakat Kelurahan Cilincing tidak dapat lagi melakukan budidaya kerang hijau.

Nelayan Kelurahan Cilincing merupakan nelayan tradisional skala kecil. Wilayah penangkapan hanya di sekitar perairan Teluk Jakarta dengan jumlah hari penangkapan ikan 1 hari per trip. Mayoritas nelayan di Cilincing adalah etnis Indramayu dan Bugis. Pada daerah tersebut terdapat juga nelayan dari Pemalang maupun Brebes.Nelayan asal Indramayu hanya menggunakan perahu di bawah 5GT dengan jumlah ABK 2-3 orang. Sedangkan nelayan yang berasal dari etnis Bugis Makassar merupakan pemilik bagan apung dan menggunakan ABK dari daerah asalnya. Nelayan asal Indramayu rata-rata sudah memiliki rumah dan tinggal menetap di Keluarahan Cilincing. Sementara ABK berasal dari Indramayu tinggal tidak menetap di Kelurahan Cilincing.

Perhatian pemerintah terhadap nelayan di Kelurahan Cilincing cukup besar. Pada tahun 1990 telah dibangun Tempat Pelelang Ikan di muara sungai *Cakung drain*. Pemerintah juga membangun jalan dan tanggul untuk menahan banjir *rob.* Secara umum masyarakat pesisir di Kelurahan Cilincing terbentuk oleh kelompok-kelompok sosial/etnis yang beragam *(heterogen).* Ekonomi masyarakat Kelurahan Cilincing tidak hanya dari aktivitas perikanan, namun tergantung pada aktivitas ekonomi pada kawasan Cilincing dan Marunda.

Berdasarkan aktivitas ekonomi tersebut, maka masyarakat di Kelurahan Cilincing dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok pelaku usaha, yaitu: 1) pelaku usaha, sebagai pemanfaat langsung sumber daya lingkungan seperti nelayan dan pembudidaya; 2) Pengolah hasil ikan atau hasil laut lainnya seperti pemindang, pengeringan ikan asin, pengolah kerupuk, terasi, dan sebagainya; 3) Penunjang kegiatan ekonomi perikanan seperti pemilik toko atau warung, pemilik bengkel montir atau las, pengusaha angkutan, tukang perahu dan buruh kasar. Kebutuhan tenaga kerja yang tidak membutuhkan keahlian spesifik diperlukan di Cilincing untuk ABK perikanan tangkap. Tulisan ini melihat perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat perikanan di Kelurahan Cilincing Jakarta Utara tersebut, yang terus beradaptasi merespon dampak dari pembangunan pulau N di Teluk Jakarta.

METODOLOGI

Tulisan ini didasarkan pada studi kasus pada masyarakat perikanan di Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam hal ini, studi kasus dapat didefinisikan sebagai studi yang berfokus pada satu kejadian, dan kejadian tersebut dikaji dengan berbagai metode (Stake, 1994 *dalam* Sitorus, 1998). Hasil penelitian dalam tulisan ini, dijelaskan menggunakan dua pendekatan, yaitu: (a) pendekatan eksplanatif, untuk menjelaskan penyebab gejala sosial pada masyarakat tersebut serta keterkaitan dengan gejala sosial lain (Sitorus, 1998), dan; (b) Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menjelaskan hasil penelusuran dalam sistem sosial pada masyarakat nelayan tersebut, terkait dengan perubahan stratifikasi sosial dan sumber pendapatan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Bambu, RW 04/RT 05 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja *(purposive)* dengan pertimbangan bahwa Kelurahan Cilincing merupakan salah satu wilayah pesisir yang terkena dampak pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta khususnya pembangunan pulau N. Disamping itu, wilayah Jakarta Utara merupakan daerah industri yang pembuangan limbahnya diarahkan ke laut sehingga pemilihan lokasi penelitian dianggap sesuai dengan topik yang diangkat. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2017.

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dianalisis adalah data primer, data sekunder, serta diikuti dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi: karakteristik nelayan, perubahan sumber pendapatan, perubahan pola penangkapan ikan, perubahan struktur sosial masyarakat, dan perubahan sistem gender. Pengumpulan data dilakukan dengan metode triangulasi. Metoda ini digunakan untuk memperoleh kombinasi data dan informasi yang akurat.

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai titik jenuh jawaban yang dibutuhkan (Rosmelawati, 2013). Pengumpulan data primer dengan pendekatan triangulasi dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap responden dan informan kunci. Informan yang diwawancara dipilih secara sengaja dan dilakukan dengan teknik snowball sampling. Jumlah informan kunci yang diwawancara sampai dianggap data yang diperoleh telah jenuh. Informan kunci yang dipilih (aparat kelurahan, tokoh masyarakat nelayan, LSM dan lain-lain) dianggap mengetahui secara detail mengenai perubahan sosial karena pembangunan pulau reklamasi Teluk Jakarta khususnya di pulau N.

Analisis Data

Data hasil wawancara dianalisis secara kuantitatif. Hasil amalisis tersebut menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2009) dieksplorasi secara interaktif. Aktivitas dalam analisis data kualitatif tersebut *meliputi data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification.*

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta polanya. Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk pencarian data selanjutnya apabila masih diperlukan (data belum jenuh).

Data disajikan dalam bentuk tabel dan gambar/bagan serta dijelaskan secara deskriptif untuk mempermudah memahami makna data yang berbasis persepsi. Dalam mendeskripsikan setiap bentuk hubungan di kuesioner antara pertanyaan dan jawaban kelompok sasaran secara sederhana digunakan metode analisis deskriptif. Setelah data direduksi dan disajikan, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan tersebut menjawab rumusan masalah yang dijelaskan sejak awal. Basis waktu dalam analisis dampak sebelum dan sesudah adanya pembangunan rekalamasi pulau N adalah tahun 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Masyarakat Nelayan Kelurahan Cilincing

Data monografi Kelurahan Cilincing tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk di wilayah ini 32.744 jiwa, 11.937 kepala keluarga. Penduduk laki-laki sebanyak 16.529 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 16.215 jiwa. Agama yang

dianut oleh penduduk di wilayah ini bervariasi. Penduduk yang beragama Islam sebanyak 16.973 jiwa, Kristen sebanyak 11.554 jiwa, Hindu sebanyak 1.962 jiwa, dan Budha sebanyak 2.255 jiwa. Wilayah ini juga dihuni oleh penduduk yang berasal dari berbagai etnik/suku, yaitu Jawa (35,16%), Betawi (27,65%), Sunda (15,27%), Batak (3,61%), Minangkabau (3,18%), Melayu (1,62%), Bugis (0,59%), Madura (0,57%), Banten (0,25%), dan Banjar (0,10%).

Mata pencaharian penduduk di wilayah ini, meliputi: 1.856 orang petani, 2.278 orang nelayan, 346 orang buruh, 3.145 orang pedagang, 2.304 orang karyawan swasta, 2.151 orang pegawai negeri sipil, 2.328 orang tergabung dalam Tentara Nasional Indonesia, 2.251 orang pensiunan, 4.607 orang berwiraswasta, dan 8.608 orang melakukan pekerjaan lainnya. Tingkat pendidikan masyarakat meliputi: 9.525 orang tamatan SD, 8.249 orang tamatan SMP, 6.357 orang tamatan SMA, 2.122 orang tamatan Akademi, dan 4.231 orang tamatan Universitas.

Status kependudukan nelayan di Kelurahan Cilincing pada tahun 2016 terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan yang ber KTP DKI sebanyak 68%, dan lainnya adalah nelayan andon permanen (nelayan yang tinggal dan memiliki rumah di Kelurahan Cilincing namun tidak memiliki KTP DKI) dan nelayan andon musiman (nelayan yang hanya sewaktu-waktu tinggal di kelurahan Cilincing, dan mereka umumnya anak buah kapal yang bekerja di kapal-kapal pemilik di Kelurahan Cilincing). Nelayan andon musiman umumnya berasal dari Tegal, Brebes, Cirebon dan Indramayu.

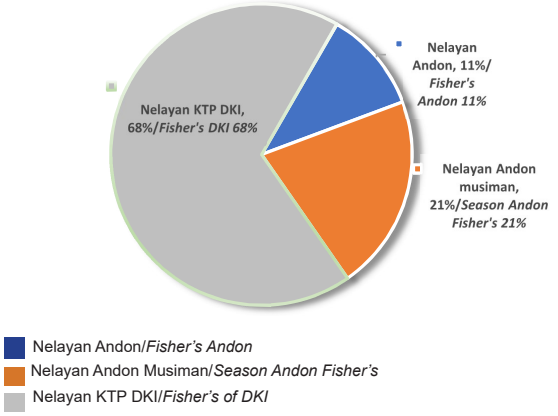
Nelayan Andon, 11%/ Fisher's Andon 11%
Nelayan Andon musiman, 21%/Season Andon Fisher's 21%
Nelayan KTP DKI, 68%/Fisher's DKI 68%
Nelayan Andon/Fisher's Andon
Nelayan Andon Musiman/Season Andon Fisher's
Nelayan KTP DKI/Fisher's of DKI

Gambar 2. Status Kependudukan Nelayan Kelurahan Cilincing, 2007.

Figure 2. Status of the Population Fisher's Cilincing, 2007.

Sumber: Data sekunder Hasil Penelitian BBRSEKP, 2016/
Source: Research Findings BBRSEKP, 2016

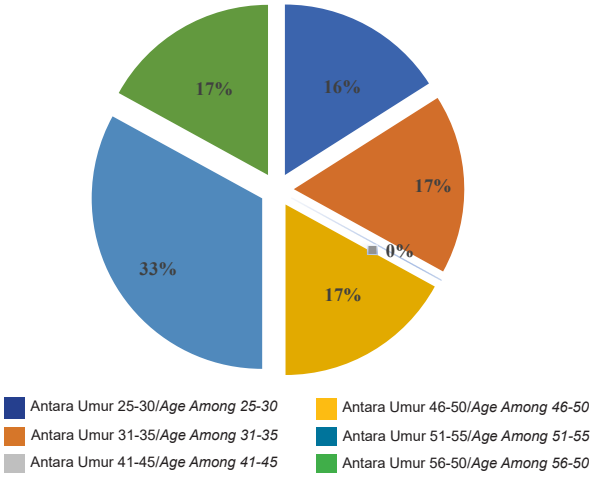

Gambar 3. Kisaran Umur Responden Nelayan di Kelurahan Cilincing, 2007.

Figure 3. Age Range Fisher's Respondent in Cilincing, 2007.

Keterangan: Jumlah responden 20 orang/
Description: Number of respondents 20 people

Sumber: Data sekunder Hasil Penelitian BBRSEKP, 2016/
Source: Research Findings BBRSEKP, 2016

Kisaran umur responden nelayan lebih dominan berusia antara 51-55 tahun. Usia ini merupakan usia produktif dimana nelayan sudah memiliki pengalaman yang sudah mumpuni dalam hal penangkapan ikan. Dari karakteristik usia responden didapatkan informasi tentang gejala perubahan sosial yang terjadi pasca pembangunan pulau reklamasi.

Perubahan Sosial Masyarakat Nelayan Cilincing

1. Perubahan Sumber Pendapatan

Tabel 1, memberi gambaran tentang, sumber pendapatan responden di Kelurahan Cilincing yang berasal dari berbagai sumber, seperti: usaha penangkapan ikan, budidaya kerang hijau, pengupas kulit kerang, pengolah ikan, pedagang ikan, jasa sewa kontrakan, jasa sewa perahu, buruh bangunan, buruh pabrik, dan buruh cuci. Tabel tersebut menunjukkan terjadi perubahan sosial terhadap sumber pendapatan masyakarat nelayan di Cilincing sejak adanya pembangunan pulau reklamasi. Sumber pendapatan pada sumber pendapatan dari budidaya kerang hijau hilang. Bahkan banyak tenaga kerja perempuan kehilangan pekerjaan mereka membantu sebagai menopang kehidupan keluarganya karena sumber pendapatan dari usaha kerang hijau tidak ada lagi.

Tabel 1. Sumber Pendapatan Masayarakat Nelayan di Kelurahan Cilincing, 2007.
Table 1. Revenue Source Fishing Community in the Village of Cilincing, 2007.

Sumber Pendapatan Responden/ ***Sources of Income of Respondents***	**Sebelum Reklamasi/** ***Before Reclamation***	**Sesudah Reklamasi/** ***After Reclamation***
Pendapatan dari usaha penangkapan ikan/*Income from fishing*	Ada/*there is*	Ada/*there is*
Pendapatan dari usaha perikanan budidaya kerang hijau/*Income from the business of Aquaculture Shellfish Green*	Ada/*there is*	Tidak ada/*No*
Pendapatan dari usaha pengupas kulit kerang/ *Income from business peeler shell*s	Ada/*there is*	Tidak ada/*No*
Pendapatan dari usaha pengolah ikan/ *Income from business processing fish*	Ada/*there is*	Ada/*there is*
Pendapatan dari usaha pedagang ikan/ *income from business merchants fish*	Ada/*there is*	Ada/*there is*
Pendapatan dari usaha jasa sewa kontrakan/ *Income from businesses rental services for rent*	Ada/*there is*	Ada/*there is*
Pendapatan dari usaha jasa sewa perahu/ *Income from business services boat rental*	Tidak ada/ *No*	Ada/*there is*
Pendapatan dari usaha buruh bangunan/ *Revenue from business construction worker*	Tidak ada/ *No*	ada
Pendapatan dari usaha buruh pabrik/ *Income from venture factory workers*	Ada, tidak dominan/ *there are, no dominant*	Ada, dominan/ *there are, dominant*
Pendapatan dari usaha buruh cuci/ *Revenue from businesses laundry worker*	Tidak ada/*No*	Ada/*there is*

2. Perubahan Pola Aktivitas Penangkapan

Kegiatan reklamasi secara langsung telah mempengaruhi mata pencaharian nelayan tradisional di Teluk Jakarta (Ramadhan *et al.,* 2016). Ragam mata pencaharian masyarakat Kelurahan Cilincing yang menggantungkan hidupnya pada bidang perikanan sebelum adanya pulau reklamasi adalah sebagai nelayan, pembudidaya kerang hijau, pengolah ikan asin dan kerang hijau, pedagang ikan dan udang. Pulau reklamasi di Teluk Jakarta telah mengindikasikan terjadi perubahan pola mata pencaharian masayarakat yang memanfaatkan perairan sekitar Teluk Jakarta.

Menurut hasil penelitian Sampono (2013), sebanyak 43% dari responden di Kelurahan Cilincing memiliki persepsi bahwa adanya reklamasi akan berdampak terhadap perubahan daerah penangkapan ikan (DPI). Meskipun tidak semua responden sepakat bahwa reklamasi akan berdampak merugikan terhadap DPI, namun menurut Van Berkel *et al.* (2012) kegiatan reklamasi akan berdampak terhadap kegiatan pelabuhan perikanan dan daerah penangkapan ikan di Teluk Jakarta.

Berdasarkan hasil survei, nelayan Kelurahan Cilincing pada umumnya melakukan aktifitas penangkapan dengan menggunakan alat tangkap payang, *mini purse seine, gillnet*, bagan dan dogol, sementara aktifitas budidaya laut adalah budidaya kerang hijau. Lebih lanjut, Sampono (2013) mengemukakan bahwa hasil *overlay* terhadap daerah penangkapan ikan (DPI) dengan rencana pembangunan pulau reklamasi pulau O dan P maka daerah penangkapan ikan yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan reklamasi adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap bagan dan pembudidaya kerang hijau. Bagan yang digunakan di sekitar Teluk Jakarta umumnya bagan tancap dan ada juga bagan apung.

Perubahan sosial pada aktivitas penangkapan ikan akibat pembangunan pulau reklamasi adalah terjadinya perubahan daerah penangkapan ikan (DPI). Reklamasi akan langsung berdampak terhadap DPI karena lokasi pulau baru sebagai hasil reklamasi, akan menghilangkan wilayah perairan yang selama ini menjadi DPI bagi nelayan. Hilangnya wilayah perairan tersebut berganti menjadi daratan (pulau) dan akan memaksa nelayan untuk menemukan DPI baru yang lebih jauh ke arah lautan bebas.

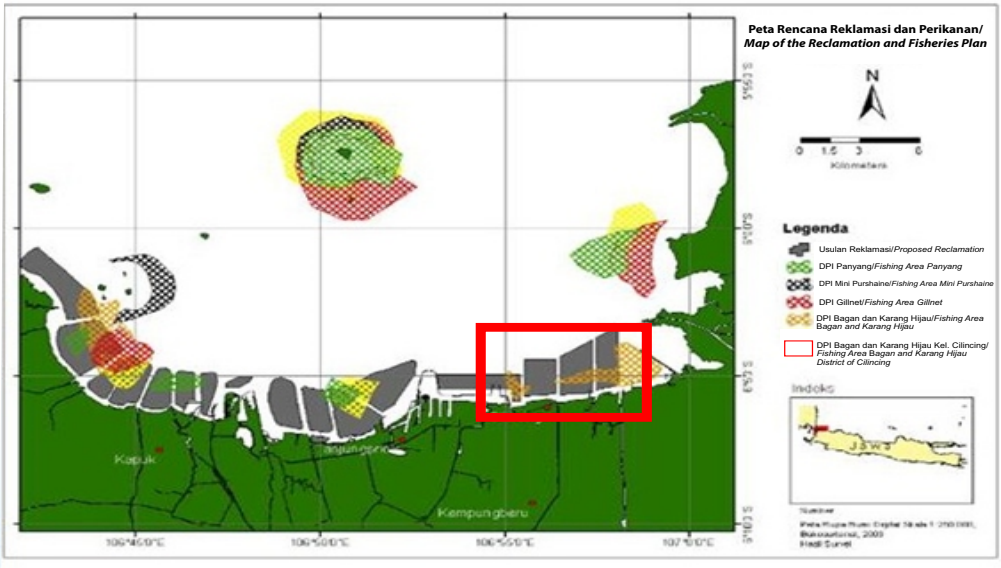
Peta Rencana Reklamasi dan Perikanan/
Map of the Reclamation and Fisheries Plan
N
Legenda
Usulan Reklamasi/Proposed Reclamation
DPI Panyang/Fishing Area Panyang
DPI Mini Purshaine/Fishing Area Mini Purshaine
DPI Gillnet/Fishing Area Gillnet
DPI Bagan dan Karang Hijau/Fishing Area Bagan and Karang Hijau
DPI Bagan dan Karang Hijau Kel. Cilincing/Fishing Area Bagan and Karang Hijau District of Cilincing
Indeks
Kapuk
Kampungberu

Gambar 2. Peta overlay Daerah Penangkapan Ikan di Kelurahan Cilincing.
Figure 2. Map Overlay Fishing Area in Cilincing Village.
Sumber: Data sekunder Hasil penelitian Sampono (2013)/*Source: Secondery data Sampono (2013)*

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa sebelum adanya reklamasi, daerah Cilincing merupakan salah satu sentra budidaya kerang hijau. Komoditas kerang hijau menjadi salah satu pilihan nelayan budidaya di Teluk Jakarta khususnya di Desa Kamal Muara dan Cilincing. Hingga tahun 2009, total nelayan budidaya kerang hijau di Kelurahan Cilincing mencapai 1.626 orang dengan total produksi mencapai 31.100 ton (Jury *et al.,* 2011). Namun dengan adanya kegiatan reklamasi tahun 2015 lokasi budidaya kerang hijau sudah sejak lama eksis menjadi hilang.

Tabel 1. Perubahan Sosial Akibat Pembangunan Pulau Rekalamasi Terhadap Mata Pencaharian, 2007.
Table 1. Symptoms of Social Changes Dur to The Development of Island Reclamation to Livelihood Patterns, 2007.

Mata Pencaharian/ *Livelihood*	Dampak Reklamasi/ *Impact of Reclamation*	Perubahan Sosial/ *Social Change*
Nelayan/*Fishers'*	- Daerah penangkapan ikan lebih jauh/ *The fishing area is further away* - Terganggunya daerah penangkapan ikan akibat adanya hilir mudiknya kapal-kapal ke pelabuhan Marunda/ *Disturbed fishing grounds due to the up and down of the ships to the port of Marunda*	- Adaptasi nelayan dengan Perubahan daerah penangkapan ikan yang lebih jauh lagi di Muara Gembong/ *Adaptation of fishers with new fishing area change even further in Muara Gembong* - Memanfaatkan daerah penangkapan ikan di sekitar Pulau Reklamasi/ *Utilize the fishing area around Reclamation Island*
Pembudidaya Kerang Hijau/ *Green shellfish cuture*	- Hilangnya lahan budidaya kerang hijau/*Loss of green shellfish Maricuture*	- Pembudidaya kerang hijau beralih profesi sebagai pedagang ikan, pedagang alat-alat perikanan, pengolah ikan, buruh, tukang ojek/ *Green shellfish cultivators shift professions as fish traders, traders of fishery equipment, fish processors, laborers, motorcycle taxi drivers*
Pedagang Ikan dan udang/ *Fish and shrimp Traders*	- Berkuranya pasokan ikan, udang sebagai akibat dari berkurangnya produksi ikan hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya/ *Declining supply of fish, shrimp as a result of the collapsed fish production of fisher's and cultivators*	- Membentuk jaringan sosial yang lebih luas untuk mendapatkan pasokan ikan dari desa lain/ *Establish a wider social network to get fish supplies from other villages*

Lanjutan Tabel 1/*Continue Table 1*

Mata Pencaharian/ *Livelihood*	Dampak Reklamasi/ *Impact of Reclamation*	Perubahan Sosial/ *Social Change*
Pengolah Kerang Hijau/ *green mussel processing*	- Hilangnya usaha pengolahan kerang hijau akibat hilangnya lahan budidaya/ *Loss of green shell processing business due to loss of cultivated land*	- Adaptasi mencari sumber mata pencaharian baru/ *Adaptation to find new sources of livelihood* - Tetap melakukan pengolahan kerang dengan memperluas jaringan sosial dengan pembudidaya di luar desa/ *Keep doing shell processing by expanding social network with cultivators outside the village.*
Pengolah ikan asin/ *Processing of salted fish*	- Berkurangnya omset pengolahan ikan asin karena menurunnya bahan baku/ *Reduced turnover of salted fish processing due to declining raw materials*	- Membentuk jaringan sosial yang lebih luas untuk mendapatkan pasokan ikan dari nelayan bagan desa lain/ *Establish a wider social network to get fish supplies from other village chart fishers* - Mencari sumber alternative pencaharian lain/ *Looking for alternative sources of livelihood*
Anak Buah Kapal/*The crew fishers'*	- Kehilangan pekerjaan/ *loss of a job*	- Menganggur/ *I-dle* - Pindah ke desa lain/ *Move to another village* - Ganti pekerjaan (pekerja serabutan kuli angkut, pekerja bangunan dan lain sebagainya)/ *Change jobs (casual laborers, construction workers, etc).*
Buruh pengolah ikan asin/ *Salted fish processing workers*	- Kehilangan pekerjaan/*loss of a job*	- Menganggur/ *Move to another village* - Ganti pekerjaan (kuli angkut, pekerja bangunan dan lain sebagainya) /*Change jobs (casual laborers, construction workers, etc).*
Buruh Pengolah kerang hijau/*Worker Green shell Processing*	- Kehilangan pekerjaan/ *loss of a job*	- Ganti pekerjaan (pembantu rumah tangga, buruh pabrik dan lain sebagainya)/ *Change jobs (casual laborers, construction workers, etc).*

3. Perubahan Struktur sosial

Struktur sosial yang terbentuk dalam kehidupan nelayan dibangun oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim ikan, keterbatasan sumberdaya manusia, keterbatasan modal, serta jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif, tetapi juga dampak negatif modernisasi perikanan. Sesuai dengan pendapat Saleha (2013), konsep struktur sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai konsep yang membentuk susunan pelapisan dan pola hubungan antara orang-orang yang terikat dalam suatu sistem sosial yang dibatasi atau dikendalikan oleh norma-norma atau pola-pola tingkah laku yang disepakati bersama. Kajian struktur sosial ini mengandung konsep stratifikasi (pelapisan), pembedaan status dan peran, relasi kerja serta mobilitas (pergerakan) antar lapisan.

Hasil penelitian pada masyarakat nelayan di Kelurahan Cilincing menunjukkan bahwa struktur masyarakat nelayan yang terbentuk berdasarkan penguasaan dan kepemilikan modal serta alat produksi. Pada masyarakat nelayan di cilincing, pelapisan sosial yang terbentuk terdiri atas tiga strata yaitu Pemilik modal (bos), nelayan pemilik kapal dengan status sosial sedang/menengah dan nelayan buruh (ABK).

Pemilik modal yang juga berfungsi sebagai pedagang atau bakul, merupakan strata pertama dengan status sosial yang paling tinggi. Mereka itu memiliki modal finansial dalam skala besar dan alat produksi yang lengkap. Pemilik modal yang sering disebut "*bos*" oleh para nelayan ini menyediakan modal untuk kebutuhan operasional penangkapan dan jika diperlukan juga menyediakan kapal dan alat tangkap yang dibutuhkan oleh nelayan yang bekerjasama dengannya. Umumnya pemilik

modal tidak terlibat langsung dengan kegiatan penangkapan. Pemilik modal juga merangkap fungsi sebagai pedagang pengumpul yang membeli ikan hasil tangkapan dan kemudian menjualnya kembali melalui proses pelelangan di TPI, ataupun melalui jaringan pemasaran sendiri ke luar daerah.

Nelayan pemilik kapal merupakan strata kedua dengan status sosial sedang/ menengah. Nelayan ini memiliki alat produksi berupa kapal dan alat tangkap, tetapi biasanya tidak memiliki cukup modal finansial untuk kebutuhan operasional melaut sehingga adakalanya masih memerlukan bantuan pinjaman modal maupun input produksi dalam bentuk natura dari *ponggawa.* Nelayan pemilik ini masih terlibat langsung melakukan operasi penangkapan di laut dengan dibantu oleh nelayan buruh ataupun tanpa nelayan buruh. Strata ketiga yang merupakan status sosial paling rendah adalah nelayan buruh. Nelayan buruh ini memiliki modal tenaga sebagai sumbangan dalam struktur kerja kelompok, tetapi tidak memiliki modal finansial, kapal atau alat tangkap.

Jaringan sosial terjalin atas dasar hubungan antar keterkaitan individu. Keterkaitan individu dalam hubungan sosial merupakan pencerminan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antar individu tersebut membentuk jaringan sosial yang sekaligus merefleksikan terjadinya pengelompokan sosial dalam masyarakat (Kusnadi, 2000).

Keberadaan masyarakat nelayan dalam suatu jaringan sosial merupakan bentuk kerjasama kolektif dalam penjualan hasil tangkap di Kelurahan Cilincing. Jaringan sosial pada masyarakat nelayan di Kelurahan Cilincing terbentuk berdasarkan kesamaan kebutuhan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha perikanan. Jaringan sosial ini juga terjadi pada masyarakat nelayan di Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang (Muniruzzaman, 2015).

Jaringan sosial yang dibangun mulai dari proses mendapatkan hasil tangkapan sampai pada memasarkan hasil tangkapan tersebut. Jaringan sosial ini juga terjadi antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang (andon). Nelayan andon tinggal dan beraktivtas di atas perahu. Di Cilincing, nelayan andon terkenal dengan sebutan RCTI (Rombongan Cirebon, Tegal dan Indramayu). Nelayan andon tidak memiliki rumah sehingga untuk menjamin usaha mereka agar dapat bertahan, mereka membangun relasi dengan nelayan lokal yang ada di wilayahnya. Nelayan andon memiliki *langgan/ bos* untuk memasarkan hasil tangkapannya. Hal ini membuat nelayan andon tetap bertahan ditengah keterbatasan yang dimiliki.

Bagi nelayan andon atau lokal di Cilincing, langgan/bos memiliki peranan penting, tidak hanya berperan dalam rantai pemasaran tetapi juga juga berperan pada aspek kehidupan yang lebih luas. Langgan turut andil menyediakan modal baik modal investasi maupun modal biaya operasional. Selain itu langgan juga meyediakan kebutuhan pokok nelayan pada saat panceklik, kredit informal, dan kebutuhan lainnya. Hal ini yang menjadikan ikatan bagi kliennya untuk menjual hasil tangkapannya ke langgan Di satu sisi nelayan sangat membutuhkan pembeli hasil tangkapannya, dan disisi lain langgan membutuhkan hasil tangkapan ikan untuk mereka jual. Bertemunya dua kelompok sosial dengan suatu kebutuhan bersama menyebabkan terjadinya proses saling mempengaruhi dalam berinterkasi. Hubungan dan interaksi sosial yang terjalin tersebut telah berjalan selama puluhan tahun secara terus-menerus melahirkan sistem sosial budaya yang berkelanjutan dan menjamin kehidupan masyarakat nelayan di Cilincing.

Pola hubungan interaksi sosial yang ada di Cilincing salah satunya adalah hubungan sosial antara nelayan ABK dengan nahkoda. Beberapa bentuk relasi yang ada di pesisir Teluk Jakarta yaitu:

1. Nelayan pemilik dengan pedagang pengumpul. Relasi ini dibangun untuk menjamin kepastian ikan hasil tangkapan terjual semua. Keuntungan yang diterima oleh nelayan adalah nelayan tidak perlu lagi memasarkan ikan hasil tangkapan karena sudah ada yang langsung memasarkan ikannya.
2. Nelayan pemilik dengan pedagang saprokan. Relasi ini dibangun untuk menjamin kepastian input produksi seperti ransum dan BBM. Keuntungan yang diterima oleh nelayan adalah nelayan tidak perlu mempersiapkan uang tunai karena dapat berhutang kepada pedagang sembako dan BBM. Biasanya pedagang memberikan batas pengambilan sembako atau BBM sebanyak 2-3 kali hutang.
3. Pemilik modal dengan nahkoda. Relasi terjalin antara juragan pemilik modal kapal dengan Nahkoda yang didasarkan adanya adanya hubungan saling membutuhkan. Juragan pemilik kapal membutuhkan nahkoda untuk menjalankan asetnya, sedangkan nahkoda membutuhkan kapal dan biaya operasional untuk melakukan aktivitas mengakap ikan di

laut. Biasanya interaksi ini terjadi atas dasar kepercayaan. Aturan main yang ada dalam relasi ini adalah sistem bagi hasil.

4. Nelayan ABK dengan Pemilk kapal. Relasi yang terjalin antara nelayan ABK dan pemilik kapal didasari kebutuhan masing-masing karena ABK tidak memiliki asset kapal sehingga tetap dapat melaut sedangkan pemilik kapal tidak lagi kesulitan mencari ABK sehingga kapalnya bisa menghasilkan uang. Relasi sosial antara nelayan ABK dan pemilik kapal biasanya menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban sehingga melahirkan sistem bagi hasil.
5. Relasi sosial antara pedagang pengumpul dengan pedagang pengecer. Relasi ini biasanya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pihak. Pedagang pengumpul ikan menginginkan ikan yang dimilikinya cepat laku terjual, sedangkan pedagang pengecer menginginkan mendapatkan ikan sehingga dapat memasarkan ikan. Relasi antara pedagang pengumpul dan pedagang pengecer ini tidak hanya dilakukan antara mereka yang kenal dan tinggal di lokasi yang sama; tetapi lebih didasarkan pada rasa saling percaya *(trust)* yang terbangun karena seringnya mereka bertemu dan berinteraksi. Pada umumnya ikan yang dibawa oleh pedagang pengecer tidak selalu dibayar tunai karena sudah ada rasa saling percaya. Besarnya piutang yang diberikan oleh pedagang pengumpul berbeda-beda, namun informasi dari salah satu pedagang pengumpul yang diwawancarai mengaku besaran piutang dari nelayan dan pedagang pengecer umumnya berjumlah di atas seratus juta rupiah.
6. Relasi sosial antara pedagang pengumpul ikan dengan pengolah ikan asin. Relasi antara pedagang pengumpul dan pengolah ikan asin memiliki kemiripan dengan relasi pedagang pengumpul dan pengecer. Biasanya relasi mereka didasari rasa saling percaya karena sudah sering berinteraksi.

Dampak pembangunan pulau reklamasi terhadap pola relasi dan jaringan sosial antara pemilik kapal dengan nahkoda, nahkoda dengan ABK, pemilik dengan pedagang tidak terlihat. Meskipun terjadi penurunan produksi, nelayan pemilik, nahkoda dan ABK tetap melakukan aktivitas penangkapan seperti sebelum adanya pembangunan pulau reklamasi. Jaringan sosial yang telah terjalin selama bertahun-tahun tetap seperti sebelum adanya reklamasi.

Hal itu berbeda dengan pola interaksi antara pembudidaya/peternak dan pengolah kerang hijau. Interaksi yang terjalin diantara mereka menjadi terputus karena peternak kerang hijau tidak lagi melakukan budidaya kerang hijau dan memasok ke pengolah akibat adanya pembangunan pulau reklamasi tersebut. Pola adaptasi yang dilakukan oleh peternak kerang hijau yaitu melakukan ternak di wilayah lain dan ada pula yang melakukan aktivitas sebagai nelayan tangkap atau pedagang.

Nahkoda memiliki relasi dengan pemilik kapal. Nahkoda memiliki relasi dengan langgan warung. Pemilik kapal memiliki relasi dengan langgan ikan. Relasi yang ada terbentuk berdasarkan aspek kepentingan. Nahkoda berkepentingan dengan ABK karena terikat dalam sebuah ikatan kerja secara informal. Relasi yang terbentuk memenuhi aspek ekonomi kebutuhan. Selain itu ada beberapa relasi yang terjalin antara nahkoda dan ABK bersadarkan kekerabatan ada pula yang terjalin bersadarkan kedekatan pertemanan.

Nahkoda membutuhkan ABK untuk kegiatan penangkapan ikan dan ABK membutuhkan nahkoda sebagai sandaran dalam mencari nafkah. Nahkoda yang tidak memiliki perahu, memiliki relasi langsung dengan pemilik kapal. Dalam hal ini pemilik kapal mempercayakan kapal yang dimilikinya untuk diusahakan oleh nahkoda. Ikatan kerja yang terjadi adalah ikatan antara pemilik kapal dan nahkoda, sedangkan ABK memiliki hubungan langsung dengan nahkoda dan tidak memiliki hubungan langsung dengan pemilik kapal. Pada usaha penangkapan, nahkoda yang memiliki kapal akan berhubungan kepada langgan ikan sebagai tempat menjual ikan dan langgan warung tempat membeli/meminjam bahan bahan operasional. Jika memiliki hutang, maka relasi yang terjadi menjadi terikat, yaitu adanya kesepakatan bahwa tetap melakukan kesepakatan selama masih ada ikatan hutang. Bentuk relasi dan jaringan ini juga berlaku untuk nelayan lokal dan pendatang (andon). Nelayan andon tidak memiliki lahan untuk bagan di Cilincing, namun nelayan andon memiliki akses terhadap pemilik lahan di Cilincing. Nelayan andon menyandarkan perahu di bagan yang dimiliki oleh langgan. Bagan terdapat disepanjang alur keluar-masuk kapal di Cilincing.

Pola hubungan dan interaksi ini juga terbentuk antara peternak kerang hijau dengan pengolah kerang hijau. Peternak kerang hijau

memiliki relasi dengan pekerja ternak kerang hijau dan pengolah kerang hijau. Pengolah kerang hijau mempunyai hubungan interaksi dengan pekerja pengolah kerang hijau yang mana didominasi oleh perempuan.

4. Perubahan Sistem Gender

Sistem gender adalah sistem pembagian kerja secara seksual *(the division of labor by sex)* dalam masyarakat nelayan, yang didasarkan pada kebudayaan yang ada. Dengan kata lain, sistem gender merupakan konstruksi sosial dari masyarakat nelayan yang terbentuk sebagai hasil evolutif dari suatu proses dialektika antara manusia, lingkungan, dan kebudayaannya. Sebagai produk budaya, sistem gender diwariskan secara sosial dari generasi ke generasi (Afriyani, 2011).

Sistem gender masyarakat nelayan di Kelurahan Cilincing terpola dan menjadi *stereotype* bahwa pekerjaan yang terkait dengan penangkapan di laut merupakan ranah kaum laki-laki, sedangkan pekerjaan yang berada di wilayah darat yang berhubungan dengan aktivitas domestik seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya adalah ranah kerja kaum perempuan. Afriyani (2011) mengungkapkan bahwa pekerjaan di laut, seperti melakukan kegiatan penangkapan, menjadi ranah laki-laki karena karakteristik pekerjaan ini membutuhkan kemampuan fisik yang kuat, kecepatan bertindak, dan berisiko tinggi. Dengan kemampuan fisik yang berbeda, kaum perempuan menangani pekerjaan-pekerjaan di darat, seperti mengurus tanggung jawab domestik, serta aktivitas sosial-budaya dan ekonomi.

Lebih lanjut Afriyani (2011) mengemukakan bahwa kaum perempuan memiliki cukup banyak waktu untuk menyelesaikan tanggungjawab pekerjaan tersebut. Sebagian besar aktivitas perekonomian di kawasan pesisir melibatkan kaum perempuan dan sistem pembagian kerja tersebut telah menempatkan kaum perempuan sebagai “penguasa aktivitas ekonomi pesisir”. Dampak dari sistem pembagian kerja ini adalah kaum perempuan mendominasi dalam urusan ekonomi rumah tangga dan pengambilan keputusan penting di rumah tangganya. Dengan demikian, kaum perempuan tidak berposisi sebagai ”suplemen” tetapi bersifat ”komplemen” dalam menjaga kelangsungan hidup rumah tangganya.

Dampak pembangunan pulau reklamasi mengindikasikan terjadinya gejala perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat nelayan tradisional di Kelurahan Cilincing, tidak terkecuali sistem gender, meskipun dampak yang ditimbulkan tidak semuanya negatif. Aktivitas ekonomi yang melibatkan kaum perempuan di Kelurahan Cilincing adalah pengolahan hasil perikanan seperti pengolahan ikan asin dan pengolahan kerang hijau. Karena pendapatan suami yang tidak menentu membuat wanita nelayan memiliki kegiatan lain di luar aktivitas domestik (kegiatan harian seorang wanita pada umumnya) dan aktivitas sosial lain. Peran perempuan nelayan tidak hanya sebatas menjaga dan mengurus anak, membersihkan rumah dan sebagainya melainkan secara nyata sudah terlibat dalam kegiatan ekonomi langsung. Wanita nelayan umumnya bekerja yang langsung menghasilkan uang, di antaranya sistem kerja upah langsung dan jual beli, sehingga para wanita nelayan bisa langsung mendapatkan uang setelah mereka bekerja. Ada pula ibu-ibu dan anak-anak nelayan membantu ekonomi rumah tangganya dengan bekerja sebagai buruh pengolah/membersihkan kerang dengan upah Rp.3000,- per ember, namun sekarang sudah jarang ada aktifitas. Artinya, pembangunan pulau rekalamasi memberikan dampak negative terhadap akses permepuan nelayan untuk memanfaatkan sumberdaya khususnya sumberdaya kerrang hijau.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Karakteristik Nelayan Kelurahan Cilincing merupakan nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan skala kecil. Wilayah penangkapan hanya di sekitar perairan Teluk Jakarta dengan jumlah hari penangkapan hanya 1 hari per trip. Mayoritas nelayan di Cilincing adalah suku Jawa (Indramayu,) Bugis, Ujung Pandang. Nelayan Indramayu biasanya hanya menggunakan perahu dibawah 5GT dengan jumlah ABK 2-3 orang. Status kependudukan nelayan di Kelurahan Cilincing pada tahun 2016 terbagi menjadi tiga kelompok yaitu nelayan yang ber KTP DKI, nelayan andon permanen dan nelayan andon musiman. Nelayan andon permanen adalah nelayan yang tinggal dan memiliki rumah di Kelurahan Cilincing namun tidak memiliki KTP DKI.

Pembangunan pulau reklamasi menimbulkan dampak pada perubahan sosial antara lain perubahan sumber pendapatan, pola mata pencaharian, struktur sosial, dan sistem gender

masyarakat nelayan skala kecil yang melakukan kegiatan penangkapan di sekitar perairan Teluk Jakarta. Perubahan sosial ini membuat mereka melakukan adaptasi baik dengan beralih ke sumber mata pencaharian baru, maupun memperluas jaringan dan relasi sosial.

Implikasi Kebijakan

Permasalahan tentang dampak sosial akibat pembangunan pulau reklamasi terhadap masyarakat perikanan di Cilincing perlu segera dicarikan solusinya, terutama terhadap masyarakat nelayan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Pemerintah harus melakukan pendampingan tentang mata pencaharian alternatif pada nelayan tanpa melakukan relokasi. Bagi masyarakat nelayan yang mempunyai pola adaptasi dengan adanya pembangunan pulau reklamasi harus didukung dengan berbagai skema bantuan agar perubahan sosial tersebut memberi manfaat yang besar dalam pembangunan ekonomi di Cilincing.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian ini, rekan-rekan peneliti yang survey lapang dalam rangka pengumpulan data terkait dengan penelitian tentang reklamasi di Teluk Jakarta pada Tahun 2017. Terima kasih juga kepada *key informan* di Cilincing. Selain itu, ucapan terima kasih juga kepada segenap tim redaksi yang telah memberikan masukan dan arahan untuk penyempurnaan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afriayani, A.Y. 2011. Sosioligi Masyarakat Nelayan. http://www.bppp-tegal.com/web/index.php/ artikel/ manajemen/122-sosiologi-masyarakat-nelayan. Diakes Pada tanggal 22 Mei 2017.

Bellwood, P. dan E. Dizon. 2013. The Batanes Islands, Their First Observers and Previous Archeology in (Bellwood and Dizon eds). 4000 Years of Migration and Cultural Exchanges. ANU Press. Australia. hal. 2 – 8.

Berkel,V. J., M. Jury, T. Foster, J. Dusik, B. Wiryawan, L. Salaki, N. Chans, dan S. Pans. 2012. *Jakarta Bay Recommendation Paper by DHI Water & Environement*. Publikasi Danida ESP2. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 222 hal.

Estrada, E.M. 1999. Social and Economic Changes and Players in Rural Areasof the South of Europe. IESA-CSIC, Cordoba-Spain.Retrieved from: http://creativecommons.org/licences/by-nd/2.0/fr/deed.fr.

Jury, M., S. Pans, T. Golingi, dan B. Wiryawan. 2011. Kajian Dampak Lingkungan Pengembangan Pesisir Teluk Jakarta (*Rapid Environmental Assessment Coastal Development in Jakarta Bay) by DHI Water&Environment.* Publikasi Danida ESP2. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.143 hal.

Kusnadi, 2004. *Mengatasi Kemiskinan Nelayan Jawa Timur: Pendekatan Terintegrasi, Bagaimana Harus Memulai,* dalam Kusnadi (Penyunting),Polemik Kemiskinan Nelayan, Yogyakarta: Pembaharuan.

Kusmana, C. 2014. Konservasi dan Rehabilitasi Mangrove di Wilayah DKI Jakarta. Fakultas Kehutanan IPB. hal.10.

Muniruzzaman. 2015. Eksistensi Masyarakat Nelayan dalam Mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Naskah Publikasi. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tanjung Pinang.

Parsons, T. 1951. The Social System. Collier Mc. Millan Ltd. The Free Press of Glenco. London.

Pranowo, W.S, G. Pramono, M. Hutomo, A. Nontji dan I. Maufikoh. 2014. Karakteristik Oseanografi Ekoregion Laut Provinsi DKI Jakarta. Dalam Poernomo, A. B. Sulistyo, S. Wirasantosa dan I.S Brodjonegoro (eds) Dinamika Teluk Jakarta: Analisis Prediksi Dampak Pembangunan Tanggul Laut Teluk Jakarta (Jakarta Giant Sea Wall). hal. 55 - 68. IPB Press.

Puspasari, S., S.T. Hartati, dan R.F. Anggawangsa. 2017. Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan dan Perikanan di Teluk Jakarta. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia. Vol. 9(2): 85-94.

Ramadhan, A., M. Firdaus, R.A. Wijaya, dan I. Mulyawan. 2016. Estimasi Kerugian Nelayan dan Pembudidaya Ikan Akibat Reklamasi Di Teluk Jakarta. Jurnal Sosek KP. Vol. 11(1) : 1-11.

Rosmelawati. 2013. Manajemen Pengawasan Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bandung (Studi Deskriptif di Kelompok

Kerja Pengawas (Pokjawas) Kementerian Agama Kabupaten Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia.repository.upi.edu. perpustakaan.upi.edu. hal. 58.

Saleha, Q. 2013. Kajian Struktur Sosial dalam Nelayan di Pesisir Kota Balikpapan. BULETIN PSP. Vol. 21(1) : 67-75.

Sampono, N. 2013. Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Dampak Reklamasi Terhadap Kegiatan Perikanan Pantai di Teluk Jakarta. Tesis. Institut Pertanian Bogor. 126 hal.

Simandjuntak, B. 2007. Sosiologi Pembangunan. Bina Ilmu. Jakarta.

Sitorus, M.T.F. 1998. Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan. Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial. Institut Pertanian Bogor.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.

Zulham, A., Z. Nasution, S.A. Pranowo, Hikmah, M. Firdaus, B.V.I. Yanti, dan Nurlaili. 2017. Perubahan Sosial dalam Masyarakat Perikanan Karena Kebijakan Reklamasi. Laporan Penelitian. BBPSEKP. Jakarta.

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PENANGKAPAN IKAN TRADISIONAL: STUDI KASUS DI DESA PECANGAAN, KECAMATAN BATANGAN, KABUPATEN PATI

Strategy For Developing Traditional Fishing Bussiness: Case Study in The Pecangaan Village, Batangan Subdistrict of Pati Regency

***Herna Octivia Damayanti**
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati
Jl. Raya Pati-Kudus Km.4 Pati 59163, Telp/Fax. (0295) 381351
Diterima tanggal: 22 Februari 2018 Diterima setelah perbaikan: 8 Mei 2018
Disetujui terbit: 6 Juni 2018
*email: octivia_oc@yahoo.co.id

ABSTRAK

Produktivitas yang rendah merupakan salah satu ciri umum nelayan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan prioritas strategi dalam rangka mengembangkan usaha penangkapan ikan tradisional di Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 di Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Data primer berasal dari 55 sampel responden (nelayan di Desa Pecangaan) dan data sekunder berasal dari Pemerintah Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metoda analisis *Strength Weakness Opportunity Threat* (*SWOT)* dan *Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)*. Hasil penelitian memberikan ilustrasi strategi pengembangan sebagai berikut. Strategi pertama adalah peningkatan produktivitas dengan penggunaan alat tangkap modern. Strategi kedua adalah pengawasan dan pemberian sanksi tegas tentang alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, strategi ketiga adalah perubahan tata niaga penjualan hasil tangkapan melalui proses lelang di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan pengembangan akses pemasaran, strategi keempat adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, strategi kelima adalah pembinaan berkaitan dengan dampak perubahan iklim, dan strategi keenam adalah kemudahan dalam pengajuan pinjaman modal.

Kata Kunci: Desa Pecangaan; perikanan tangkap tradisional; QSPM; strategi pengembangan; SWOT

ABSTRACT

Low of productivity is a one of common characteristics of traditional fishing business. This research aimed at formulating a priority development strategy in order to improve the traditional fishing bussiness in the Pecangaan village, Batangan subdistrict of Pati regency. The research uses a descriptive method with quantitative and qualitative approach and was conducted in October 2016 in the Pecangaan village, Batangan subdistrict of Pati regency. Primary data comes from 55 respondents were selected as a sample (fishers in the Pecangaan village) and secondary data ere collected from Government of the Pecangaan village level of Batangan Subdistrict. The sample was 55 people. Data was analyzed by using Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) and Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) analysis methods. Results of the research are: the first strategy is namely the increase of fishing productivity with the use of modern fishing gear. The second strategy is supervision and giving strict sanctions on fishing gear which is not environmentally friendly, the third strategy is the change of sales management throughauction process in fish auction and development of marketing access, the fourth strategy is to improve the quality of human resources, the fifth strategy is coaching related to the impacts of climate change, and the sixth strategy is the ease of capital lending.

Keywords: Pecangaan Village; tradisional fishing; QSPM; strategy for development; SWOT

**Korespodensi Penulis:*
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati
Jl. Raya Pati-Kudus Km.4 Pati 59163, Telp/Fax. (0295) 381351

PENDAHULUAN

Pembangunan dapat memiliki makna sebagai upaya membangun masyarakat sekaligus mempertahankan kelestarian sumber daya alam, termasuk sumber daya kelautan dan perikanan, pada saat bersamaan. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat dan sumber daya kelautan dan perikanan, satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Hal ini didasarkan atas sebuah premis yang menyebutkan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah sumber daya alam yang dipandang terbatas atau tidak tersedianya sumber daya alam konvensional yang biasanya digunakan oleh masyarakat nelayan (Dahuri, 2001).

Profesi nelayan di Indonesia bukan merupakan profesi yang menjanjikan, yang dapat memberikan masa depan baik atau kesejahteraan hidup. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi di negara-negara lain, seperti Jepang atau Malaysia, untuk menjadi nelayan di negara-negara tersebut dibutuhkan keahlian dan konsistenitas profesi, sehingga tingkat kehidupan nelayan di negara-negara tersebut mapan. Mencermati keadaan sektor perikanan tangkap khususnya tentang jumlah nelayan, dapat dijadikan satu penilaian atau indikator bahwa ternyata sektor perikanan tangkap di Indonesia masih didominasi oleh nelayan tradisional dengan skala penangkapan yang kecil pula (Retnowati, 2011).

Pembahasan tentang nelayan, khususnya nelayan kecil atau tradisional sangat juga terkait dengan sistem kerja mereka. Pada umumnya jam kerja mereka relatif singkat biasanya cukup satu hari saja (*one day fishing*). Kondisi atau kebiasaan semacam ini berdampak pada hasil tangkapan yang tidak optimal sehingga mengakibatkan tingkat produksi rendah dan pendapatan mereka juga tidak optimal akibatnya tingkat kesejahteraan nelayan pun rendah (Retnowati, 2011).

Salah satu daerah yang mempunyai wilayah pesisir di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Pati. Kabupaten Pati sebagai Kabupaten yang memiliki batasan dengan laut memiliki kawasan pesisir yang terbentang dari utara sampai timur yang terdiri dari 7 kecamatan yaitu Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Trangkil, Wedarijaksa, Juwana dan Batangan. Jumlah desa pesisir yang terdapat di 7 kecamatan adalah 52 desa. Panjang garis pantai pesisir Kabupaten Pati adalah 60 km (Damayanti, 2011). Disepanjang pantai Kabupaten Pati terdapat 7 TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yaitu TPI Puncel, TPI Banyutowo, TPI Alasdowo, TPI Sambiroto, TPI Margomulyo, TPI Bajomulyo (Bajomulyo I dan Bajomulyo II) dan TPI Pecangaan (BPS Kab. Pati, 2016).

Jumlah nelayan secara keseluruhan di Kabupaten Pati (nelayan juragan dan pandega) adalah 6.248 orang. Nelayan dengan kapal 5-10 GT dikategorikan sebagai nelayan tradisional karena sistem kerja mereka yaitu *one day fishing* (berangkat berlayar dan pulang dalam sehari). Jumlah nelayan yang menggunakan kapal bermesin 5-10 GT adalah 1.395 nelayan (DKP Kab. Pati, 2016). Salah satu daerah mayoritas nelayan tradisional di Kabupaten Pati adalah di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Profesi nelayan di Desa Pecangaan dijalankan oleh laki-laki. Berdasarkan data BPS Kab. Pati, jumlah penduduk laki-laki tahun 2015 di Desa Pecangaan adalah 551 jiwa. Data jumlah nelayan pemilik kapal dan ABK di Desa Pecangaan yaitu 274 orang yang terdiri dari nelayan pemilik kapal 195 orang dan ABK 79 orang (Pemerintah Desa Pecangaan, 2015). Dengan demikian, 49,73% dari penduduk laki-laki di Desa Pecangaan berkecimpung dalam kegiatan penangkapan ikan atau nelayan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian adalah untuk merumuskan prioritas strategi dalam rangka mengembangkan usaha penangkapan ikan tradisional di Desa Pecangaan Kabupaten Pati.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari responden (nelayan di Desa Pecangaan). Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu dilakukan secara langsung terhadap responden dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data sekunder berasal dari Pemerintah Desa Pecangaan Kecamatan Batangan.

Sampel penelitian sebanyak 55 responden nelayan diambil berdasarkan jumlah populasi nelayan yang ada di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan. Dalam pengambilan sampel ditetapkan beberapa kriteria yaitu:

Tabel 1.Kriteria Sampel Penelitian.
Table 1. Research Sample Criteria.

No	Kriteria/*Criteria*
1.	Bermata pencaharian sebagai nelayan/*Livelihood as a fishers*
2.	Nelayan pemilik kapal/*Fishers boat owner*
3.	Bertempat tinggal di Desa Pecangaan/*Living in Pecangaan Village*
4.	Pengalaman menjadi nelayan ≥ 5 tahun/*Experience as fishers ≥ 5 years*
5.	Kapal yang dioperasikan bermesin 5-10 GT/*The boat operated engined 5-10 GT*

Jumlah populasi penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan adalah 274 orang dengan rincian 190 orang merupakan nelayan pemilik kapal bermesin 5-10 GT, 5 orang merupakan nelayan pemilik kapal bermesin < 5 GT dan 79 orang merupakan ABK (Anak Buah Kapal) (Pemerintah Desa Pecangaan, 2015). Berdasarkan data tersebut maka jumlah nelayan yang sesuai dengan kriteria pada Tabel 1 yaitu 190 orang. Jika mengacu pada Monogram Harry King tahun 1997 pada tingkat kesalahan 5% maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 55 orang.

Analisis data dengan menggunakan analisis *Strength Weakness Opportunity Threat* (*SWOT)* dan *Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)*. Analisis *SWOT* ditentukan faktor internal dan eksternal yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan ikan nelayan Desa Pecangaan. Faktor-faktor internal yang dikelompokkan dalam kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang dikelompokkan dalam peluang dan ancaman diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan responden. Dalam wawancara dengan responden dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan nelayan Desa Pecangaan, kemudian hasil wawancara ini disarikan sehingga didapatkan faktor-faktor internal dan eksternal.

Faktor internal dan eksternal ini disajikan dengan matriks Faktor Strategi Internal (IFE) dan matriks Faktor Strategi Eksternal (EFE), untuk selanjutnya dilakukan analisis *SWOT*. Matriks IFE dan EFE yang telah diberi rating dilakukan pembobotan dan dihitung skornya. - Pembobotan dilakukan berdasarkan jawaban dari responden. Responden diminta untuk memberikan penilaian dengan cara membandingkan dua faktor . Dua faktor yang dibandingkan, jika salah satunya dianggap lebih penting dibanding faktor yang lain maka diberi nilai 3, jika dianggap sama penting oleh responden maka diberi nilai 2 dan jika dianggap tidak penting akan diberi nilai 1. Kemudian suatu faktor setelah dibandingkan dengan semua faktor yang lain baik itu internal maupun eksternal maka nilainya dijumlahkan. Untuk memperoleh besar bobot suatu faktor maka jumlah nilai faktor hasil perbandingan kemudian dibagi dengan jumlah nilai semua faktor hasil perbandingan. Bobot akhir merupakan hasil rata-rata aritmatik dari hasil pembobotan terhadap masing-masing responden. Untuk mendapatkan skor suatu faktor yaitu dengan mengalikan bobot dengan rating. Rating suatu faktor diperoleh dari rata-rata nilai suatu faktor yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Untuk kekuatan dan peluang diberi rating 4 (sangat kuat) dan 3 (kuat). Sedangkan untuk kelemahan dan ancaman diberi rating 1 (sangat rendah) dan 2 (rendah).

Analisis *SWOT* digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) (Rangkuti, 1999). Strategi yang dirumuskan selanjutnya dianalisis dengan *QSPM* untuk menentukan prioritas strategi yang direkomendasikan (David *et al*., 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Isu Strategis Kegiatan Penangkapan Ikan

Isu strategis yang berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan Desa Pecangaan yaitu nelayan Desa Pecangaan merupakan nelayan tradisional dengan sistem sistem kerja *one day fishing*. Kondisi ini disebabkan oleh karena armada kapal nelayan Desa Pecangaan berukuran kecil yaitu antara 5-10 GT dan masih menggunakan mesin motor tempel. Jenis alat tangkap yang dipakai oleh nelayan Desa Pecangaan yaitu jaring udang, jaring rajungan dan bubu, dengan alat tangkap dominan yaitu jaring udang. Area penangkapan nelayan Desa Pecangaan yaitu di

lepas pantai Kabupaten Pati yang termasuk dalam Perairan Laut Jawa (WPP 712). Kondisi tersebut berdampak pada hasil tangkapan yang tidak optimal sehingga tingkat produksi menjadi rendah dan pendapatan tidak optimal akibatnya tingkat kesejahteraan nelayan Desa Pecangaan cenderung lebih rendah dibandingkan kesejahteraan nelayan di daerah lain di Kabupaten Pati terutama di daerah Juwana.

Permasalahan yang dihadapi nelayan Desa Pecangaan selain armada kapal yang berukuran kecil (5-10 GT) yaitu alat tangkap yang masih sederhana. Pengoperasian alat tangkap masih dikerjakan secara manual (dengan tenaga manusia saja). Permasalahan tersebut dipicu oleh kurangnya modal untuk pengembangan usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan Desa Pecangaan. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan ini menjadikan usaha penangkapan ikan nelayan Desa Pecangaan sulit berkembang, sehingga perlu dibuat formulasi strategi untuk mengembangkan usaha penangkapan ikan nelayan Desa Pecangaan.

Faktor Strategis Internal Dan Eksternal

Hasil skoring faktor internal dibuat dalam bentuk matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) disajikan secara terperinci pada Tabel 2.

Faktor-faktor strategis internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Setelah dilakukan pembobotan diperoleh nilai bobot dari masing-masing faktor. Nilai pembobotan diatas 0,1 menunjukkan faktor tersebut memiliki peranan yang dominan (Wahyudi *et al.*, 2012). Untuk kekuatan dominan yaitu (1) BBM solar mudah didapat, (2) pengalaman menjadi nelayan dan (3) tenaga kerja cukup tersedia. Faktor BBM solar mudah didapat menjadi alasan penting dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan karena solar merupakan bahan bakar utama untuk menggerakkan kapal motor milik nelayan. Kemudahan untuk mendapatkan BBM solar dapat memperlancar kegiatan penangkapan ikan nelayan Desa Pecangaan. Faktor pengalaman menjadi nelayan juga memberi peranan penting dalam suatu kegiatan penangkapan ikan, khususnya untuk nelayan tradisional. Hal ini karena nelayan tradisional memiliki keterbatasan peralatan sehingga lebih banyak mengandalkan "insting" atau pengalaman dalam menjelajahi lautan untuk mencari lokasi ikan. Selain itu, faktor tenaga kerja cukup tersedia juga memperlancar kegiatan penangkapan ikan karena masih dilakukan secara manual dan tradisional.

Kelemahan yang dominan yaitu penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. "Faktor manusia" memegang peranan penting pada kelemahan dominan ini. Hal ini karena

Tabel 2. Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) Usaha Penangkapan Ikan Nelayan Desa Pecangaan, 2006.

Table 2. Matrix of Internal Factors Evaluation of Fishers Fishing Business in the Pecangaan Village , 2006.

Faktor-faktor Strategis Internal/ *Internal Strategic Faktors*	Bobot/*Quality*	Rating/*Rating*	Skor/*Score*
Kekuatan/*Strenghts*			
1 BBM solar mudah didapat/*Solar fuel easy to get*	0.161	4	0.643
2 Pengalaman menjadi nelayan/*Experience as fishers*	0.161	4	0.643
3 Tenaga kerja cukup tersedia/*Labour is sufficient*	0.161	4	0.643
4 Lokasi penangkapan dekat/*Near fishing location*	0.089	3	0.268
Total Kekuatan/*Total of Strenghts*			**2.196**
Kelemahan/*Weaknesses*			
1 Teknologi masih sederhana/*Technology is still simple*	0.089	1	0.089
2 Modal sulit/*Capital is difficult*	0.089	1	0.089
3 Pendidikan rendah/*Low education*	0.089	1	0.089
4 Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan/ *Unsustainable fishing*	0.161	2	0.321
Total Kelemahan/*Total of weaknesses*			**0.589**
Selisih Total Kekuatan-total kelemahan (x)/ *Different of total of strenghts-total weaknesses (x)*			**1.607**
Total *IFE/ Total of IFE*			**2.786**

kegiatan penangkapan dilakukan oleh "manusia" yaitu nelayan sehingga kelestarian lingkungan dan sumber daya laut menjadi tanggung jawab dari pelaku kegiatan eksploitasi (penangkapan ikan). Kegiatan penangkapan ikan tergolong kegiatan eksploitasi karena hanya melakukan pemanenan tanpa melakukan penanaman atau pembenihan sehingga perilaku yang ramah terhadap kelestarian lingkungan dan sumber daya laut sangat diperlukan. Perilaku penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dalam jangka panjang akan berakibat pada kerusakan ekosistem laut, yang pada akhirnya akan berakibat pada berkurangnya sumber daya yang ada didalamnya (dalam hal ini ikan). Berkurangnya sumber daya ikan tentu akan mengakibatkan berkurangnya hasil tangkapan ikan, selanjutnya akan mengakibatkan penurunan pendapatan nelayan dan akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup nelayan. Perubahan perilaku terhadap lingkungan dan sumber daya laut dapat menjadi cara ampuh untuk mengatasi kelemahan tersebut.

Nilai rating faktor kekuatan yang besar menunjukkan pihak yang terkait dengan usaha ini telah mampu memanfaatkan kekuatan yang ada. Sebaliknya nilai rating kecil pada faktor kelemahan menunjukkan pihak yang terkait belum mampu mengatasi kelemahan yang muncul (Wahyudi *et al.*, 2012). Untuk kekuatan, faktor yang telah mampu dimanfaatkan yaitu BBM solar mudah didapat, pengalaman menjadi nelayan dan tenaga kerja cukup tersedia. Sedangkan untuk kelemahan, yang belum dapat diatasi yaitu teknologi masih sederhana, modal sulit dan pendidikan rendah.

Hasil skoring masing-masing faktor eksternal dibuat dalam bentuk matriks Evaluasi Faktor Enternal (EFE) disajikan secara terperinci pada Tabel 3.

Peluang dominan yaitu (1) terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan (2) permintaan ikan tinggi. Keberadaan TPI Pecangaan harus lebih dimanfaatkan dan dioptimalkan sehingga dapat menjadi pengontrol harga ikan. Selama ini nelayan menjual ikan hasil tangkapan ke bakul atau tengkulak, sedangkan TPI hanya digunakan sebagai tempat penjualan ikan tanpa dilakukan pelelangan. Selain itu, peluang dengan permintaan ikan tinggi dapat digunakan sebagai kesempatan untuk meningkatkan pendapatan nelayan Desa Pecangaan.

Tabel 3. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) Usaha Penangkapan Ikan Nelayan Desa Pecangaan, 2006.

Table 3. Matrix of External Factors Evaluation of Fishers Fishing Business in the Pecangaan Village, 2006.

Faktor-faktor Strategi Eksternal/ *External Strategic Factors*	Bobot/Quality	Rating/Rating	Skor/Score
Peluang/*Opportunities*			
1 Bantuan dan pinjaman lunak dari pemerintah/*Help and soft loans from government*	0.089	3	0.268
2 Pelatihan dan bimbingan dari pemerintah tentang teknologi penangkapan/*Training and guidance from the government on capture technology*	0.089	3	0.268
3 Terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/*There is a Fish Auction Place*	0.161	4	0.643
4 Permintaan ikan tinggi/*Fish demand is high*	0.161	4	0.643
Total Peluang/*Total of Opportunities*			**1.821**
Ancaman/*Threats*			
1 Harga ikan ditentukan oleh tengkulak/*The price of fish is determined by the middleman*	0.161	2	0.321
2 Penangkapan ikan tergantung musim dan cuaca/*Fishing depends on season and weather*	0.161	2	0.321
3 Harga ikan rendah/*The price of fish is low*	0.089	1	0.089
4 Kerusakan ekosistem laut/*Damage to marine ecosystems*	0.089	1	0.089
Total Ancaman/*Total of Threats*			**0.821**
Selisih Total Peluang-total Ancaman (y)/ *Different of Total Opportunities-Total of Threats (Y)*			**1.000**
Total EFE/*Total of EFE*			**2.643**

Untuk ancaman dominan yaitu (1) harga ikan ditentukan oleh tengkulak dan (2) penangkapan ikan tergantung musim dan cuaca. Permainan harga ikan oleh bakul atau tengkulak sangat terasa di lokasi penelitian. Hal ini karena TPI belum dapat berperan sebagai tempat pelelangan ikan. Untuk ancaman ini, sangat berkaitan dengan peluang dominan yaitu terdapatnya TPI di Desa Pecangaan. Untuk mengembangkan usaha penangkapan ikan nelayan Desa Pecangaan harus dilakukan revitalisasi fungsi TPI Pecangaan sehingga dapat meminimalisir permainan harga oleh bakul atau tengkulak. Ancaman dominan selanjutnya yaitu penangkapan ikan tergantung cuaca. Perubahan cuaca sangat mempengaruhi usaha penangkapan ikan nelayan Desa Pecangaan yaitu berkaitan dengan jumlah hari melaut. Nontji (1987) menyebutkan jika angin musim bertiup dengan mantap walaupun kekuatannya relatif tidak besar, maka akan terciptalah kondisi baik untuk terjadinya arus musim. Kondisi tiupan angin yang mantap ini sangat membantu nelayan karena arah tiupan angin teratur menciptakan kondisi yang bersahabat untuk kegiatan melaut sehingga jumlah hari dan lama waktu melaut bertambah dan hasil tangkapan juga akan meningkat. Jika cuaca kurang baik akan menyebabkan berkurangnya jumlah hari melaut sehingga hasil tangkapan akan turun dan akhirnya mengakibatkan turunnya pendapatan nelayan.

Peluang yang telah mampu dimanfaatkan yaitu terdapat TPI dan permintaan ikan tinggi. Untuk ancaman yang belum dapat diatasi yaitu harga ikan rendah dan kerusakan ekosistem laut

Matriks Internal Eksternal Usaha Penangkapan Ikan

Dari Tabel 2 dan 3 dapat dilihat faktor-faktor utama lingkungan internal dan ekternal yang ditandai dengan bobot tertinggi yaitu: (1) Kekuatan utama: BBM solar mudah didapat, dengan bobot 0,161; Pengalaman menjadi nelayan, dengan bobot 0,161 dan tenaga kerja cukup tersedia, dengan bobot 0,161. (2) Kelemahan utama adalah penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dengan bobot 0,161. (3) Peluang utama adalah terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dengan bobot 0,161 dan permintaan ikan tinggi, dengan bobot 0,161. (4) Ancaman utama adalah harga ikan ditentukan oleh tengkulak, dengan bobot 0,161 dan penangkapan ikan tergantung musim dan cuaca, dengan bobot 0,161.

Total Skor IFE (2,786) > EFE (2,643) menunjukkan faktor internal lebih dominan daripada faktor eksternal sehingga faktor internal lebih berpengaruh dibanding faktor eksternal. Nilai IFE dan EFE yang diperoleh dapat dibuat dalam bentuk matrik internal eksternal (IE) disajikan pada Gambar 1.

Strategi yang diperoleh berada pada sel V yaitu strategi pertumbuhan melalui integrasi horizontal (Rangkuti, 1999). Strategi berada di sel V karena nilai IFE 2,786 berada diantara 2,0-3,0 yang merupakan range nilai sel V. Selain itu, nilai EFE 2,643 juga berda diantara 2,0-3,0 yang merupakan range nilai sel V sehingga strategi yang diperoleh merupakan strategi sel V yaitu strategi

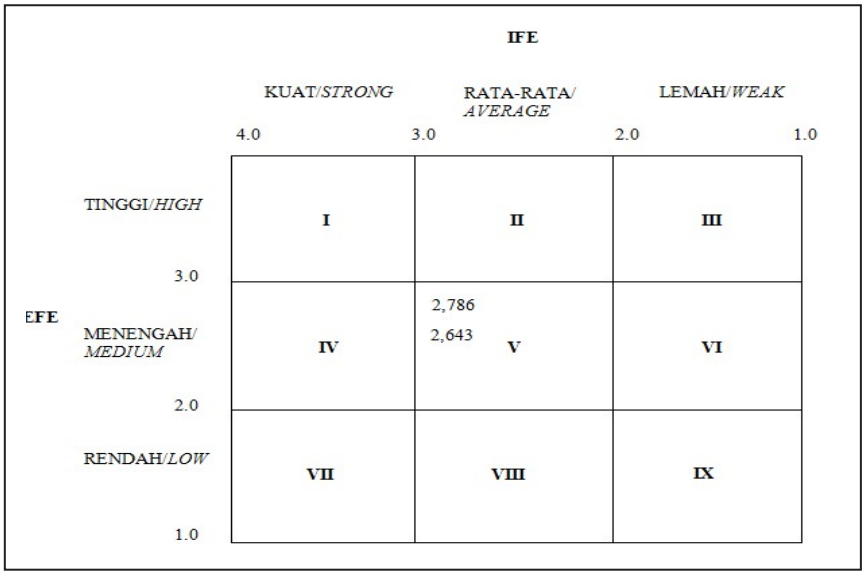

Gambar 1. Matriks Internal Eksternal Usaha Penangkapan Ikan Nelayan Desa Pecangaan.
Figure 1. Internal External Matrix of Fishers Fishing Business in the Pecangaan Village.

pertumbuhan melalui integrasi horizontal. Rangkuti (1999) menyebutkan bahwa tujuan dari strategi ini relatif lebih defensif yaitu untuk menghindari kehilangan penjualan dan kehilangan profit. Dengan demikian strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengaktifkan TPI Pecangaan sebagai tempat pelelangan hasil tangkapan sehingga penentuan harga jual ikan dilakukan dengan cara lelang, dengan cara demikian diharapkan nelayan dapat menekan kemungkinan mendapat harga rendah dari ikan tangkapannya.

Matriks *Grand Strategy* Usaha Penangkapan Ikan

Matriks *grand strategy* ditentukan dari selisih total kekuatan-kelemahan (x) dan peluang-ancaman (y). Ahmadi *et al*. (2012) *dalam* Saghaei *et al*. (2012) menyebutkan bahwa tujuan dari pembuatan matriks ini adalah untuk menentukan posisi usaha penangkapan ikan nelayan Desa Pecangaan yang sesungguhnya pada kuadran *SWOT*. Posisi usaha penangkapan ikan nelayan Desa Pecangaan disajikan pada Gambar 2.

Hasil ploting menunjukkan posisi berada pada kuadran I yaitu strategi progesif atau agresif. Rangkuti (1999) menyatakan bahwa kuadaran I merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena memiliki peluang dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan usaha. Total skor kekuatan lebih besar dibandingkan total skor kelemahan, berarti usaha penangkapan ikan oleh nelayan Desa Pecangaan mempunyai kekuatan lebih untuk ditingkatkan. Untuk total skor peluang juga lebih besar dibandingkan total skor ancaman sehingga usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan Desa Pecangaan memiliki banyak peluang untuk dikembangkan. Strategi yang diterapkan berdasarkan hasil ploting pad kuadran I yaitu untuk strategi yang bersifat progesif atau agresif. Hal agresif yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan Desa Pecangaan adalah dengan meningkatkan produktivitas usaha. Peningkatan produktivitas usaha penangkapan ikan oleh nelayan Desa Pecangaan berkaitan dengan pengembangan armada kapal. Pengembangan armada kapal dapat diartikan sebagai penambahan jumlah kapal, peningkatan ukuran kapal dan penggunaan peralatan yang lebih modern. Namun, dalam upaya pengembangan armada kapal tidak terlepas dari persoalan pemodalan sehingga nelayan Desa Pecangaan memerlukan bantuan pemodalan. Pattiasina (2011) menyebutkan bahwa program-program prioritas dalam upaya peningkatan produktivitas nelayan antara lain: kredit pemilikan kapal bagi buruh nelayan, membuka tabungan khusus untuk buruh nelayan, dan optimalisasi fungsi dan peran lembaga keuangan mikro dan koperasi nelayan.

Penentuan Strategi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan

David *et al.* (2009) menyatakan bahwa matriks *SWOT* menggunakan faktor internal dan eksternal sebagai dasar untuk menghasilkan strategi-strategi yang layak untuk dipertimbangkan. Alternatif strategi hasil analisis dengan matriks *SWOT* disajikan pada Tabel 4.

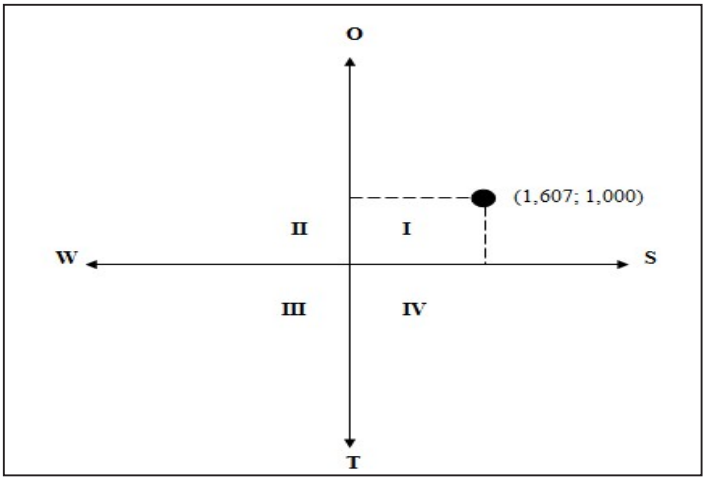

Gambar 2. Matriks Grand Strategy Usaha Penangkapan Ikan Oleh Nelayan di Desa Pecangaan.
Figure 2. Grand Strategy Matrix of Fishers Fishing Business in the Pecangaan Village.

Tabel 4. Matriks SWOT Usaha Penangkapan Ikan Nelayan Desa Pecangaan.
Table 4. SWOT Matrix of Fishers Fishing Business in the Pecangaan.

FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL/*INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS*	KEKUATAN (*STRENGTHS*)	KELEMAHAN *(WEAKNESSES)*
	1. BBM solar mudah didapat/*Solar fuel easy to get* 2. Pengalaman menjadi nelayan/ *Experience as fishers* 3. Tenaga kerja cukup tersedia/*Labour is sufficient* 4. Lokasi penangkapan dekat/*Near fihing location*	1. Teknologi masih sederhana/*Technology is still simple* 2. Modal sulit/*Capital is difficult* 3. Pendidikan rendah/*Low education* 4. Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan/*Unsustainable fishing*
PELUANG/*OPPORTUNITIES*	**STRATEGI S-O**	**STRATEGI W-O**
1. Bantuan dan pinjaman lunak dari pemerintah/*Help and soft loans from government* 2. Pelatihan dan bimbingan dari pemerintah tentang teknologi penangkapan/*Training and guidance from the government on capture technology* 3. Terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/*There is a fish Auction Place* 4. Permintaan ikan tinggi/*Fish demand is high*	Peningkatan produktivitas usaha penangkapan ikan dengan penggunaan alat tangkap modern /*Increased productivity of fishing business with the use of modern fishing gear (S1, S2, S3, O1, O3, O4)*	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (masyarakat nelayan) melalui pelatihan dan bimbingan tentang teknologi penangkapan ikan modern dan ramah lingkungan/*Improving the quality of human resources (fishers community) through training and guidance on modern and environmentally friendly fishing technology (W1,W3,W4,O2)* 2. Kemudahan dalam pengajuan pinjaman modal bagi pengembangan kegiatan usaha penangkapan ikan/*Ease of capital loan application for the development of fishing business activities (W1, W2, O1,O4)*
ANCAMAN/*THREATS*	**STRATEGI S-T**	**STRATEGI W-T**
1. Harga ikan ditentukan tengkulak/ *The price of fish is determined by the middleman* 2. Penangkapan ikan tergantung musim dan cuaca/*Fishing depends on season* and weather 3. Harga ikan rendah/*The price of fish is low* 4. Kerusakan ekosistem laut/*Damage to marine ecosystems*	Pembinaan berkaitan dengan dampak perubahan iklim bagi lingkungan laut/ *Coaching that related to the impacts of climate change on the marine environment (S2, T2, T4)*	1. Perubahan tata niaga penjualan hasil tangkapan melalui proses lelang di TPI dan pengembangan akses pemasaran/ *Changes in the sales management of the catch through auction process in TPI and the development of marketing access (W3, T1,T3)* 2. Pengawasan dan pemberian sanksi tegas tentang alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan/*Supervision and strict sanctions to the fishing gear that is not environmentally friendly (W3,W4,T4)*

Strategi yang dihasilkan kemudian ditentukan prioritas strategi dengan analisis *QSPM*. David *et al.* (2009) menyatakan bahwa penilaian diberikan berdasarkan besarnya dukungan dari setiap faktor terhadap masing-masing alternatif strategi atau disebut *Total Attractive Score* (TAS). Setelah diketahui nilai *Attractive Score* (AS) kemudian dihitung nilai TAS yang merupakan hasil perkalian antara bobot dengan nilai AS. Alternatif strategi yang memiliki nilai TAS tertinggi menjadi strategi prioritas utama, sedangkan alternatif strategi yang memliki nilai TAS terendah menjadi strategi prioritas terakhir. Prioritas strategi sebagai hasil analisis *QSPM*disajikan pada Tabel 5.

Berdasarkan hasil analisis *QSPM* diperoleh urutan prioritas strategi dalam rangka pengembangan usaha penangkapan ikan nelayan Desa Pecangaan sebagai berikut:

1. Prioritas I dengan nilai TAS 5,911 yaitu peningkatan produktivitas usaha penangkapan ikan dengan penggunaan alat tangkap modern. Modernisasi alat tangkap perlu dilakukan untuk nelayan Desa Pecangaan. Modernisasi yang diharapkan yaitu dengan penggunaan alat tangkap yang semula dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia saja menjadi alat tangkap yang dapat dioperasikan dengan menggunakan dukungan mesin terutama pada

Tabel 5. Hasil Analisis QSPM PengembanganUsaha Penangkapan Ikan Nelayan Desa Pecangaan.
Table 5. QSPM Analysis Result of Fishers Fishing Business in the Pecangaan Village.

Uraian Strategi/*Detail of strategies*	TAS	Prioritas/*Priority*
Peningkatan produktivitas usaha penangkapan ikan dengan penggunaan alat tangkap modern/*Increased productivity of fishing business with the use of modern fishing gear*	5.911	1
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (masyarakat nelayan) melalui bimbingan dan pelatihan tentang penangkapan ikan modern dan ramah lingkungan/*Improving the quality of human resources (fishers community) through training and guidance on modern and environmentally friendly fishing technology*	4.446	4
Kemudahan dalam pengajuan pinjaman modal bagi pengembangan kegiatan usaha penangkapan ikan/*Ease of capital loan application for the development of fishing business activities*	3.375	6
Pembinaan berkaitan dengan dampak perubahan iklim bagi lingkungan laut/*Coaching that related to the impacts of climate change on the marine environment*	4.268	5
Perubahan tata niaga penjualan hasil tangkapan melalui proses lelang di TPI dan pengembangan akses pemasaran/*Changes in the sales management of the catch through auction process in TPI and the development of marketing access*	4.625	3
Pengawasan dan pemberian sanksi tegas tentang alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan/*Supervision and strict sanctions to the fishing gear that is not environmentally friendly*	5.018	2

saat proses pengangkatan jaring yang telah ditebar. Selain itu, modernisasi juga diharapkan dilakukan dengan penggunaan alat bantu untuk penangkapan ikan seperti penggunaan GPS untuk menemukan lokasi gerombolan ikan. Keluhan yang disampaikan oleh nelayan Desa Pecangaan yaitu semakin sulitnya mencari ikan tangkapan, sehingga dengan bantuan GPS diharapkan akan mempermudah nelayan Desa Pecangaan untuk menemukan lokasi ikan. Pattiasina (2011) menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat pendapatan nelayan, antara lain alat tangkap yang masih tradisional dan skala kecil, selain itu pengetahuan keterampilan juga masih terbatas. Nelayan Desa Pecangaan yang merupakan kelompok nelayan tradisional masih menggunakan peralatan yang sederhana sehingga mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini terjadi karena semakin terdesaknya keberadaan mereka oleh nelayan-nelayan yang lebih modern yaitu nelayan menengah dan nelayan besar sehingga pengembangan teknologi untuk alat tangkap menjadi wajib untuk dilakukan. Sipahelut (2010) menyebutkan bahwa implikasi pengembangan teknologi adalah perbaikan kapasitas kinerja operasional unit penangkapan ikan, meningkatkan daya jangkau melaut, bertambahnya upaya penangkapan (jumlah *trip*) dan hasil tangkapan menjadi meningkat.

Menurut Ambo dalam Wiwik dan Ma'ruf (2016), upaya meningkatkan pendapatan dilakukan melalui perbaikan teknologi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi dan pemasaran. Teknologi yang digunakan masyarakat pesisir umumnya masih bersifat tradisional, sehingga yang terjadi adalah produktivitas masyarakat rendah, dan hal tersebut menyebabkan pendapatan masyarakat rendah pula. Salah satu upaya peningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dapat dilakukan dengan salah satu upaya yaitu dengan memperbaiki teknologi, mulai dari teknologi produksi sampai dengan pasca produksi hingga pemasaran. Namun demikian, upaya pengembangan teknologi modern juga harus memperhatikan kondisi sosial budaya dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat teknologi yang diberikan dapat tepat guna. Menurut Sipahelut (2010), upaya pemberdayaan masyarakat melalui perbaikan teknologi harus juga mempertimbangkan sifat, karakteristik, kemampuan dan kesiapan masyarakat pesisir agar implemetasi teknologi dapat berkelanjutan.

2. Prioritas II dengan nilai TAS 5,018 yaitu pengawasan dan pemberian sanksi tegas tentang alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Alat tangkap tidak ramah lingkungan yang masih digunakan yaitu alat tangkap cantrang. Alat tangkap jenis ini masih digunakan oleh nelayan-nelayan kecil terutama yang berasal dari Desa Banyutowo. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat, sementara daya dukung alam bersifat terbatas menyebabkan potensi kerusakan sumber daya alam menjadi semakin besar. Hal ini tentunya memberikan dampak yang cukup serius bagi kelangsungan hidup nelayan, terutama nelayan-nelayan skala kecil. Kejadian ini merupakan konsekuensi logis dari ketergantungan nelayan terhadap sumber daya pesisir dan laut (Dahuri *dalam* Helmi dan Satria, 2012). Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya nelayan akan berusaha mendapatkan tangkapan sebanyak mungkin bahkan cenderung kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Latuconsina *dalam* Sima *et al.* (2014) menyebutkan aktivitas penangkapan ikan di Indonesia telah mendekati kondisi kritis, akibat tekanan penangkapan dan tingginya kompetisi antar alat tangkap dan telah menyebabkan menipisnya stok sumber dayaikan, sehingga nelayan mulai melakukan modifikasi alat tangkap untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal termasuk menggunakan teknologi penangkapan yang merusak atau tidak ramah lingkungan. Meningkatnya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya pesisir dan laut perlu mendapat perhatian serius baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat nelayan. Pengawasan dan pemberian sanksi tegas harus diterapkan sebagai upaya untuk meminimalisir penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian Sima *et al.* (2014), alat tangkap yang sangat ramah lingkungan adalah jaring insang *(gill net)* dan pancing, sedangkan alat tangkap jaring insang dasar, rawai, dan perangkap (bubu) adalah alat tangkap yang ramah lingkungan, sesuai teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan dengan ketentuan *Food Agriculture Organization (FAO, 1995).* Produksi hasil tangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan (jaring insang dasar, rawai dan bubu) lebih banyak dibandingkan alat tangkap sangat ramah lingkungan (jaring insang *(gill net)* dan pancing). Dengan demikian diperlukan kesadaran dari nelayan bahwa hasil tangkapan yang berkurang saat ini dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan akan menjamin ketersediaan stok ikan untuk kegiatan eksploitasi yang berkelanjutan.

   Kriteria utama penilaian terhadap keramahan lingkungan, berdasarkan ketentuan FAO *dalam* Dirjen KP3K dan PT. Bina Marina Nusantara (2006) kriteria alat tangkap ramah lingkungan memenuhi 9 kriteria diantaranya adalah : (1) mempunyai selektifitas yang tinggi, (2) tidak merusak habitat, (3) menghasilkan ikan berkualitas tinggi, (4) tidak membahayakan nelayan, (5) produksi tidak membahayakan konsumen, (6) *by-catch* rendah (hasil tangkap sampingan rendah), (7) dampak ke *biodiversity,* (8) tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi, (9) diterima secara sosial.

3. Prioritas III dengan nilai TAS 4,625 yaitu perubahan tata niaga penjualan hasil tangkapan melalui proses lelang di TPI dan pengembangan akses pemasaran. Desa Pecangaan mempunyai sebuah TPI yaitu TPI Pecangaan, sampai sejauh ini fungsi dari TPI Pecangaan belum berjalan sebagai tempat pelelangan tapi baru berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli ikan antara nelayan dan bakul. Darmawiasih (2012) menyebutkan bahwa TPI sebagai sarana untuk transaksi hasil tangkap ikan oleh nelayan dan pedagang. Tempat Pelelangan Ikan menjadi wadah para nelayan dan penjual ikan dalam kegiatan jual beli. Riyadi (2012) menyebutkan TPI menjadi wadah pertemuan antara nelayan sebagai produsen dengan bakul ikan sebagai pembeli yang melakukan transaksi penjualan ikan atau hasil laut baik secara lelang. Idealnya, penjualan ikan dengan proses lelang dapat menciptakan *fairness*, baik bagi pihak nelayan maupun bakul ikan. Dengan adanya proses lelang dalam penjualan ikan, maka diharapkan dapat menghindari terjadinya *asymmetric information* karena melalui proses lelang, informasi bisa diperoleh secara sempurna. Proses lelang dapat menggambarkan *willingness to pay* dari pembeli secara tepat sehingga berperan dalam pembentukan harga yang sesuai dengan mekanisme pasar. Para pembeli dapat saling bersaing dalam memberikan penawaran harga sampai terbentuk harga pada level tertentu yang merupakan titik equilibrium dari kekuatan permintaan dan penawaran. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam proses pembentukan harga tersebut, baik dari sisi

permintaan (pihak pembeli) maupun penawaran (pihak nelayan) sama-sama memiliki *bargaining position* untuk mempengaruhi harga sehingga terbentuk harga jual ikan yang lebih menguntungkan bagi nelayan. Lain halnya bila nelayan langsung menjual ke bakul ikan secara sendiri-sendiri, maka harga yang terbentuk akan jauh lebih rendah karena nelayan tidak memiliki *bargaining position* dalam penentuan harga. Dengan demikian, secara konseptual, proses lelang dalam transaksi penjualan ikan merupakan cara yang tepat untuk membentuk harga yang adil dan stabil bagi nelayan maupun pembeli. Belum berfungsinya TPI sebagai tempat pelelangan ikan menurut Riyadi (2012) dikarenakan pengelola TPI tidak mampu menarik minat nelayan untuk menjual hasil tangkapannya ke TPI. Para nelayan kehilangan kepercayaan untuk memilih TPI sebagai wadah untuk memasarkan hasil tangkapan mereka. Hal ini disebabkan karena TPI yang awalnya didirikan untuk membantu para nelayan agar terlepas dari jeratan kemiskinan, kini justru berkembang menjadi sarana untuk memungut retribusi oleh Pemda. Peran Pemda melalui dinas perikanan sebagai pengelola TPI diharapkan tidak hanya sebatas untuk menjamin terselenggaranya proses pelelangan yang sesuai prosedur dan membenahi sistem pencatatan data saja, melainkan juga membantu sistem distribusi komoditi perikanan.

Distribusi komoditi perikanan dapat dilakukan dengan pengembangan akses pemasaran. Sipahelut (2010), pasar adalah faktor penting dalam menjalankan usaha. Pasar bisa menjadi kendala utama usaha bila tidak berkembang, karena itu membuka akses pemasaran adalah cara untuk mengembangkan usaha perikanan, bila tidak ada pasar, maka akan menghambat perkembangan usaha masyarakat pesisir. Pengaturan sistem distribusi hasil perikanan menurut Riyadi (2012) sangatlah penting untuk menjaga agar harga jual di pasar tidak mengalami penurunan secara signifikan pada saat jumlah pasokan ikan melimpah. Oleh karena produk hasil perikanan bersifat mudah rusak, maka dalam upaya membangun sistem distribusi yang baik, perlu adanya sistem penyimpanan dengan menggunakan *cold storage* yang higienis.

4. Prioritas IV dengan nilai TAS 4,446 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (masyarakat nelayan) melalui bimbingan dan pelatihan tentang penangkapan ikan modern dan ramah lingkungan. Menurut Dahuri (2000), pada umumnya masyarakat pesisir lebih merupakan masyarakat tradisional dengan kondisi sosial ekonomi rendah dan relatif sederhana. Pendidikan formal yang diterima masyarakat pesisir secara umum jaul lebih rendah dari pendidikan masyarakat non pantai lainnya. Cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (nelayan Desa Pecangaan) dapat ditempuh dengan pendidikan informal seperti pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang dilakukan juga harus fokus terhadap hal-hal yang dapat diterapkan langsung dalam kegiatan keseharian masyarakat nelayan Desa Pecangaan. Pelatihan ini dapat meliputi pelatihan tentang teknologi dan alat tangkap modern. Selain itu, agar selaras dengan isu yang sedang berkembang pelatihan juga harus diarahkan tentang alat tangkap ramah lingkungan untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Rindawati (2012) menyatakan bahwa pemberian penyuluhan dan pelatihan dapat dilakukan melalui forum-forum pengajian/ikatan kekeluargaan masyarakat nelayan.
5. Prioritas V dengan nilai TAS 4,268 yaitu pembinaan berkaitan dengan dampak perubahan iklim bagi lingkungan laut. Perubahan iklim merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari dan memberikan dampak terhadap berbagai segi kehidupan. Dampak ekstrem dari perubahan iklim terutama adalah terjadinya kenaikan temperatur serta pergeseran musim. Kenaikan temperatur menyebabkan es dan gletser di Kutub Utara dan Selatan mencair. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya pemuaian massa air laut dan kenaikan permukaan air laut. Kenaikan temperatur menyebabkan es dan gletser di Kutub Utara dan Selatan mencair. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya pemuaian massa air laut dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini membawa banyak perubahan bagi kehidupan di bawah laut, seperti pemutihan terumbu karang dan punahnya berbagai jenis ikan (Imron, 2012). Dapat dikatakan bahwa dampak perubahan iklim terhadap sumber daya laut salah satunya adalah berkurangnya populasi ikan. Kondisi demikian tentunya akan berakibat pada risiko turunnya hasil tangkapan nelayan. Laporankeempat IPCC yang memenangkan hadiah nobel perdamaian pada tahun 2007 lalu menempatkan Indonesia

sebagai salah satu Negara yang paling rentan akibat perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan nelayan sulit menentukan musim penangkapan ikan karena cuaca yang tidak menentu dan hal ini berisiko mengubah stabilitas ekosistem, sosial ekonomi masyarakat, dan merusak fungsi planet bumi sebagai penunjang kehidupan (Kusnadi dan Satria *dalam* Helmi dan Satria, 2012). Untuk menghadapi perubahan musim dan cuaca nelayan harus mendapatkan pembinaan dan sosialisasi agar dapat melakukan proses adapatasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Helmi dan Satria (2012) menyebutkan beberapa cara adapatasi yang dapat dilakukan oleh keluarga nelayan yaitu melalui penganekaragaman pendapatan, penganekaragaman alat tangkap, perubahan daerah tangkap, memanfaatkan hubungan sosial dan mobilisasi anggota rumah tangga.

6. Prioritas VI dengan nilai TAS 3,375 yaitu kemudahan dalam pengajuan pinjaman modal bagi pengembangan kegiatan usaha penangkapan ikan. Rindawati (2012) menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan yaitu dengan membantu permodalan terhadap masyarakat nelayan untuk operasional kerja. Pemerintah daerah melalui lembaga keuangan memberikan modal kepada lembaga-lembaga nelayan sehingga kebutuhan para nelayan dapat terpenuhi oleh kelembagaan nelayan tersebut dalam melakukan aktifitasnya. Menurut Pattiasina (2011), persoalan yang dihadapi masyarakat terhadap pemberian pinjaman, adalah kepercayaan lembaga-lembaga keuangan seperti bank kepada masyarakat kecil sangat rendah, karena selama ini fasilitas pinjaman pada lembaga keuangan seperti bank hanya dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas, dan juga banyak fakta terjadi kegagalan pengembalian pinjaman yang dikucurkan bagi masyarakat kecil. Dengan demikian, bentuk peminjaman modal yang diusahakan bukan hanya berasal dari lembaga-lembaga keuangan tetapi juga harus berasal dari pemerintah. Bentuk bantuan pemerintah yang sudah dilakukan selama ini yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat tahun 2012 sampai 2015 (Dewi, 2015) dan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) sejak 2001 dan pelaksanaan fasa awal berakhir pada 2009 (Nugroho, 2015). Namun, bantuan-bantuan yang diberikan sejauh ini dirasa belum dapat memberi perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan nelayan karena bantuan modal yang diberikan selama ini kebanyakan digunakan untuk hal-hal yang bersifat "habis pakai" yaitu untuk kegiatan operasional. Program prioritas tahun 2016-2017, KKP menitikberatkan bantuan untuk usaha nelayan pada bantuan peralatan (alat tangkap dan kapal), asuransi nelayan dan sertifikasi tanah nelayan (KKP, 2016). Dengan bentuk bantuan yang tidak berwujud modal tunai diharapkan pemanfaatan bantuan dapat berkesinambungan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Prioritas strategi pertama untuk pengembangan usaha penangkapan ikan tradisional di Desa Pecangaan Kabupaten Pati yaitu peningkatan produktivitas usaha penangkapan ikan dengan penggunaan alat tangkap modern. Strategi kedua adalah pengawasan dan pemberian sanksi tegas tentang alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Strategi ketiga adalah perubahan tata niaga penjualan hasil tangkapan melalui proses lelang di TPI dan pengembangan akses pemasaran. Strategi keempat adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (masyarakat nelayan) melalui bimbingan dan pelatihan tentang penangkapan ikan modern dan ramah lingkungan. Strategi kelima adalah pembinaan berkaitan dengan dampak perubahan iklim bagi lingkungan laut, dan strategi keempat adalah kemudahan dalam pengajuan pinjaman modal bagi pengembangan kegiatan usaha penangkapan ikan.

Implikasi Kebijakan

Instansi pemerintah (DKP Kabupaten Pati dan Dispermades Kabupaten Pati), perlu memberikan bantuan alat tangkap modern, pelatihan tentang alih teknologi alat tangkap modernkepada nelayan tradisional.

Instansi pemerintah (DKP Kabupaten Pati), perlu mengoptimalkan kinerja Pokwasmas dan

meningkatkan kerjasama dengan TNI AL dan Polairud untuk pengawasan dan tindaklanjut pelanggaran penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Instansi pemerintah (DKP Kabupaten Pati), perlu melakukan penataan dan sistem lelang yang belum berjalan di TPI yang masih berskala kecil.

Instansi pemerintah (DKP Kabupaten Pati), perlu memfasilitasi upaya peningkatan produktivitas nelayan Desa Pecangaan melalui pelatihan pelatihan dan penyuluhan-penyuluhan yang intensif agar dapat meningkatkan kreatifitas, inovasi, ketekunan, serta kesadaran untuk belajar dan menambah pengetahuan mengenai perkembangan teknologi alat tangkap modern. Instansi pemerintah (DKP Kabupaten Pati) bekerjasama dengan, perlu melakukan pelatihan dan sosialisasi pengaruh perubahan iklim terhadap kondisi laut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan naskah ini sampai dapat dipublikasikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada responden penelitian yang meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang penelitian kepada kami.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. 2016. *Pati Dalam Angka Tahun 2015*. Pati.

Dahuri, R. 2000. Pendayagunaan Sumber daya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat. LISPI. Jakarta.

Dahuri, R. 2001. Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta.

Damayanti, H. O. 2011. Kajian Model Hidrodinamika dengan menggunakan Inputan Data Constant dan Transient. Jurnal Litbang.Vol 7(1): 23-31.

Darmawiasih, R. 2012. Tulungagung Surga Perikanan yang Belum Dioptimalkan. KPPOD Brief, Edisi November-Desember 2012: 11-13.

David, M. E., R. D. Forest and R. D. Fred. 2009. *The Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) Applied to Retail Computer Store.* The Coastal Business Journal. Vol. 8(1): 42-52.

Dewi, P.K. 2015. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan Perikanan. Jurnal DISPROTEK. Vol. 6 (2): 14-27.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. 2016. Data Alat Tangkap Kapal Mesin 5-10 GT Di Kabupaten Pati. Pati.

Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan PT. Bina Marina Nusantara. 2006. Panduan Jenis-jenis Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan. Volume I. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan PT. Bina Marina Nusantara. Jakarta.

Food Agriculture Organization (FAO). 1995. *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. FAO Fishery Department.

Helmi, A. dan A. Satria. 2012. Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Ekologis. Makara, Sosial Humaniora. Vol. 16(1): 68-78.

Imron, A. 2012. Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang dalam Menghadapi Perubahan Iklim. Riptek. Vol. 6 (1): 1-12.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2016. Program Prioritas 2016 dan Rencana Kerja 2017 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rapat Kerja Teknis Terpadu Tahun 2016. Jakarta.

Nugroho, M. 2015. Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Pasuruan. Jurnal REKAPANGAN. Vol. 9(1): 1-14.

Nontji, A. 1987. Laut Nusantara. Djambatan. Jakarta.

Pattiasina, J. R. 2011. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Kusu Lovra Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Pemerintah Desa Pecangaan. 2015. Rekapitulasi Data Nelayan Desa Pecangaan. Pati.

Rangkuti, F. 1999. Analisis *SWOT* Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Retnowati, E. 2011. Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum). Perspektif. Vol.16 (3): 149-159.

Rindawati, S. 2012. Strategi Peningkatan Masyarakat Nelayan di Kota Bengkulu. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius).Vol 2 (3): 291-314.

Riyadi, I. A. 2012. Revitalisasi TPI dalam rangka Stabilisasi Harga Jual Ikan. KPPOD brief, Edisi November-Desember 2012: 14-17.

Saghaei, M., L. Fazayeli and M. R. Shojaee. 2012. *Strategic Planning for A Lubricant Manufacturing Company*. Australian Journal of Business and Management Research. Vol. 1(1): 18-24.

Sima, A. M., Yunasfi dan Z. A. Harahap. 2014. Identifikasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai. Jurnal Aquacoastmarine. Vol. 4(3): 48-60.

Sipahelut, M. 2010. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Wahyudi, J., H. O. Damayanti, S. S. Purnomojati. 2012. Formulasi Strategi Pengembangan Usaha Bandeng Presto (Studi di Kabupaten Pati). *Prosiding Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2012* (127-137). Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan.Jakarta.

Wiwik, M. dan F. Ma'ruf. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai di Kabupaten Tuban (Studi Kasus di Desa Gadon, Kecamatan Tambaboyo, Kabupaten Tuban). Publika. Vol. 4(7): 1-10.

STRATEGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENGGALIAN PASIR PANTAI DI PANTAI NASAI – KABUPATEN MERAUKE

Policy Strategy to Overcome Beach Sand Mining in The Nasai Beach – Merauke Regency

***Maria Maghdalena Diana Widiastuti[1], Godefridus Samderubun[1] dan Taslim Arifin[2]**

[1]Universitas Musamus Merauke, Indonesia
Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke 99616
[2]Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan SDMKP – KKP, Indonesia
Kompleks Bina Samudera, Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Lantai 4 Jakarta14430

Diterima tanggal: 18 Maret 2018 Diterima setelah perbaikan: 8 Mei 2018
Disetujui terbit: 6 Juni 2018

*email: mariawidiastuti@unmus.ac.id

ABSTRAK

Penambangan pasir pantai menimbulkan eksternalitas. Bentuk eksternalitas yang terlihat adalah kerusakan jalan raya, penurunan produktivitas produk perikanan, dan kerusakan ekosistem hutan *mangrove* di pesisir pantai. Pemerintah telah mengeluarkan himbauan pelarangan penggalian pasir pantai, namun ekstraksi penggalian pasir di pesisir pantai masih terus terjadi. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi kebijakan penanggulangan penggalian pasir melalui analisis motivasi dan persepsi masyarakat terhadap usaha penggalian pasir pantai dengan pendekatan metodologi analisis *Strength Weakness Opportunity Threat* (*SWOT)* dan penentuan alternatif strategi dengan metode *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM). Hasil penelitian menyebutkan bahwa motivasi masyarakat menjual pasir karena tuntutan ekonomi, tidak perlu bekerja keras, hasilnya stabil dan harga tidak pernah turun dibandingkan usaha pertanian. Adanya anggapan menjual pasir adalah pekerjaan sampingan. Jika tidak ada permintaan pasir, maka masyarakat akan berkebun, berburu, meramu dan mengambil ikan di laut. Banyaknya permintaan masyarakat terhadap pasir. Masyarakat paham dampak negatif penggalian pasir dan menjadi kekuatan dalam penanggulangan penggalian pasir. Kebijakan pemerintah tidak ditegakkan dan terjadi penelantaran diduga sebagai penyebab tetap dilakukan praktek penambangan pasir pantai. Urutan strategi kebijakan yang dapat disarankan untuk pemerintah berdasarkan analisis QSPM adalah: (1) penetapan harga pasir lokal dengan menginternalisasi biaya eksternalitas; (2) penegakan ijin usaha pertambangan dan (3) membentuk kelompok peduli lingkungan pesisir untuk mengembangkan perekonomian masyarakat lokal.

Kata Kunci: strategi kebijakan; eksternalitas; penggalian pasir pantai; metoda SWOT; metoda QSPM

ABSTRACT

Beach sand mining caused externalities. Those type of externalities were shown by road damage, decreasing fisheries productivity, and destruction of mangrove forest ecosystems in coastal areas. Government has prohibited beach sand mining, however, extraction continues to occur. This study aims to analyze the policy strategy to overcome beach sand mining through motivation analysis and perception of community using the Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) and the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) analytical methods. Results of the study showed that people sell sand due to economic reason without having to work hard, its stable production and prices compared to agriculture activity. Selling sand is considered a temporary job. Whenever there is no demand for sand, the community will work for another job, i.e., hunting, fishing and other agricultural activities. Community is aware of negative impact of sand mining and it empower them to prevent sand mining. A weak enforcement of government policy was likely to be the reason of keep practicing beach sand mining. The policy strategy that we suggest for government to overcome the beach sand mining based on the QSPM analysis are: (1) determining the price of local sand by internalizing the externalities cost; (2) law enforcement of sand mining business permits, and; (3) establishing coastal environmental groups to develop other economic activities for local people.

Keywords: policy strategy; externalities; beach sand mining; SWOT method; QSPM method

**Korespodensi Penulis:*
Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Musamus Merauke
Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke 99616

PENDAHULUAN

Ekosistem laut terdiri atas pesisir pantai, estuari, dan mangrove. Pesisir pantai adalah bagian dari lingkungan hidup dimana sumber daya dan jasa lingkungan sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia. Fungsinya yang sangat vital bagi manusia bukan saja untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti hasil perikanan dan bahan tambang seperti pasir pantai, tetapi juga jasa lingkungan berupa pemandangan alam yang dapat dinikmati (Iriani, 2013). Berdasarkan dari sudut pandang kepentingan manusia, lingkungan bisa dibedakan menjadi sumber daya alam dan jasa lingkungan (Mukhlis, 2009). Hal tersebut dihasilkan dari proses alamiah yang terjadi dalam sistem lingkungan atau ekosistem (Soeprobowati, 2011). Sumber daya alam maupun jasa lingkungan sangat bermanfaat dan penting untuk menunjang kehidupan manusia, terutama dalam menyediakan bahan baku untuk kepentingan produksi maupun memberikan fasilitas yang dapat langsung dinikmati oleh manusia (Rukmana, 2012).

Kegiatan penggalian pasir di Pantai Nasai telah dilakukan sejak Tahun 2000-an, dan menopang laju pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Merauke. Namun saat ini kegiatan tersebut menimbulkan eksternalitas yang sangat jelas. Hyman (1999); Mulyaningrum (2005); eksternalitas merupakan biaya atau manfaat dari transaksi pasar yang tidak direfleksikan dalam harga. Lebih Lanjut Fisher (1996); Mulyaningrum (2005); menyatakan bahwa eksternalitasterjadi bila satu aktivitas pelaku ekonomi (baik produksi maupun konsumsi) mempengaruhi kesejahteraan pelaku ekonomi lain dan peristiwa yang ada terjadi di luar mekanisme pasar. Eskternalitas merupakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas pelaku ekonomi yang berdampak kepada pelaku ekonomi lainnya tanpa adanya kompensasi. Eksternalitas yang timbul akibat penggalian pasir pantai di Nasai antara lain kerusakan jalan dan jembatan, banjir rob karena air pasang yang terlalu jauh masuk ke rumah pemukiman penduduk, kerusakan hutan mangrove di sekitar pesisir pantai dan berkurangnya jumlah tangkapan ikan dan kepiting karena rusaknya ekosistem di hutan mangrove. Semua eksternalitas yang ditimbulkan oleh akibat penggalian pasir tersebut dirasakan hampir seluruh masyarakat di kota Merauke.

Berbagai kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat penggalian pasir, ternyata di sisi lain kegiatan penambangan tersebut memberikan keuntungan untuk masyarakat yang memiliki dusun pasir di pesisir pantai. Masyarakat lokal yang memiliki wilayah tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pasir pantai tersebut. Namun eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan pasir pantai ini lebih besar dibandingkan dampak positif yang diterima oleh masyarakat. Menurut penelitian Arisandi (2014), eksternalitas negatif yang ditimbulkan akibat penggalian pasir mencapai Rp128.109.000.000,00 per tahun. Angka ini diperoleh melalui perhitungan penurunan produktivitas tangkapan ikan oleh nelayan di sekitar pantai Payum dan kerusakan mangrove, sementara eksternalitas positifnya hanya Rp25.904.201.428,00. Data ini cukup memberikan gambaran buruknya kegiatan penambangan pasir pantai.

Dalam perspektif filosofis, menurut Fauzi (2014), ada empat tipe pemikiran atau pandangan manusia terhadap eksternalitas dan alam yaitu: *individualist, egalitarian, hierarchist dan fatalist*. Salah satu pandangan yang cenderung reduksionis adalah tipe *individualist* yang memandang alam sebagai sistem yang secara otomatis mampu pulih dari kerusakan dan kembali ke keseimbangan. Pandangan yang bersifat *don't wory be happy* ini cenderung diwujudkan oleh kebijakan yang eksplotitatif tanpa memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan dan umpan balik dari alam. Masyarakat seyogyanya memiliki perspektif filosofosi *hierarchist* yang berpandangan bahwa alam mampu menghadapi perubahan, tetapi jika tekanan berlebihan akan kolaps. Melalui pemahaman akan perspektif ini sumber daya alam dapat dijaga dari tekanan berlebih, sehingga tidak mengalami fase kolaps.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang kegiatan tersebut hingga tidak terkendali dalam rangka membuat kebijakan penanggulangan penggalian pasir. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

(1) Mengkaji faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahaan) dalam aktivitas penggalian pasir pantai di Nasai, Merauke;

(2) Mengkaji faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam aktivitas penggalian pasir pantai di Nasai, Merauke, dan;

(3) Merumuskan strategi kebijakan penanggulangan penggalian pasir pantai di Nasai, Merauke.

METODOLOGI

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2016 dengan lokasi penelitian di sepanjang Pantai Nasai meliputi 3 Kampung yaitu Urumb, Wendu dan Matara, Distrik Semangga Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber. Data primer diperoleh melalui wawancara yang mendalam dengan aktor-aktor yang berperan dalam kegiatan penggalian pasir. Aktor-aktor ini yang kemudian menjadi responden dalam wawancara yang mendalam. Informasi yang diperoleh dari data primer adalah identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta data ekonomi penggalian pasir (volume pengambilan, harga pasir, biaya operasional dan biaya-biaya lainnya). Jumlah responden adalah pemilik dusun (25 orang) sebagai penjual, pekerja pengangkut pasir (5 orang) dan supir truk (3 orang), agen pasir (3 agen). Teknik pengambilan data dilakukan menggunakan *snowball sampling* (Nurdiani, 2014; Etikan *et al*., 2016).

Teknik analisis data untuk perumusan strategi kebijakan penanggulangan pasir dilakukan menggunakan analisis *SWOT* (Djuwendah *et al.,* 2013; Sopandi, 2017; Rahayu, 2016; Setyorini, 2016). Menurut Wanti *et al*. (2014) analisis *SWOT* adalah suatu alat perencanaan yang penting untuk membantu perencanaan melalui upaya membandingkan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan dengan peluang dan ancaman dari eksternal. Setelah dilakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman; perumusan strategi kebijakan dilakukan dengan menggabungkan hasil identifikasi kekuatan dan peluang (Strategi SO), kelemahan dan peluang (strategi WO), kekuatan dan ancaman (Strategi ST) serta kelemahan dan ancaman (Strategi WT). Strategi yang dihasilkan dari matriks SWOT dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan QSPM (*Quantative Strategic Planning Matrix*) untuk memperoleh strategi terbaik berdasarkan tingkat daya tarik strateginya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Faktor Internal Penggalian Pasir Pantai

Dari hasil wawancara mendalam menggunakan kuesioner terhadap 25 orang sampel responden pemilik pada dusun yang melakukan aktivitas penjualan pasir, maka diperoleh motivasi dan persepsi masyarakat dalam melakukan aktivitas penggalian pasir. Motivasi dan persepsi tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kelemahan/*Weakness*dan kekuatan/*Strengths*. Faktor eksternal terdiri dari *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman). Peluang merupakan kondisi peluang yang mungkin muncul di masa depan yang berasal dari luar konteks, misalnya kebijakan pemerintah, kompetitor dan kondisi lingkungan sekitar. Ancaman merupakan kondisi yang mengancam organisasi yang berasal dari luar lingkungan yang dapat mengganggu jalannya organisasi. Identifikasi analisis kekuatan dan kelemahan dituangkan dalam sebuah *matrix Internal Factor Analysis Summary* (*IFAS*) yang memungkinkan analisis dapat mengevaluasi dan identifikasi hubungan yang terjadi diantara area tersebut. Untuk analisis peluang dan ancaman dimasukkan dalam *matrixs External Factor Analysis Summary* (*EFAS*), sehingga memungkinkan analisis mendapatkan informasi ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi dan kompetitif (David, 2004).

Hasil analisis faktor kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka untuk mengatasi dampak dari aktivitas penggalian pasir adalah:

(1) Masyarakat memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang dampak buruk aktivitas penggalian pasir yang terus menerus terjadi. Masyarakat mampu menyebutkan bahwa menggali pasir dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat sendiri karena intrusi air laut menyebabkan sumber air menjadi payau, jalanan rusak sehingga ongkos transportasi menjadi mahal, air pasang hingga naik mendekati perkampungan warga dan pantai menjadi rusak yang berakibat pada berkurangnya wisatawan yang datang, hal tersebut sejalan dengan pernyataan Anggraini*et et al*. (2013). Lebih lanjut, menurut Suherman *et al.* (2015), penambangan pasir di Kecamatan Sukaratu berdampak negatif pada kondisi lahan dan air. Sementara hasil penelitian Yudhistira (2011), melaporkan bahwa dampak fisik lingkungan akibat penambangan pasir yaitu adanya tebing-tebing bukit yang rawan longsor, kurangnya debit air permukaan/mataair, rusaknya jalan dan polusi udara.

(2) Masyarakat juga menyebutkan berbagai dampak positif dari aktivitas penggalian pasir, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari masyarakat, untuk modal membuka kios, dan untuk pendidikan anak-anak. Hasil penelitian Jirana *et al*. (2016) di Polewali Mandar,melaporkan bahwa penambanganpasir menjadi marak karena untung yang didapat lebih besar daripada penambangan pekerjaan lain. Selain untung yang berlipat ganda dari penghasilan yang diperoleh, juga kemudahan dalam mengerjakannya sehingga tidak terlalu melelahkan dan dapat hasil yang lebih besar dan lebih cepat.

(3) Ada beberapa warga masyarakat yang tidak lagi menjual pasir walaupun mereka melihat orang lain melakukan penjualan pasir. Mereka menyadari bahwa penggalian pasir akan merusak kampung mereka. Orang-orang ini biasanya duduk memegang jabatan di pemerintahan kampung.

(4) Adanya pandangan yang egaliter dari sebagian masyarakat di tiga kampung, yang menganggap bahwa alam ini sangat rentan dan akan mengalami kehancuran

(5) Sudah adanya hukum adat berupa “sasi” yang diterapkan oleh tokoh adat setempat untuk mencegah penggalian pasir besar-besaran.

(6) Pemerintah telah memiliki perangkat hukum untuk mengendalikan penggalian pasir melalui Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta adanya UU Pertambangan No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disebut sebagai UU Minerba. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa setiap usaha penambangan pasir harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai aturan UU pasal 1 butir 7 UU Minerba. IUP bisa diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan. Usaha pertambangan rakyat juga ditetapkan oleh pemerintah untuk wajib memperoleh ijin, yang disebut Ijin Pertambangan Rakyat (IPR). IPR adalah ijin usaha melakukan pertambangan yang dilakukan di kawasan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Faktor internal hasil penelitian Rissamasu *et al.* (2011), menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi masih banyaknya masyarakat yang menjual pasir adalah faktor ekonomi, pendidikan masyarakat yang masih rendah, tidak adanya peraturan daerah yang mengatur teknis pengelolaan penambangan pasir untuk mengendalikan dampak dan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah. Begitupula dengan faktor eksternal, yaitu belum ada peraturan pemerintah daerah yang mengatur mengenai kawasan khusus pertambangan karena belum adanya inventarisasi kawasan. Upaya pemerintah untuk inventarisasi usaha dan pemberian ijin masih menitikberatkan pada unsur penerimaan pajak dan retribusi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang tertuang dalam dokumen UKL (Upaya pengelolaan lingkungan) dan UPL (upaya pemantauan lingkungan).

Hasil analisis faktor kelemahan untuk mengatasi dampak penggalian pasir yaitu sebagai berikut:

(1) Kurang ditegakkannya peraturan yang dibuat oleh masyarakat adat. Peraturan adat “Sasi” dilanggar oleh kepala dusun pemilik pasir yang menjual pasirnya karena adanya kebutuhan mendesak. Tidak adanya sanksi adat yang diberikan kepada pelanggar sehingga menyebabkan pemilik dusun lain ikut-ikutan menjual pasir.

(2) Telah ada himbauan dari pemerintah kampung dan himbauan bupati untuk tidak lagi menjual pasir, namun himbauan itupun tidak diiringi dengan penegakannya, misalnya dengan memberikan sanksi moral kepada penjual pasir pantai.

(3) Kurang ditegakkannya peraturan oleh pemerintah mengenai perijinan usaha penambangan baik ijin usaha pertambangan maupun ijin pertambangan rakyat. Usaha pertambangan yang tidak memiliki ijin disebut PETI (Pertambangan Tanpa Ijin). PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki ijin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Adanya desakan ekonomi yang memicu masyarakat harus menjual pasir, desakan ekonomi tersebut antara lain untuk kebutuhan makan sehari-hari, pendidikan anak-anak dan modal usaha.

(5) Adanya pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa menjual pasir lebih mudah mendatangkan uang dibandingkan harus bekerja di sawah atau berkebun. Lebih menjanjikan dan pasti akan laku terjual, tidak seperti hasil perikanan atau bercocok tanam yang kemungkinan pada saat panen tidak laku terjual.

(6) Pandangan sebagian besar masyarakat terhadap alam bersifat individualist yang menganggap bahwa alam ini bisa pulih dengan sendirinya. Oleh karena adanya anggapan bahwa pasir itu akan dibawa oleh angin dan air dari laut ke darat, jadi tidak masalah jika diambil terus karena akan bertambah banyak lagi.

Identifikasi Faktor Eksternal Penggalian Pasir Pantai

Faktor eksternal berpengaruh terhadap motivasi dan perilaku masyarakat dalam aktivitas penggalian pasir pantai. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku penggalian menggunakan kuesioner diperoleh beberapa faktor eksternal yang dibedakan menjadi faktor peluang dan ancaman. Beberapa faktor yang teridentifikasi sebagai faktor peluang adalah sebagai berikut:

(1) Adanya lembaga yang berupaya untuk meminimalisir penggalian pasir yang merusak lingkungan seperti lembaga adat dengan peraturan adat tentang sasi pasir

(2) Lembaga gereja yang senantiasa menghimbau umatnya untuk memperhatikan lingkungan sekitar

(3) Lembaga pemerintah kampung dan kabupaten dengan adanya himbauan pelarangan penggalian pasir pantai

Faktor ancaman merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak luar. Hasil identifikasi faktor ancaman dari kegiatan penggalian pasir antara lain:

(1) Adanya kerusakan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat. Pantai menjadi tidak indah, air laut sudah menginstrusi sumber air tawar masyarakat, air pasang semakin tinggi, jalan rusak karena dilintasi kendaraan berat.

(2) Tumbuhnya pembangunan di kota Merauke baik infrastruktur maupun bangunan yang menyebabkan bahan baku pasir dibutuhkan dalam jumlah besar.

(3) Lokasi rawa yang banyak terdapat di Merauke membutuhkan banyak bahan galian timbun untuk bisa dimanfaatkana menjadi perumahan atau infrastruktur jalan.

(4) Tingginya permintaan pasir dari masyarakat kota Merauke dengan harga yang relatif stabil.

(5) Rendahnya penegakan hukum oleh pemerintah terhadap ijin usaha penggalian pasir, sehingga semakin banyak masyarakat yang membuka usaha penjualan pasir pantai. Hal ini dipicu juga oleh keuntungan yang besar dari usaha pejualan pasir.

Perumusan Strategi Penanggulangan Penggalian Pasir Pantai

Berbagai fenomena penggalian pasir dipandang dari sisi eksternal dan internal masyarakat, maka strategi yang penting untuk dapat menyelesaikan permasalahan penggalian pasir yaitu dengan menggabungkan keempat komponen kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman menjadi 4 strategi, yaitu strategi *SO* (*Strengths-Opportunities)* dengan menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang maka strategi yang diusulkan untuk menghentikan aktivitas penggalian pasir adalah:

(1) Memberdayakan kembali peran dan fungsi dewan adat untuk menegakkan kembali sanksi adat dan hukum “sasi” untuk melakukan moratorium penggalian pasir

(2) Membentuk kelompok peduli lingkungan pesisir yang terdiri dari lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan dan masyarakat kampung yang sudah tidak lagi menjual pasir dan gencar melakukan desiminasi kepada warga masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir untuk kehidupan mereka

(3) Menertibkan kembali ijin penggalian pasir berupa penegakan ijin usaha pertambahan dan ijin usaha pertambangan rakyat yang merupakan kewajiban dari masyarakat kepada negara.

Strategi kedua yaitu Strategi *WO* (*Weakness-Opportunities)* merupakan strategi yang menggunakan peluang untuk memperkuat kelemahan dalam hal penegakan hukum. Adapun strategi yang diusulkan antara lain:

(1) Pemanfaatan kelompok peduli lingkungan untuk meminimalisir penjualan pasir dengan memberdayakan ekonomi lokal masyarakat di bidang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, misalnya pemanfaatan sumber daya perikanan untuk diolah dan dikembangkan menjadi produk yang bernilai jual tinggi

(2) Memanfaatkan kelompok masyarakat yang peduli lingkungan untuk melakukan upaya

pencegahan abrasi melalui penanaman pohon di sekitar pantai

(3) Memanfaatkan dukungan pemerintah untuk menggalakkan program pariwisata pantai dan bahari sehingga mendatangkan nilai jual pariwisata yang dapat membantu perekonomian masyarakat setempat.

Strategi ketiga yaitu strategi *ST* (*Strengths-Threats)*, dengan memanfaatkan kekuatan yang ada dalam pengendalian penjualan pasir dengan meminimalisir ancaman. Strategi *ST* yang dapat dikembangkan antara lain:

(1) Membatasi *demand* atau permintaan pasir dengan memberikan kuota pembatasan penjualan pasir sehingga tidak melampaui daya dukung lingkungan.

(2) Dalam memenuhi kebutuhan pasir untuk infrastuktur atau pembangunan perumahan harus dibuka kran impor pasir yang jumlahnya sebanding dengan pengambilan pasir pantai sehingga beban pemenuhan pasir tidak bertumpu pada pasir lokal

(3) Menetapkan harga jual pasir untuk membatasi *demand* pemakaian pasir pantai lokal. Setidaknya harga jual pasir pantai hampir sama dengan harga pasir impor, sehingga konsumen diberikan berbagai pilihan dalam menggunakan pasir

(4) Penetapan harga jual pasir akan menguntungkan masyarakat penjual pasir, karena jumlah yang diterima sama besar namun pasir yang diekstraksi dapat dibatasi.

Strategi keempat, yaitu strategi *WT* (*Weakness-Threats),* merupakan strategi bertahan/"*status quo*", dengan kelemahan yang ada, bertahan dengan meminimalisir ancaman dari luar. Strategi yang diusulkan dengan strategi *WT* adalah sebagai berikut:

(1) Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat yang menjual pasir tentang dampak buruk dari penjualan pasir sampai terjadinya perubahan perilaku.

(2) Mengubah paradigma masyarakat terhadap alam seperti nenek moyang memperlakukan alam dari yang bersifat individualis dan juga egaliter ke mazhab yang bersifat *hierarchist* yang memperlakukan alam dalam keseimbangan. Mazhab ini menganjurkan untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi harus memperhatikan kemampuan, daya dukung dan umpan balik dari alam yang menimbulkan umpan balik negatif seperti degradasi dan deplesi.

(3) Melakukan mitigasi dan adaptasi menghadapi kerusakan lingkungan yang terjadi, misalnya dengan mencari alternatif sumber air tawar di tempat yang jauh dari pantai, tidak membangun rumah di sekitar pantai dan mencari alternatif mata pencaharian yang lebih tetap serta tidak mengandalkan penjualan pasir sebagai mata pencaharian utama.

Berdasarkan faktor eksternal dan internal tersebut, maka strategi perumusan penyelesaian masalah penggalian pasir dapat dilihat secara ringkas dalam Tabel 1 (Satu) Matriks SWOT.

Strategi yang telah diperoleh diatas kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan matriks QSPM. Dalam matriks QSPM, strategi terpilih diberikan *score* attractive berdasarkan tingkat urgenitas dan ketertarikan strategi, kemudian dikalikan dengan bobot yang diperoleh dari *expert judgment*. Hasil QSPM dapat dilihat pada Lampiran 1. Hasil perkalian bobot dan score attractive menghasilkan empat strategi dengan nilai tertinggi yaitu: (1) Koreksi harga pasir dengan internalisasi eksternalitas (bobot 13,04); (2) Memberdayakan kelompok peduli lingkungan dan dewan adat untuk mendorong pemerintah menegakkan ijin usaha pertambangan(bobot 13); (3) Mendorong perekonomian masyarakat lokal (13), dan; (4) Membatasi *demand* dengan pemberian kuota pengambilan pasir (bobot 11,8). Keempat strategi ini yang disarankan kepada pengambil kebijakan. Keempat strategi tersebut dapat disarankan untuk pemerintah dalam upaya mengatasi penggalian pasir pantai di Nasai Merauke.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Motivasi masyarakat dalam menjual pasir adalah karena motif ekonomi, strategi yang diusulkan untuk penyelesaiannya adalah penetapan harga pasir lokal dengan menginternalisasi biaya eksternalitas, penegakan ijin usaha pertambangan dan membentuk kelompok peduli lingkungan pesisir untuk mengembangkan perekonomian masyarakat lokal.

Tabel 1 Matriks SWOT.
Table 1. Matrik SWOT.

	Strength	***Weakness***
	• Masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang dampak buruk penggalian pasir/ *Community have enough knowledge about the impact of beach sand mining* • Ada masyarakat yagn tidak lagi menjual pasir dan menyadari dampak buruk penggalian pasir/ *There are community who no longer sand mining and aware negative impact of beach sand mining* • Adanya pandangan egaliter yang menyatakan bahwa alam ini rentan terhadap kerusakan lingkungan/ *an egaliter paradigm state that nature are vulnerable to enviromental damage* • Sudah ada adat sasi/*there are "sasi" culture* • Ada peraturan pemerintah tentang usaha penggalian pasir/*There government law about sand mining activity*	• Kurang ditegakkannya peraturan dan himbauan dari adat maupun pemerintah/ *Low enforcement regulation from government and customs* • Adanya desakan ekonomi seperti pendidikan anak-anak dan kebutuhan pangan/*Economic pressure for education and food needs* • Adanya anggapan bahwa menjual pasir lebih mudah dibandingkan bercocok tanam /*Sell the beach sand more easy than working in farming* • Adanya pandangan individualist yang menyatakan alam akan pulih dengan sendirinya/*The individualist paradigm that nature will recover by itself* • Tidak ada posisi tawar masyarakat terhadap harga pasir/ *There is no bargaining position from community*
Opportunity • Ada lembaga adat yang mendukung pelarangan penggalian pasir/*There are customary institution that support the banning sand mining* • Ada lembaga gereja yang membantu mendesiminasikan pentingya menjaga lingkungan/ *There are religion institution (churches) help to desimination on save the enviromental* • Ada lembaga pemerintah kampung yang menghimbau pelarangan penggalian pasir/ *There is local government institution in village which appeal the sand mining activity*	***S/O*** ▯ Memberdayakan peran dan fungsi dewan adat untuk membuat sasi dan menegakkannya/ *To empowerement of customary institution to build "Sasi" culture and enforce it* ▯ Membentuk kelompok peduli lingkungan pesisir yang mendesiminasikan pentingnya menjaga sumberdaya alam pesisir/ *To build the coastal care group and desiminate keep the coastal area* ▯ Penegakan ijin usaha pertambangan dan ijin usaha pertambangan rakyat oleh pemerintah daerah/*Enforcement of mining business and traditional mining business permit by the regional government*	***W/O*** ▪ Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan hidup/*Empowerement local coomunity to support the economic needs* ▪ Pemanfaatan kelompok peduli untuk melakukan rehabilitasi pantai dan mencegah abrasi pantai melalui program penanaman pohon mangrove/*Utilization of coastal care groups to rehabilitate and prevent the coastal from abrasion through planting mangroves* ▪ Memanfaatkan dukungan pemerintah untuk menggalakkan kegiatan pariwisata pantai dan bahari dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat lokal/ *Utilization government support to promote tourism activities to improve the economy of local community*
Threat • Kerusakan lingkungan yang mengancam tempat tinggal dan mata pencaharian utama masyarakat/ *Enviromental damage that threatens community residence and livelihood* • Adanya demand yang tinggi terhadap pasir pantai/ *Increasing demand of beach sand* • Pertumbuhan infrastruktur dan perumahan di Merauke/ *Growth infrastructure and housing in Merauke* • Harga pasir yang relatif stabil/ *Sand price are relatively stable*	***S/T*** ▪ Membatasi permintaan pasir dengan pembatasan kuota pengambilan pasir/ *Limit the demand of beach sand with quota system* ▪ Dibukanya kran impor pasir yang jumlahnya sebanding dengan pengambilan pasir pantai/*Open the imported sand which is accordance with the amount of beach sand* ▪ Menetapkan harga jual pasir pantai kurang lebih sama dengan harga pasir impor sehingga konsumen diberikan berbagai pilihan dalam menggunakan pasir/*set the price beach sand same with imported sand and give the choice for customer to choose* ▪ Penetapan harga jual pasir pantai lebih tinggi dari harga pasir saat ini untuk lebih meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga menekan laju ekstraksi pasir lokal/*Set the price of beach sand higher than price today to increase the economic of local community*	***W/T*** ▯ Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat yang terus menjual pasir sampai terjadi perubahan perilaku/ *Keep doing the socialization for peope who keep sell the beach sand until they change their behaviour* ▯ Mengubah paradigma egaliter dan individualist ke paradigma hirarki yang memberlakukan alam sebagai sebuah keseimbangan/*Change the community paradigm from egaliter and individualist to hirarki paradigm which enforce nature as a balance* ▯ Melakukan mitigasi dan adaptasi bencana banjir rob seperti tidak membangun rumah dekat pantai dan mencari sumber alternatif air tawar baru/*conduct mitigation and adaptation for rob flood with no build the house near beach and find the new water source*

Dari hasil penelitian diatas, maka disarankan bagi pemegang kebijakan untuk menganalisis kembali harga pasir yang ditetapkan oleh masyarakat/agen pasir dengan mengkoreksi melalui biaya eksternalitas. Memberdayakan kelompok peduli lingkungan dan dewan adat untuk mendorong pemerintah menegakkan ijin usaha pertambangan, mendorong perekonomian masyarakat lokal dan membatasi *demand* dengan pemberian kuota pengambilan pasir. Melakukan desiminasi kepada masyarakat secara berkelanjutan dengan paradigma hirarki dan pendekatan ekonomi.

Implikasi Kebijakan

Pemerintah patut mempertimbangkan eksternalitas dari aktivitas penggalian pasir pantai, karena akan berdampak tidak hanya terhadap kehidupan masyarakat pesisir, namun juga seluruh masyarakat di Kabupaten Merauke. Tanpa mengesampingkan kebutuhan material untuk pembangunan daerah, maka salah satu alternatif yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengintervensi harga pasir pantai Merauke, sehingga bisa menekan aktivitas penggalian pasir, mensejahterakan masyarakat pesisir dan tanpa mengesampingkan kebutuhan pasir sebagai bahan baku pembangunan infrastruktur di Kabupate Merauke. Menginternalisasi biaya eksternalitas merupakan cara yang paling efektif agar setiap pihak yang berkepentingan dapat terakomodir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada masyarakat di Kampung Urumb, Wendu dan Matara yang telah bersedia diwawancarai dan terbuka terhadap semua informasi yang dibutuhkan. Kepada pemerintah kampung melalui kepala kampung yang mengijinkan proses pengambilan data di lapangan. Kepada mahasiswa agribisnis angkatan 2014 yang telah membantu pengumpulan data di lapangan dan kepada Kementerian Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi yang telah mendukung penelitian ini dengan pendanaan melalui skema penelitian dosen pemula Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, N., Darsihardjo, dan Y. Malik. 2013. Pengaruh Penambangan Pasir Terhadap Kualitas Lingkungan di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. Antologi Pendidikan Geografi, Volume 3, Nomor 1, April 2013.

Arisandi, M. 2014. Eksternalitas Penambangan Pasir Pantai Secara Tradisional Terhadap Ekosistem Mangrove dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Merauke. Jurnal Manajemen Perikanan dan Kelautan Vol. 1 No. 1, 2014, artikel 10.

Badan Pusat Statistik. 2012. Merauke Dalam Angka. Merauke: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke.

Badan Pusat Statistik. 2014. Merauke Dalam Angka. Merauke: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke.

David, F.R. 2004. Manajemen Strategis Ed. Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Indeks (Kelompok Gramedia).

Djuwendah, E., H. Hapsari, E. Renaldy dan Z. Saidah. 2013. Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal di Kabupaten Garut. Sosiohumaniora, Volume 15 no. 2 Juli 2013: 211 – 221.

Elwizan, F.S dan M. Damayanti. 2017. Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Kawasan Rawan Bencana untuk Kegiatan Pariwisata. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Volume 5 Nomor 2, Agustus 2017, 71-82 http://dx.doi.org/10.14710/jwl.5.2.71-82

Etikan, I., R. Alkassim, dan S. Abubakar. 2016. Comparision of Snowball Sampling and Sequential Sampling Technique. Biom Biostat Int J 3(1): 00055. DOI: 10.15406/bbij.2016.03.00055.

Fisher, R.C. 1996. State and Local Public Finance. New York: Irwin.

Fauzi, A. 2014. Valuasi Ekonomi dan Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Bogor: IPB Press.

Hyman, D.N. 1999. Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy, sixth edition, New York: The Drisden Press.

Iriani, D. 2013. Analisis Nilai Ekonomi Manfaat Dan Dampak Negatif Penambangan Pasir Illegal Di Sungai Brantas Kelurahan Semampir Kota Kediri. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB: Bogor.

Jirana, M.H. Irawati, F. Rochman, dan I. Syamsuri. 2016. Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Galian Golongan C di Polewali Mandar (Studi Kasus Sungai Mandar di Polewali Mandar). Prosiding Seminar Nasional Biologi 2016_ISBN: 978-602-0951-11-9. 531 – 539.

Mukhlis, I. 2009. Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam

Perspektif Teoritis. Jurnal Ekonomi Bisnis, Tahun 14, Nomor 3,November 2009 : 191 - 199.

Mulyaningrum. 2005. Eksternalitas Ekonomi dalam Pembangunan Wisata Alam Berkelanjutan Studi Kasus pada Kawasan Wisata Alam Baturaden– Purwokerto, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Penelitian UNIB, Vol. XI, No 1, Maret 2005, Hlm. 9-20.

Nurdiani, N. 2014. Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. ComTech Vol. 5 No. 2 Desember 2014: 1110-1118.

Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta adanya.

Rahayu, D.T. 2016. Penerapan Analisis SWOT Dalam Perumusan Strategi Bersaing Pada Eddy Jaya Photo. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 2, Februari 2016.

Rissamasu, F., R. Darma, A. Tuwo. 2011. Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke. e-journal Pascasarjana Universitas Hassanudin hal.47 – 60. Unhas: Makasar.

Rukmana, D. 2012. Ekonomi Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Makasar: Arus Timur.

Setyorini, H., M. Effendi dan I. Santoso. 2016. Analisis Strategi Pemasaran Menggunakan Matriks SWOT dan QSPM (Studi Kasus: Restoran WS Soekarno Hatta Malang) Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri, 5(1): 46-53 (2016).

Soeprobowati, T.R. 2011. Ekologi Bentang Lahan. BIOMA, Desember 2011, Vol. 13, No. 2, Hal. 46-53.

Sopandi, E. 2017. Strategy of Business Development Bamboo Craft (A Study in Pasirjambu Village Pasirjambu District Bandung Regency). Jurnal AdBispreneur Vol. 2, No. 1, April 2017 Hal. 1-17.

Suherman, D.W., D.T. Suryaningtyas dan S. Mulatsih, 2015. Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Lahan dan Air di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan, Vol. 5 No. 2 (Desember 2015): 99-105.

Undang-Undang Pertambangan No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disebut sebagai UU Minerba.

Yudhistira, W., K. Hidayat dan A. Hadiyarto, 2011. Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi. Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 9, Issue 2: 76-84.

Wanti, S., Taufiqurrahman, dan D.D. Rahayu. 2014. Analisis Strategi Keunggulan bersaing dengan pendekatan Analisis *SWOT* pada Spartan Gym Pekanbaru. JOM Vekon 1(2).

Lampiran 1. Tabel QSPM
Apenndix 1. Table QSPM

Faktor-Faktor Utama/*Main Factors*		*Memberdayakan Peran dan Fungsi Dewan Adat/ Empowering the role and function of Customary Coucil*		*Membentuk Kelompok Peduli Pesisir/ Creating Coastal Care Group*		*Penegakan Ijin Usaha/ Enforcement of Busines License*		*Pemberdayaan Ekonomi masyarakat/ Economic Community Empowerment*		*Menggalakkan Pariwisata Bahari/ Promote Marine Tourism*		*Pembatasan Kuota pasir/ Sand Quota Restriction*		*Dibukanya kran impor pasir/Opening of Sand Import*		*Penetapan harga pasir lokal lebih tinggi/ Determination of higher price of local sand*		*Sosialisasi hingga terjadi perubahan perilaku/ Socialization until behavior change occur*		*Melakukan mitigasi dan adaptasi/ Mitigation and Adaptation*	
Peluang Eksternal/*External Opportunity*	**Bobot**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**
Ada lembaga adat yang mendukung pelarangan penggalian pasir/*Traditional institutions that prohibit sand mining*	0,21	10	2,1	9	1,89	8	1,7	5	1,05	4	0,84	6	1,3	3	0,63	7	1,47	2	0,42	1	0,21
Ada lembaga Gereja yang membantu mendiseminasikan pentingnya menjaga lingkungan pemberian Tuhan/ *The church that diseminate the importance to keep the environment from God*	0,07	6	0,42	7	0,49	2	0,1	9	0,63	5	0,35	3	0,2	1	0,07	4	0,28	10	0,7	8	0,56
Ada lembaga pemerintah kampung yang menghimbau pelarangan penggalian pasir/ *The village government institutions that encourage the sand mining prohibition*	0,11	3	0,33	2	0,22	10	1,1	6	0,66	5	0,55	8	0,9	1	0,11	9	0,99	7	0,77	4	0,44
Ancaman Eksternal *(External Threats)*	**Bobot**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**
Kerusakan lingkungan yang mengancam tempat tinggal warga dan mata pencaharian utama masyarakat/ *Environmental damages that threat the residents and main sources of livelihood*	0,18	3	0,54	4	0,72	5	0,9	1	0,18	2	0,36	9	1,6	7	1,26	8	1,44	6	1,08	10	1,8
Adanya demand yang tinggi terhadap pasir pantai/*High demand of coastal sand*	0,25	4	1	5	1,25	7	1,8	1	0,25	3	0,75	8	2	10	2,5	9	2,25	6	1,5	2	0,5
Pertumbuhan infrastruktur dan perumahan di Merauke yang membutuhkan bahan baku pasir/*The growth of infrastructure and housing in Merauke that need sand material*	0,04	4	0,16	5	0,2	7	0,3	1	0,04	3	0,12	8	0,3	10	0,4	9	0,36	6	0,24	2	0,08
Harga pasir yang relatif stabil/ *Stable price of sand*	0,14	4	0,56	5	0,7	9	1,3	3	0,42	2	0,28	8	1,1	7	0,98	10	1,4	6	0,84	1	0,14

Lanjutan Lampiran 1/*Continue Appendix 1*

Faktor-Faktor Utama/*Main Factors*		*Memberdayakan Peran dan Fungsi Dewan Adat/ Empowering the role and function of Customary Coucil*		*Membentuk Kelompok Peduli Pesisir/ Creating Coastal Care Group*		*Penegakan Ijin Usaha/ Enforcement of Busines License*		*Pemberdayaan Ekonomi masyarakat/ Economic Community Empowerment*		*Menggalakkan Pariwisata Bahari/ Promote Marine Tourism*		*Pembatasan Kuota pasir/ Sand Quota Restriction*		*Dibukanya kran impor pasir/Opening of Sand Import*		*Penetapan harga pasir lokal lebih tinggi/ Determination of higher price of local sand*		*Sosialisasi hingga terjadi perubahan perilaku/ Socialization until behavior change occur*		*Melakukan mitigasi dan adaptasi/ Mitigation and Adaptation*	
Peluang Eksternal/*External Opportunity*	**Bobot**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**
Jumlah Bobot Kekuatan Eksternal/*Value of External Strength* :	**1**																				
Kekuatan Internal/Internal Strength	**Bobot**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**
Masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang dampak buruk penggalian pasir/*Community comprehend the bad impact of sand mining*	0,15	2	0,3	10	1,5	9	1,4	8	1,2	7	1,05	6	0,9	1	0,15	5	0,75	4	0,6	3	0,45
Ada masyarakat yang tidak lagi menjual pasir dan menyadari dampak buruk penggalian pasir/*Some people discontinue to sell sand and realize the bad impact of sand mining*	0,05	2	0,1	10	0,5	9	0,5	8	0,4	7	0,35	6	0,3	1	0,05	5	0,25	4	0,2	3	0,15
Adanya pandangan egaliter yang menyatakan bahwa alam ini rentan terhadap kerusakan lingkungan/ *There are egalitarian view suggesting that nature is vulnerable to damage*	0,04	9	0,36	8	0,32	7	0,3	1	0,04	2	0,08	10	0,4	6	0,24	5	0,2	4	0,16	3	0,12
Sudah ada adat sasi/*There has been sasi tradition*	0,07	10	0,7	9	0,63		-	8	0,56	7	0,49		0	6	0,42		0	5	0,35	4	0,28
Ada peraturan pemerintah tentang usaha penggalian pasir/*There are regulations concerning sand mining*	0,18	9	1,62	8	1,44	10	1,8	1	0,18	2	0,36	7	1,3	6	1,08	5	0,9	4	0,72	3	0,54

Faktor-Faktor Utama/*Main Factors*		*Memberdayakan Peran dan Fungsi Dewan Adat/ Empowering the role and function of Customary Coucil*		*Membentuk Kelompok Peduli Pesisir/ Creating Coastal Care Group*		*Penegakan Ijin Usaha/ Enforcement of Busines License*		*Pemberdayaan Ekonomi masyarakat/ Economic Community Empowerment*		*Menggalakkan Pariwisata Bahari/ Promote Marine Tourism*		*Pembatasan Kuota pasir/ Sand Quota Restriction*		*Dibukanya kran impor pasir/Opening of Sand Import*		*Penetapan harga pasir lokal lebih tinggi/ Determination of higher price of local sand*		*Sosialisasi hingga terjadi perubahan perilaku/ Socialization until behavior change occur*		*Melakukan mitigasi dan adaptasi/ Mitigation and Adaptation*	
Peluang Eksternal/*External Opportunity*	**Bobot**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**
Kelemahan Internal/*Internal Weakness*	**Bobot**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**
Kurang ditegakkannya peraturan dan himbauan dari adat maupun pemerintah/ *Less enforcement of rules and advise from custom as well as government*	0,11		0		0		0	7	0,77	6	0,66		0	8	0,88		0	9	0,99	10	1,1
Adanya desakan ekonomi seperti biaya pendidikan anak dan kebutuhan pangan/ *Economic pressure like educational cost and food*	0,16	5	0,8	4	0,64	6	1	9	1,44	8	1,28	7	1,1	1	0,16	10	1,6	3	0,48	2	0,32
Adanya anggapan bahwa menjual pasir lebih mudah mendatangkan uang dibandingkan bercocok tanam/*Assumption that selling sand is easier to bring money than farming*	0,09	5	0,45	4	0,36	6	0,5	9	0,81	8	0,72	7	0,6	1	0,09	10	0,9	3	0,27	2	0,18
Adanya pandangan individualist yang menyatakan bahwa alam akan pulih dengan sendirinya/ *Individualist vier that nature will recover by itself*	0,02	9	0,18	8	0,16	4	0,1	3	0,06	2	0,04	5	0,1	7	0,14	6	0,12	10	0,2	1	0,02
Tidak ada posisi tawar masyarakat terhadap harga pasir/*Community has no bargaining position toward sand prices*	0,13	7	0,91	6	0,78	5	0,7	9	1,17	4	0,52	8	1	2	0,26	1	0,13	10	1,3	3	0,39
Jumlah Bobot Kekuatan Internal/*Value of Internal Strenght:*	**1**																				
Jumlah Keseluruhan/*Total Amount TAS :*			**10,5**		**11,8**		**13**		**9,86**		**8,8**		**13**		**9,42**		**13,04**		**10,82**		**7,28**

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU TERLUAR DI TINJUAU DARI ASPEK KEPENDUDUKAN

Policies on The Management of The Outer Islands According to Population Aspect

Fadjri Alihar

Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Indonesia
Jl. Jend. Gatot Subroto No.Kav 10 Kuningan Barat.
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710
Diterima tanggal: 22 Maret 2018 Diterima setelah perbaikan: 8 Mei 2018
Disetujui terbit: 6 Juni 2018
*email: fadjri_alihar@yahoo.com

ABSTRAK

Ada beberapa persoalan yang terkait dengan pulau-pulau terluar di Indonesia. Pertama, aspek keamanan yang berkaitan dengan aspek perlindungan dan pemeliharaan. Kedua, banyak di antara pulau-pulau tersebut yang tidak berpenghuni. Ketiga, aspek pemberdayaan masyarakat. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi berbagai data, baik hasil penelitian, naskah-naskah akademik dan berbagai data dari internet untuk memahami berbagai persoalan yang terjadi di pulau-pulau terluar Indonesia. Metoda analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia terlalu menyepelekan persoalan yang terjadi pulau-pulau terluar, padahal menyangkut harga diri dan martabat bangsa. Pemerintah dituntut untuk mendata kembali berbagai pulau-pulau terluar yang tersebar di daerah perbatasan dengan negara tetangga. Selain itu pemerintah juga dituntut mereklamasi beberapa pulau terluar karena terancam tenggelam dan ini berdampak terhadap garis perbatasan Indonesia. Untuk mengisi pulau-pulau terluar tersebut diperlukan sebuah program transmigrasi lokal yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan berbasis kelautan dan kepulauan.

Kata Kunci: penduduk pulau-pulau terluar; daerah perbatasan dan transmigrasi

ABSTRACT

There are several issues related to the outer islands in Indonesia. First, security aspects relating to aspects of conservation and management. Second, many of these islands are uninhabited. Third, the aspect of community empowerment. This paper tries to explore various data, both research results, academic texts and various data from the internet to understand the various problems that occur in Indonesia's outer islands. Qualitative descriptive analysis method was used in this study. The results of the study indicate that the Indonesian Government has undermined the problems that occur in the outer islands, even though it concerns the self-respect and dignity of the nation. The government is required to re-assessment various outermost islands scattered in the border area with neighboring countries. In addition, the government is also required to reclaim some of the outermost islands because they are threatened with sinking and this has an impact on the Indonesian border line. To fill the outer islands, a local transmigration program is needed which is equipped with marine and island-based knowledge and skills.

Keywords: inhabitant; island; nation or state-border; transmigration

*Korespodensi Penulis:
Peneliti Bidang Ekologi Manusia, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI
Jl. Jend. Gatot Subroto No.Kav 10 Kuningan Bar. Mampang Prpt., RT.6/RW.1, Kuningan Bar., Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau. Indonesia juga mempunyai posisi yang strategis karena terletak di antara dua benua yang besar yaitu Asia dan Australia, dan merupakan jalur perdagangan yang paling sibuk di dunia, terutama melalui Selat Malaka. Diperkirakan sebanyak 60 ribu kegiatan perdagangan diangkut setiap tahunnya melalui Selat Malaka (Kompas, 2012).

Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan yang terluas di dunia. Luas wilayah Indonesia secara keseluruhan mencapai 7,7 juta kilometer persegi dengan jumlah pulau sekitar 17.500 buah, baik pulau kecil maupun besar. Sebagian dari pulau-pulau tersebut terletak di bagian terluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau dikenal juga sebagai pulau-pulau terluar atau terdepan. Sementara itu, sekitar 76 persen wilayah Indonesia merupakan daerah pesisir dan laut (Zulkarnaen, 2011).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di dunia (Setiawan *et al.,* 2011). Dengan demikian Indonesia mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha di sektor perikanan dan kelautan. Meskipun demikian potensi kelautan dan perikanan Indonesia belum banyak dimanfaatkan dan bahkan secara ilegal dimanfaatkan oleh negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. Hal ini tampak dari banyaknya kasus pencurian ikan di perairan Indonesia yang dilakukan oleh nelayan dari kedua negara tersebut. Merajalelanya nelayan asing tersebut terutama disebabkan karena luas perairan Indonesia yang tidak terjaga.

Jumlah pulau-pulau terluar Indonesia sebanyak 92 buah pulau. Sebagian besar pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni dan hanya beberapa pulau saja yang dihuni dengan jumlah penduduk sangat sedikit yang jumlahnya hanya 31 buah pulau (Tribunnews.com, 2013). Berhubung letak pulau-pulau terluar Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain tentunya menjadi sangat rawan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan penguasaan oleh pihak-pihak asing, khususnya negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura dan Filipina (Republika, 2006). Bahkan wilayah perbatasan Indonesia cenderung dipermainkan oleh negara tetangga karena garis tapal batas yang tidak jelas. Kadang Indonesia tidak bisa berbuat banyak ketika menghadapi masalah perbatasan, khususnya yang berkaitan dengan pulau-pulau terluar karena banyak di antara pulau-pulau tersebut yang belum terdaftar dan belum ditentukan tapal batasnya oleh pemerintah (Kompas, 2012).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi berbagai persoalan dan ancaman, terutama yang datang dari luar. Ancaman tersebut dapat berupa aneksasi wilayah, penguasaan sumber daya alam maupun pencurian ikan. Negara-besar seperti Cina merupakan ancaman tersendiri bagi Indonesia karena berpotensi menguasai Laut Cina selatan yang kaya sumber daya alam, sepeti minyak bumi dan gas alam (Kompas 2013a). Untuk maksud tersebut Cina telah mencoba memperluas landasan kontinennya sampai ke kepulauan Natuna, kepulauan Riau. Kepulauan Natuna dikenal sebagai daerah yang kaya dengan minyak bumi dan gas alam dan sekarang sedang dieksplorasi oleh Pertamina (Ginting, 2013; Imron dan Sutopo, 2008).

Memperhatikan manuver yang dilakukan negara raksasa seperti Cina, Indonesia harus lebih serius mengurus wilayah perbatasannya, khususnya wilayah pulau-pulau terluar. Ada beberapa persoalan yang harus diperhatikan berkaitan dengan pulau-pulau terluar. *Pertama,* pulau-pulau terluar terletak sangat jauh dari kontrol pemerintah dan rawan diduduki negara asing. *Kedua*, banyak di antara pulau-pulau tersebut yang terancam hilang, terutama karena abrasi yang berpotensi mengurangi wilayah Indonesia, khususnya di daerah perbatasan. Sementara itu, banyak di antara pulau-pulau terluar yang tidak terdaftar dalam lembaran negara.

Ketiga, banyak di antara pulau-pulau terluar yang tidak berpenduduk, sehingga sangat rentan terhadap pendudukan atau penguasaan negara asing. Kadang beberapa pulau-pulau terluar tersebut hanya dihuni oleh satu orang yaitu penjaga mencusuar. *Keempat*, tidak adanya program yang dapat mengangkat kehidupan masyarakat yang berdomisili di pulau-pulau terluar. Sebagai akibatnya banyak diantara mereka berinteraksi dengan masyarakat negara tetangga.

Kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan jangan sampai terulang kembali hanya karena pemerintah selama ini belum serius dalam memperhatikan dan megurus kedua pulau tersebut. Hal ini mengingat sebelumnya pemerintah membuat kebijakan yang menempatkan pulau-

pulau terluar selalu menjadi bagian halaman belakang wilayah NKRI. Sebagai konsekuensinya pulau-pulau tersebut selalu tidak pernah disentuh apalagi mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, baik dari segi infrastruktur, sosial, ekonomi maupun politik.

Sebagai akibatnya kondisi sosial ekonomi daerah perbatasan Indonesia berbeda sekali dengan daerah perbatasan Malaysia. Salah satu pulau terluar Indonesia adalah pulau Sebatik, yang kondisinya sangat kontras jika dibandingkan dengan Tawau, Sabah, Malaysia. Tawau merupakan pusat perdagangan yang sangat maju di Sabah, sementara daerah pulau Sebatik seperti daerah tertinggal, padahal kaya sumberdaya alam. Namun dalam kenyataannya semua hasil bumi dari pulau Sebatik mengalir semuanya ke Tawau untuk diolah menjadi komoditi perdagangan.

Seharusnya pemerintah membuat kebijakan dan menempatkan pulau-pulau terluar Indonesia menjadi bagian "*halaman depan*" wilayah NKRI. Sudah sepantasnya pemerintah membangun pusat-pusat pertumbuhan yang mampu menciptakan berbagai kesempatan kerja di pulau-pulau terluar tersebut. Pemerintah dituntut secara serius untuk menangani pulau-pulau terluar agar tidak terjadi ketimpangan yang mencolok dengan daerah yang terletak di perbatasan negara tetangga.

Tulisan ini mencoba melihat sejauh mana pengelolaan pulau-pulau terluar dapat mengamankan wilayah Indonesia, khususnya di daerah perbatasan dari ancaman negara-negara tetangga. Ada tiga aspek yang dilihat dari pengelolaan pulau-pulau terluar tersebut. *Pertama*, aspek keamanan yang terdiri dari perlindungan dan pemeliharaan. *Kedua,* aspek kependudukan. Masalah ini sangat penting dikaji karena penduduk merupakan salah satu simbol kedaulatan NKRI. *Ketiga,* aspek perbedayaan masyarakat, terutama dari segi ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Artinya sejauh mana masyarakat yang berdomisili di pulau-pulau terluar dapat bertahan dengan mengandalkan sumberdaya laut.

METODOLOGI

Penulisan aritkel ini memanfaatkan data sekunder yang berkaitan erat dengan topik yang ditulis, baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, media cetak maupun elektronik (*internet*). Metoda analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini.

Selama sepuluh tahun terakhir, Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan berbagai kegiatan penelitian tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang selama ini berhubungan erat dengan kelestarian terumbu karang (*COREMAP*). Penelitian tersebut dilakukan hampir di seluruh provinsi di Indonesia yang melibatkan para peneliti dari berbagai disiplin ilmu.

Dalam kaitannya dengan wilayah pulau-pulau terluar ternyata banyak sekali studi empirik yang telah dilakukan, khususnya mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI telah melakukan penelitian tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau terluar selama 10 tahun terakhir (Imron, 2012; Indrawasih, 2012). Demikian pula para peneliti PPK-LIPI melalui penelitian kompetitif juga telah melakukan penelitian di daerah pulau-pulau terluar, seperti di pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia (Setiawan *et al.,* 2011).

Dalam rangka mengamankan pulau-pulau terluar secara khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki sebuah Direktorat Jenderal yang bernama Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertugas mendata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal dan berpenghidupan di pulau-pulau terluar. Ditjen tersebut saat ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola daerah perbatasan, khususnya pulau-pulau terluar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan dan Pemeliharaan

Berdasarkan data UNCLOS (*United Nation on Convention of the Law of the Sea*) menunjukkan jumlah pulau-pulau dalam wilayah Indonesia sekitar 17,500 buah pulau. Sementara Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (2017) menayatakan jumlah pulau-pulau tersebut sebanyak 17.504 buah pulau. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 16.056 buah pulau bernama yang telah dilaporkan ke PBB. Selanjutnya ada 92 buah pulau-pulau terluar dan menjadi titik batas wilayah Indonesia dengan negara lain, khususnya negara tetangga (Zulkarnaen, 2011). Pulau-pulau tersebut merupakan bagian terdepan sekaligus menjadi pagar wilayah Indonesia.

Sebagai negara kepulauan Indonesia harus

meningkatkan pengawasan terhadap pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain, untuk menghindari terjadinya sengketa wilayah perbatasan. Kasus sengketa perebutan pulau Senkaku antara Jepang dan Cina misalnya, harus menjadi pembelajaran karena peristiwa tersebut kemungkinan bisa saja terjadi di Indonesia mengingat banyaknya pulau-pulau, khususnya pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni dan berada diluar kontrol pemerintah[1].

Sementara itu, beberapa negara besar di Asia seperti Cina akhir-akhir ini meningkatkan klaim atas perairan di luat Cina selatan yang secara langsung berbatasan dengan pulau-pulau terluar Indonesia, seperti kepulauan Natuna. Klaim tersebut bukan tanpa alasan karena laut Cina Selatan merupakan daerah yang paling kaya dengan sumberdaya alam, seperti minyak bumi dan gas alam. Menurut Badan Survey Geologi AS, jumlah kandungan minyak bumi yang akan dan sudah ditemukan di laut Cina selatan mencapai 28 milyar barel. Bahkan Cina memperkirakan cadangan minyak di laut Cina selatan mencapai 213 milyar barel. Selain itu juga terdapat kandungan gas alam yang mencapai 225 milyar barel, dan kandungan tersebut hanya di kawasan Kepulauan Spratly saja (Kompas, 2012). Kemungkinan cadangan cadangan minyak bumi dan gas alam yang sangat besar itu juga terdapat di wilayah laut Cina Selatan lainnya.

Ancaman lain terhadap pulau-pulau terluar berkaitan dengan kondisi fisiknya, yaitu terdapat beberapa pulau yang akan tenggelam. Tiga buah pulau terluar Indonesia di pulau Batam semakin berkurang luasnya karena abrasi, yaitu Pulau Putri, Batu Berhenti dan Pulau Pelampong. Pemerintah diminta segera mereklamasi tiga pulau tersebut karena merupakan titik ukur perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Saat ini Malaysia dan Singapura sedang bersengketa di Mahkamah Internasional memperebutkan pulau Karang Selatan yang terletak di sisi utara pulau Bintan. Siapapun yang menang dalam sengketa tersebut akan berdampak terhadap perbatasan laut Indonesia (Kompas, 2013a).

Kondisi perbatasan laut Indonesia semakin diperparah lagi karena ada dua buah pulau terluar Indonesia di pulau Batam yang terancam hilang yaitu pulau Karang Helen Mars dan Karang Banteng. Keduanya berhadapan dengan Singapura yang daratannya semakin bertambah luas karena di reklamasi secara terus-menerus. Penambahan wilayah Singapura mengancam kedua pulau tersebut, dan ini merugikan Indonesia. Jika ada sengketa, Indonesia tidak bisa menjadikan kedua karang tersebut sebagai titik pengukuran perbatasan karena keduanya belum didata oleh pemerintah Indonesia (Kompas, 2013a).

Di Pulau Batam sudah ada empat pulau yang ditetapkan sebagai pulau terluar yaitu Pulau Nipa, Karang Batu Berhenti, Pelampong dan Pulau Putri. Keempat pulau tersebut terancam hilang jika tidak segera direklamasi. Saat ini Pulau Nipa dan Karang Batu Berhenti telah direklamasi, namun Pulau Pelampong dan Pulau Putri masih dalam tahap perencanaan untuk direklamasi. Dari empat pulau tersebut hanya pulau Nipa dan Pelampong yang berpenduduk, tapi hanya dihuni 3 keluarga. Sementara Pulau Nipa dijadikan pos pasukan marinir angkatan laut Indonesia.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya abrasi di pulau-pulau terluar berkaitan erat dengan adanya perluasan wilayah Singapura. Hal ini mengingat sebagian besar tanah yang digunakan untuk menimbun daratan Singapura tersebut diambil secara ilegal dari pulau-pulau di sekitar Pulau Batam (Romdiati dan Djohan, 2008). Kegiatan tersebut merupakan faktor penyebab rentannya pulau-pulau kecil terhadap abrasi, walaupun tidak menutup kemungkinan tenggelamnya pulau-pulau terluar berkaitan dengan perubahan iklim yang telah mengakibatkan naiknya permukaan air laut (Allison *et al.,* 2009). Saat ini ada empat pulau karang di Pulau Batam yang termasuk dalam wilayah teritorial Indonesia, namun pemerintah belum mendata keempat pulau atau karang tersebut sebagai pulau-pulau terluar.

[1]Kedua negara masing-masing mengklaim pulau tersebut menjadi bagian dari teritorial wilayahnya. Pulau tersebut terletak di laut China Timur dan merupakan pulau tidak berpenghuni, namun mempunyai letak yang strategis dari segi keamanan (Kompas, 2012). Banyak pihak mengkhawatirkan sengketa tersebut mernjurus menjadi perang terbuka antara China dan Jepang. Sengketa tersebut selain alasan strategis kemungkinan dilatarbelakangi adanya persaingan dalam memperebutkan sumber daya alam

Dalam peraturan presiden No. 78. Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil terluar telah dilakukan pendataan terhadap pulau-pulau terluar Indonesia, namun Karang Helen Mars, Karang Banteng, Tanjung Sading dan Tanjung Berakhir tidak termasuk di dalamnya. Padahal dari empat buah pulau kecil dan karang tersebut dapat ditarik lima titik dasar penetatapan garis perbatasan (Kompas, 2013a). Hal ini dapat menyulitkan Indonesia jika ada masalah perbatasan dengan negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura. Kedua negara tersebut sering membuat klaim sepihak tentang garis perbatasan, sementara Indonesia tidak berbuat apa-apa karena tidak mempunyai data dan landasan hukum.

Persoalan perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga, khususnya Malaysia seakan tidak pernah tuntas. Masalah perbatasan tersebut merupakan masalah yang sangat krusial bagi pemerintah Indonesia karena sebagian besar wilayahnya merupakan daerah maritim. Sementara itu beberapa negara tetangga berbatasan langsung dengan Indonesia, baik di darat maupun di laut. Perselisihan perbatasan sering menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik antar negara.

Malaysia merupakan negara tetangga yang paling sering melanggar perbatasan wilayah perbatasan Indonesia, baik di darat maupun di laut. Pemerintah Indonesia pernah melakukan protes kepada Malaysia karena patok tapal batas di bagian utara Kalimantan Barat bergeser ke dalam wilayah Indonesia. Namun setelah diperiksa dilapangan oleh beberapa anggota Komisi II DPR RI ternyata patoknya tidak bergeser (Kompas, 2012). Menarik sekali disimak informasi yang disampaikan beberapa warga di daerah perbatasan di Kalimantan Timur.

Jika terjadi pergeseran patok tapal batas dijelaskan bahwa yang menggeser patok tersebut adalah orang Indonesia sendiri. Biasanya pergeseran patok perbatasan, terutama berkaitan dengan eksploitasi hutan yang dilakukan oleh para cukong Indonesia bekerjasama dengan orang Malaysia. Pergeseran patok tersebut kadang mencapai satu kilometer ke dalam wilayah Indonesia. Setelah hutannya habis dibabat kemudian patoknya dikembalikan ke tempat semula. Dengan demikian hutan di daerah perbatasan Indonesia terlihat semakin gundul, sementara hutan di wilayah Malaysia masih lebat seakan tidak pernah disentuh.

Sementara wilayah perbatasan laut Indonesia merupakan daerah abu-abu karena tidak jelas garis batasnya. Oleh karenanya menjadi wilayah yang paling sering sekali dilanggar oleh tetangga. Bahkan Malaysia pernah menangkap nelayan dan kapal patroli beacukai Indonesia ketika masih berada dalam perairan NKRI. Demikian pula ketika terjadi krisis blok Ambalat terlihat beberapa kali kapal perang Malaysia melanggar wilayah perairan Indonesia. Kemungkinan pelanggaran tersebut sebagai akibat persepsi yang berbeda dalam menginterpretasi batas-batas perairan laut.

Merajalelanya Malaysia menggerogoti perbatasan laut Indonesia, pertama disebabkan tidak adanya garis batas yang jelas di wilayah perairan kedua Negara serta belum semua pulau-pulau di Indonesia mempunyai nama, khususnya bagian pulau-pulau terluar. Kedua, beberapa pulau terdepan Indonesia terancam hilang selain karena naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim, juga disebabkan karena abrasi dan eksploitasi pasir dan karang untuk keperluan bahan bangunan. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap bergesernya garis perbatasan, khususnya di wilayah perairan. Kadang Indonesia berada pada posisi yang lemah karena beberapa pulau-pulau terluar banyak yang tidak terdaftar. Bahkan menurut PBB ribuan pulau Indonesia belum terdaftar, sampai dengan Juli 2017 tercatat sebanyak 16.056 dari 17.054 pulau (Tempo, 2017). Sebagai akibatnya jika terjadi sengketa wilayah perbatasan selalu merugikan pihak Indonesia.

Lebih menarik lagi sengketa wilayah perbatasan ternyata juga terjadi antar wilayah di Indonesia. Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau pernah bersengketa dalam memperebutkan Pulau Berhala. Sebelumnya pulau tersebut dimiliki oleh Provinsi Jambi. Sengketa tersebut berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa Pulau Berhala menjadi milik Provinsi Kepulauan Riau. Keputusan MK tersebut telah membatalkan keputusan Mendagri No. 44 tahun 2011 (Kompas, 2012).

Sengketa memperebutkan Pulau Berhala antara Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau kemungkinan berkaitan dengan perebutan sumber daya alam. Semenjak Undang-Undang Pemerintahan Daerah digulirkan terlihat sengketa antar wilayah di Indonesia semakin meningkat, terutama dalam perebutan sumber daya alam, baik di darat maupun di laut. Hal ini disebabkan adanya

keharusan bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga dadang-kadang terjadi penghadangan kapal-kapal nelayan dari daerah lain yang memasuki daerah tertentu. Sengketa seperti ini sering kali menimbulkan konflik sosial yang melibatkan dua kelompok masyarakat dari dua daerah berbeda.

Penduduk dan Kondisi Sosial Ekonomi

Dari 92 pulau terluar diketahui sekitar 67 pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste dan Australia. Dari jumlah tersebut ternyata hanya 28 pulau yang telah dihuni dengan jumlah penduduk yang sangat jarang. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa ada 12 pulau terluar Indonesia yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah, yaitu Pulau Rondo, Mianggas, Nipa, Batek, Berhala, Bras, Dana, Fani, Fanildo, Marampit, Marore dan Pulau Sekatung.

Pemerintah telah membuat kebijakan memberikan tunjangan khusus dan menaikkan gaji para anggota TNI, Polisi, guru-guru serta pegawai negeri sipil lainnya selama bertugas di pulau-pulau terluar Indonesia. Meskipun demikian belum tentu semua aparatur pemerintah dan TNI bersedia bertugas di daerah terpencil. Kendala utama berdomisili di pulau-pulau terluar adalah tidak tersedianya air bersih serta sarana-prasarana lainnya. Para anggota marinir yang bertugas di pulau Nipa terpaksa mengambil air bersih ke pulau Belakang Padang, Batam dengan jarak tempuh selama satu jam dengan menggunakan kapal cepat (*speedboat*).

Berhubung semua pulau terluar Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan wilayah NKRI, sudah semestinya pulau-pulau tersebut harus dijaga jangan sampai dieksploitasi apalagi dikuasai oleh negara-negara lain. Menjaga kedaulatan bukanlah berarti harus mendatangkan angkatan bersenjata seperti pasukan TNI, namun yang lebih penting lagi bagaimana pemerintah menunjukkan bahwa pulau-pulau terluar tersebut merupakan bagian wilayah NKRI. Hanya dengan menyebut nama pulau saja, pihak negara tetangga atau negara lain sudah mengerti bahwa pulau-pulau tersebut milik NKRI. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam menjaga pulau-pulau terluar Indonesia adalah faktor penduduk atau lebih dikenal dengan "*demography security*".

Sebaran penduduk di pulau-pulau terluar Indonesia tampak memprihatinkan. Kebanyakan di antara pulau-pulau tersebut sama sekali tidak berpenghuni. Jumlah penghuni pulau-pulau berpenduduk kurang dari 1.000 orang, seperti Pulau Mianggas yang hanya dihuni sekitar 878 jiwa. Pulau Marore, Sangihe yang berbatasan dengan Filipina berpenduduk 640 jiwa. Bahkan penduduk Pulau Bras, Biak Numpor yang berbatasan dengan Republik Palau hanya dihuni oleh 50 orang saja. Namun ada pula pulau-pulau terluar yang hanya dihuni oleh beberapa orang, seperti petugas penjaga mercusuar.

Ada berbagai persoalan yang berkaitan dengan pulau-pulau terluar dan merupakan faktor penghambat perkembangan sosial ekonomi masyarakatnya. *Pertama,* kurangnya jaringan transportasi yang menyebabkan masyarakat setempat sulit mendapat kebutuhan bahan pokok secara rutin dengan harga yang bersaing. Lancarnya transportasi sangat membantu memasarkan produksi masyarakat setempat, terutama ikan dan hasil laut lainnya. *Kedua,* kurangnya insfrastruktur yang mendukung kegiatan masyarakat yang kebanyakan bekerja sebagai nelayan, seperti pabrik es. Persoalannya banyak di antara pulau-pulau tersebut yang tidak mempunyai pembangkit listrik. *Ketiga*, tidak tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Sebagai akibatnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) penduduk pulau-pulau terluar sangat rendah (Zulkarnaen, 2011; Bandiyono, 2006).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia di daerah perbatasan sungguh sangat menyedihkan. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Salah satu daerah perbatasan dan merupakan pulau terluar Indonesia adalah pulau Sebatik. Secara administratif pulau Sebatik merupakan bagian dari kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Secara geografis pulau Sebatik berhadapan langsung dengan pusat ekonomi Malaysia yaitu kota Tawau, Sabah yang bisa ditempuh dengan *speedboat* hanya dalam waktu 20 menit (Daliyo *et al.,* 2007).

Persoalan pulau Sebatik tidak hanya berkaitan dengan masalah politik, melainkan juga berkaitan erat dengan masalah sosial dan ekonomi. *Pertama,* perekonomian pulau Sebatik sangat tergantung dengan kota Tawau, Sabah. Semua barang-barang yang ada di pulau

Sebatik didatangkan dari Tawau. *Kedua*, di pulau Sebatik berlaku dua mata uang yaitu rupiah dan ringgit. Ketiga, banyak warga yang mempunyai dua buah kartu pengenal yaitu kartu tanda penduduk Indonesia dan *identity card* Malaysia (Setiawan *et al.,* 2011).

Interaksi antara masyarakat pulau Sebatik dan Tawau, Sabah telah lama terjadi tidak hanya melalui kegiatan perdagangan, melainkan juga melalui hubungan sosial budaya. Keberhasilan Malaysia dalam membangun ekonominya berdampak terhadap wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di wilayah pulau Sebatik. Hal ini terlihat dengan mengalirnya berbagai hasil bumi yang berasal dari pulau Sebatik. Demikian pula terjadi mobilitas penduduk yang tinggi dari pulau Sebatik menuju ke Tawau, Sabah. Masyarakat pulau Sebatik dari keturunan Bugis banyak yang bekerja dan mempunyai kedudukan penting di Tawau.

Fenomena tersebut menunjukkan telah terjadi ketimpangan pembangunan yang sangat mencolok antara perbatasan Indonesia dan Malaysia. Semua hasil bumi yang berasal dari pulau Sebatik baik secara legal maupun illegal mengalir ke Tawau, Sabah. Hal ini tentunya berdampak negatif terhadap perkembangan perekonomian daerah perbatasan Indonesia tidak hanya di pulau Sebatik, melainkan di pulau-pulau terluar lainnya yang berbatasan dengan negara lain. Sementara berbagai komoditi yang berasal dari Tawau membanjiri pasar di pulau Sebatik, seperti beras, gula, telur, susu dan gas (Setiawan *et al.,* 2011).

Salah satu komoditi yang paling berharga dijual masyarakat pulau Sebatik ke Tawau adalah kelapa sawit. Masyarakat terpaksa menjual kelapa sawit tersebut ke Tawau karena tidak tersedianya pabrik pengolahan kelapa sawit di pulau Sebatik. Dengan kondisi tersebut tentunya harga kelapa sawit tersebut ditentukan oleh pemerintah Malaysia dengan berbagai prasyarat yang ketat. Seharusnya pemerintah membangun pabrik kelapa sawit yang kecil mengingat perkebunan kelapa sawit yang ditanam masyarakat di pulau Sebatik telah mencapat lebih dari 10 ribu hektar.

Demikian pula kegiatan perdagangan di daerah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di kepulauan Sangihe Talaud juga tidak dapat dipisahkan dari pengaruh perekonomian Filipina Selatan. Masyarakat kepulauan Sangihe Talaud lebih banyak berhubungan dengan masyarakat Filipina Selatan daripada dengan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara sendiri. Hal ini terutama disebabkan adanya hubungan kekerabatan dan sosial budaya (Raharto, 2007).

Interaksi kedua kelompok masyarakat juga diikat dengan adanya kegiatan perdagangan. Masyarakat Sangihe Talaud biasanya menjual kopra ke Filipina Selatan karena nilai jualnya lebih tinggi dari harga jual daerah lainnya di Sulawesi. Setelah kopranya terjual masyarakat Sangihe Talaud kembali daerahnya dengan membawa berbagai bahan kebutuhan pokok.

Masyarakat di pulau-pulau terluar juga tidak dapat bersaing dengan penduduk dari negara tetangga dalam aktivitas sosial ekonomi. Masyarakat pulau Sebatik yang bermata pencaharian sebagai nelayan mobilitasnya sangat terbatas dan kalah bersaing dengan nelayan Malaysia. Nelayan lokal cenderung menggunakan peralatan tradisional dalam menangkap ikan, sementara nelayan Malaysia menggunakan peralatan modern, seperti kapal cepat dan menggunakan *trawl*. Fenomena yang sama juga dialami oleh nelayan lokal di kepulauan Natuna yang kalah bersaing dengan nelayan Thailand yang selalu menggunakan peralatan modern dalam menangkap ikan, yang belum tentu ramah lingkungan. Bahkan kapal-kapal dari Thailand yang menangkap ikan di kepulauan Natuna diduga mendapat perlindungan dari oknum aparat keamanan (Hidayati *et al.,* 2008). Hal ini terlihat banyaknya kapal asing secara illegal memasuki wilayah territorial Indonesia, terutama di wilayah pulau-pulau terluar.

Masyarakat di daerah perbatasan juga menggunakan dua mata uang. Masyarakat yang berdomisili di pulau Sebatik menggunakan mata uang Rupiah dan Ringgit dalam kegiatan perdagangan. Setiap kali berberlanja selalu ditanyakan apakah menggunakan mata uang rupiah atau ringgit. Demikian pula jika menyeberang ke Tawau diwajibkan membayar ongkos dengan menggunakan mata uang ringgit yang nilainya lebih tinggi dari rupiah, sehingga terasa sekali bagi masyarakat yang akan menyeberang ke Tawau. Jika masyarakat pulau Sebatik berbelanja ke Tawau mereka juga harus menggunakan mata uang ringgit.

Masyarakat Sangihe Talaud yang berdomisili di daerah perbatasan Filipina Selatan juga menggunakan dua mata uang yaitu Rupiah dan

Peso (Bandiyono, 2006). Fenomena tersebut secara tidak langsung menunjukkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Banyaknya penggunaan mata uang asing yang dilakukan masyarakat di wilayah perbatasan menunjukkan perekonomian masyarakat setempat sangat tergantung dan dipengaruhi oleh perekonomian negara tetangga.

Masyarakat yang berdomisili di pulau-pulau terluar juga banyak yang mempunyai dua kartu identitas kependudukan, baik identitas lokal maupun identitas negara tetangga. Masyarakat pulau Sebatik telah lama mempunyai dua buah kartu identitas yaitu kartu tanda penduduk Indonesia dan *identity card* Malaysia. Biasanya hubungan kedua masyarakat secara sosial budaya di daerah perbatasan telah berlangsung secara turun-temurun. Namun masyarakat dari daerah perbatasan Indonesia lebih banyak pergi ke wilayah perbatasan negara tetangga karena daya tariknya lebih kuat (Bandiyono *et al.,* 2008).

Masyarakat perbatasan Indonesia yang berdomisili di perbatasan negara tetangga, seperti Tawau, Malaysia dan Filipina Selatan sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Malaysia selalu menggunakan standar ganda dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan warga Indonesia, khususnya para TKI. Ketika menjelang pemilu biasanya para TKI diberi kemudahan untuk masuk ke Malaysia. Biasanya suara para warga negara Indonesia dan TKI dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu di Malaysia untuk kepentingan politik, terutama dalam rangka pemilu. Namun setelah pemilu pemerintah Malaysia kembali menerapkan berbagai prosedur yang ketat bagi para TKI, dan banyak TKI yang dikejar-kejar dan dideportasi.

Pengelolaan Pulau-pulau Terluar

Ada dua aspek yang dilihat dalam pengelolaan pulau-pulau terluar. Pertama, aspek pengelolaan itu sendiri dan kedua, aspek pemberdayaan masyarakat. Aspek pengelolaan dilihat dari pengembangan dan pembangunan fisik, baik mempertahankan eksistensi pulau-pulau terluar maupun pembangunan infrastrukturnya. Adapun dari segi pemberdayaan akan dilihat dari aspek pembangunan sosial ekonomi kemasyarakatan (FAO, 2013; Zaelany *et al.,* 2014).

Sebenarnya pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau terluar tidak hanya menjadi tanggung pemerintah pusat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada daerah untuk melaksanakan kewenangan atas dasar prakarsa potensi wilayah yang tersedia (Waluyo, 2014). Apalagi setelah keluarnya Undang-Undang No. 34, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan pemerintah daerah berkewajiban untuk mampu mengelola dan memanfaatkan serta mengawasi setiap ruang yang ada di daerahnya. Hanya saja pemerintah daerah biasanya mengelola kawasan-kawasan yang mempunyai potensi dan nilai ekonomi saja yang dikelola menjadi sumber PAD.

Sebenarnya lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan semata-mata tidak dapat disalahkan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah seakan lepas tangan, padahal berada dalam kekuasaan administrasi wilayahnya. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, pemerintah diberikan kewenangan dan tanggung jawab serta kewajiban dalam pengelolaan pulau-pulau terluar, baik secara fisik, ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Persoalannya adalah bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan pulau-pulau terluar sebagai pagar atau batas wilayah Indonesia (Chatarina, 2012).

Hambatan utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau terluar berkaitan dengan jarak dan logistik. Hampir semua pulau-pulau terluar sangat jauh jaraknya dengan ibukota provinsi maupun kabupaten, seperti Kabupaten Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau pulau Mianggas, Kabupaten Sangihe Talaud, Sulawesi Utara dan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Faktor jarak tersebut merupakan hambatan dalam membangun berbagai infrastruktur di pulau-pulau terluar karena mobilitas logistik menjadi sangat terbatas.

Walaupun pulau-pulau terluar menjadi tanggung jawab daerah kabupaten, namun karena berhadapan dengan negara lain maka selayaknya pemerintah pusat mengambil alih dalam pengelolaannya. Hal ini mengingat pulau-pulau terluar tersebut merupakan halaman depan wilayah Indonesia, sehingga perlu penanganan secara khusus agar pulau-pulau tersebut tidak jauh tertinggal pembangunannya dibandingkan dengan negara tetangganya.

Perlu disadari bahwa pemerintah hingga saat ini belum memiliki "*blue print*" tentang pembangunan daerah perbatasan, khususnya di wilayah pulau-

pulau terluar. Faktor inilah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan yang sangat mencolok antara wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Dengan adanya cetak biru diharapkan pembangunan wilayah perbatasan Indonesia dapat lebih terarah, terutama dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Sementara Malaysia selalu menjadikan daerah perbatasan menjadi bagian beranda depannya. Sebagai konsekuensinya terlihat pembangunan wilayah perbatasan Malaysia jauh lebih maju daripada pembangunan perbatasan Indonesia.

Jika diperhatikan kondisi GDP salah satu pulau terluar Indonesia yaitu kabupaten Nunukan terlihat sangat rendah dibandingkan dengan Tawau, Sabah. Pada tahun 1999 nilai GDP kota Tawau mencapai Rp. 14,7 triliyun, sementara kabupaten Nunukan hanya sebesar Rp. 238,5 milyar (Setiawan *et al.,* 2011; Widyastuti, 2012). Memperhatikan data tersebut kiranya pegembangan dan pembangunan di daerah perbatasan, khususnya di pulau Sebatik dan juga di pulau-pulau terluar lainnya mutlak menjadi perhatian dari pemerintah agar tidak timbul gejolak sosial politik yang merugikan Indonesia.

Memperhatikan ketimpangan tersebut, pemerintah harus segera mengambil alih pengelolaan pulau-pulau terluar. Jika tetap diserahkan ke daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 34, Tahun 2004, maka pembangunan pulau-pulau terluar tetap selalu menjadi daerah yang terbelakang, karena pemerintah daerah tidak akan mampu membangun wilayah perbatasan, khususnya pulau-pulau terluar yang bersentuhan langsung dengan negara tetangga yang sangat agresif dalam memperluas wilayahnya (Noveria *et al.,* 2006).

Salah satu pulau-pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Tawau, Sabah yaitu Pulau Sebatik, saat ini sedang dilanda euforia pemekaran. Semula wilayah Pulau Sebatik berbentuk desa, namun sejak tanggal 11 Juni 1996 daerah tersebut ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan berdasarkan PP. No. 38, Tahun 1996. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada tahun 2006, Kecamatan Sebatik dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebatik Barat. Saat ini pulau Sebatik telah dimekarkan lagi menjadi 5 kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 50 ribu jiwa.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat pulau Sebatik bekerja sebagai nelayan dan perdagangan. Di Pulau Sebatik juga terdapat perkebunan kelapa sawit dan coklat. Kedua komoditi tersebut merupakan produk andalan yang mengangkat perekonomian masyarakat pulau Sebatik. Selain itu Pulau Sebatik juga merupakan penghasil kelapa dan pisang. Persoalannya hingga saat ini semua hasil bumi dari pulau Sebatik tersebut dijual ke negara tetangga, yaitu ke Tawau.

Memperhatikan kondisi dan potensi pulau Sebatik yang cukup besar, sangat beralasan jika masyarakatnya menuntut pemekaran dan berpisah dengan kabupaten induknya yaitu kabupaten Nunukan. Apalagi saat ini wilayah pulau Sebatik telah dimekarkan menjadi 5 kecamatan dan telah memenuhi persyaratan minimal untuk dimekarkan menjadi daerah setingkat kabupaten atau daerah tingkat dua. Persoalannya apakah dengan adanya pemekaran tersebut pulau Sebatik dan juga daerah pulau-pulau terluar lainnya mampu bersaing dengan negara tetangga.

Telah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali daerah pemekaran yang gagal. Banyak daerah yang dimekarkan tidak bisa berkembang apalagi mensejahterakan masyarakat karena hidupnya hanya menggantungkan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hingga saat ini sedikit sekali daerah pemekaran yang mempunyai terobosan dalam mencari dan mengembangkan sumber-sumber dana pembangunannya sendiri. Banyaknya daerah pemekaran yang gagal, maka pemerintah kemudian mengancam akan menggabungkannya kembali dengan kabupaten induknya.

Berkaitan dengan adanya tuntutan pemekaran dari beberapa daerah pulau-pulau terluar, seperti Pulau Sebatik, maka pemerintah perlu lebih hati-hati karena dikhawatirkan tutuntan tersebut hanya merupakan kepentingan sekelompok elit masyarakat. Selain itu, tuntuntan tersebut disinyalir hanya sekedar bagi-bagi kue pembangunan. Jika itu yang dimaksud jangan berharap daerah pemekaran dapat bersaing dengan daerah tetangga, sementara untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat saja sulit dilakukan karena sebagian besar dana pembangunan menguap di tengah jalan.

Pada awal tahun 1980 pemerintah mengembangkan pulau Batam dengan maksud untuk dapat menyaingi Singapura. Pemerintah secara khusus membentuk sebuah badan otorita untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian Batam, namun ternyata hingga saat ini tidak mampu menyaingi Singapura. Untuk membangun sebuah daerah tidak hanya membutuhkan dana yang besar, tetapi yang lebih penting lagi dilandasi dengan sebuah komitmen yang bersih. Hal ini terbukti bahwa untuk mereklamasi pulau-pulau terluar yang terancam hilang ternyata pemerintah kota Batam tidak mampu apalagi lagi bersaing dengan Singapura yang dikenal sebagai raksasa ekonomi di Asia (Kompas, 2013b).

Memperhatikan kemampuan aparatur pemerintahan khususnya di daerah, kiranya belum saatnya wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia untuk dimekarkan mengingat banyak daerah pemekaran yang gagal. Dana yang besar yang diberikan untuk daerah pemekaran ternyata tidak semuanya dipergunakan untuk pembangunan, melainkan sebagian besar habis karena korupsi. Hal ini terlihat banyaknya kepala daerah pemekaran baru yang berurusan dengan KPK karena terlibat kasus korupsi (Republika, 2016). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak harus melalui pemekaran, namun yang lebih penting lagi adalah mencari cara untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas SDM-nya. Sudah sepantasnya pemerintah membangun pusat-pusat pertumbuhan berskala kecil yang mampu menciptakan berbagai kesempatan kerja di pulau-pulau terluar tersebut. Pemerintah tidak perlu membuat program yang muluk-muluk, tetapi cukup dengan membuat sentra-sentra produksi yang berbasis kelautan sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan yang mampu menciptakan lapangan kerja (Zulfikar, 2012). Pemerintah juga harus membantu pemasaran hasil laut yang telah diolah masyarakat dengan mendirikan koperasi yang dapat menampung hasil laut olahan masyarakat setempat (Sarana, 2015).

Untuk menjaga kedaulatan NKRI dibutuhkan sebuah kebijakan radikal di bidang kependudukan dalam rangka mengisi pulau-pulau terluar yang dianggap strategis dan rentan terhadap eksploitasi dan penguasaan oleh negara-negara tetangga (Redjo dan As'ari, 2017). Diperlukan sebuah strategi yang tepat untuk menempatkan penduduk dengan kualitas sumberdaya manusia (SDM) tertentu yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan. Untuk itu perlu dipikirkan semacam program relokasi atau transmigrasi lokal dari pulau-pulau terdekat untuk mengisi pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni dan rentan terhadap berbagai ancaman dari luar.

Pemerintah mutlak memberikan jaminan sosial (*social security*) kepada setiap warga negara Republik Indonsia yang berdomisili di pulau-pulau terluar, baik yang telah menetap secara permanen maupun bagi mereka yang akan dipindahkan melalui program relokasi maupun transmigrasi lokal. Sebelumnya pemerintah telah memberikan tunjangan khusus dan menaikkan gaji para anggota TNI yang bertugas di daerah terpencil, khususnya di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia. Sesungguhnya pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi para anggota masyarakat yang bersedia mengikuti program relokasi atau transmigrasi lokal untuk ditempatkan di pulau-pulau terluar Indonesia. Demikian juga kepada penduduk yang sebelumnya telah berdomisili secara turun-temurun di pulau-pulau terluar juga harus ditingkatkan kesejahteraannya.

Dalam rangka membangun daerah perbatasan, pemerintah berkomitmen meningkatkan kontribusi pembangunan transmigrasi dalam pembangunan wilayah pulau-pulau terluar. Pembangunan kawasan transmigrasi di pulau-pulau terluar berfungsi sebagai sabuk pengaman (*security belt*) nusantara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga tidak diincar dan diklaim oleh negara lain.

Kebijakan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang akan mengembangkan dan membangun 12 kota transmigrasi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia dan menempatkan transmigran di pulau-pulau terluar merupakan sebuah tindakan yang tepat untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Hal ini mengingat selama ini pulau-pulau terluar hanya diposisikan sebagai bagian "*halaman belakang*" wilayah NKRI karena dianggap tidak mempunyai potensi sumberdaya alam. Padahal pulau-pulau tersebut berikut masyarakatnya merupakan garda terdepan dalam menghadapi setiap ancaman yang datangnya dari luar. Berhubung kurang mendapat perhatian, maka banyak di antara mereka yang hidupnya tergantung pada berbagai fasilitas dari negara-negara tetangga.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi berbagai persoalan dan ancaman yang berkaitan dengan keutuhan wilayahnya, terutama bagian pulau-pulau terluar. Ada tiga persoalan utama yang dihadapi pulau-pulau terluar Indonesia. *Pertama,* sangat rentan terhadap penguasaan dari negara asing karena jauh dari kontrol pihak keamanan Indonesia. *Kedua,* pulau-pulau tersebut banyak yang tenggelam, terutama karena abrasi. Adanya perluasan negara tetangga menjadi ancaman tersendiri bagi pulau-pulau terluar karena lambat laun akan tenggelam karena abrasi. *Ketiga,* sebagian besar pulau-pulau terluar tidak dihuni oleh penduduk, sehingga tidak ada identitas Indonesia yang melekat pada pulau-pulau terluar tersebut. *Keempat,* kurangnya perhatian pemerintah dalam memberdayakan penduduk pulau-pulau terluar, sehingga banyak di antara mereka yang berinteraksi dengan negara tetangga.

Di antara keempat faktor tersebut faktor penduduk mempunyai peran yang sangat penting dalam mengamankan dan menjaga pulau-pulau terluar Indonesia dari gangguan dan ancaman negara tetangga. Dengan adanya penduduk yang secara khusus ditempatkan di pulau-pulau terluar, secara tidak langsung dapat menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia, sekaligus menunjukkan jatidiri bangsa bahwa NKRI merupakan bangsa yang mempunyai kedaulatan.

Pemerintah harus mempunyai *political will* dengan membuat berbagai program pembangunan berbasis kepulauan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar Indonesia. Selama itu tidak dilakukan tidak ada jaminan bahwa pulau-pulau terluar Indonesia bebas dari berbagai ancaman negara-negara lain. Efek domino lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan menjadi mimpi yang menakutkan karena bukan tidak mungkin pada suatu saat pulau-pulau terluar Indonesia satu per-satu akan berpindah tangan lagi.

Implikasi Kebijakan

Untuk mengantisipasi timbulnya berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan pulau-pulau terluar Indonesia, pemerintah dituntut untuk membuat kebijakan yang radikal, antara lain: (1) Merubah paradigma dalam pengelolaan pulau-pulau terluar dengan menempatkan pulau-pulau tersebut menjadi halaman depan wilayah Indonesia. Secara geo-politik pulau-pulau terluar tersebut seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena secara langsung bersentuhan dengan negara lain; (2) Melakukan perlindungan secara khusus terhadap pulau-pulau terluar yang terancam tenggelam. Jika pulau-pulau tersebut tenggelam akan berpengaruh terhadap garis perbatasan wilayah Indonesia; (3) Mengisi pulau-pulau terluar yang masih jarang atau tidak berpenghuni, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dengan adanya penduduk tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan di wilayah pulau-pulau terluar; (4) Meningkatkan program transmigrasi dalam rangka mengisi pulau-pulau terluar, terutama pulau-pulau yang masih kosong; (5) Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan berbagai teknologi tepat guna dalam meningkatkan kualitas produksi yang dihasilkan dari pulau-pulau terluar Indonesia, dan; (6) Perlu diberikan insentif bagi masyarakat yang bersedia tinggal di pulau-pulau terluar Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pengelola Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan kesempatan untuk menulis sebuah artikel yang berkaitan dengan masalah pengelolaan pulau-pulau terluar, terutama ditinjau dari aspek kependudukan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI yang telah memberikan kritik dan masukan demi sempurnanya artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Allison, E.H., Al. Perry, M.C. Badjeck, WN. Adger, K. Brown and D. Conway, 2009. Vulnerability of national economics to the impact of climate change on fisheries. Fish and Fisheries, Vol 10: 173-196.

Bandiyono, S. 2006. “Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Sangihe”. Dalam Tim Peneliti Profil Kependudukan di Wilayah Perbatasan: Kasus Empat Kabupaten. Pusat Penelitian Kependudukan. Jakarta.

Bandiyono, S, Aswatini R., Ade Latifa dan Mita Noveria.. 2008. “Mobilitas Penduduk di Wilayah

Perbatasan dan Kegiatan Illegal". Pusat Penelitian Kependudukan. Jakarta.

Chatarina, A.M. 2012. Model Kurikulum Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Ekonomi di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Jeneponto. Laporan penelitian, Kementerian Riset dan Teknologi.

Daliyo, S. Bandiyono dan Soewartoyo. 2007. "Profil Kependudukan di Wilayah Perbatasan dan Faktor Berpengaruh: Kasus Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur", dalam Profil Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kasus Empat Kabupaten. Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Jakarta.

Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. 2013. Training and Fisheris Development. http://www.fao.org/fishery/topic/13825/en. (diakses tanggal 16/04/2013)

Ginting, A.M. 2013. Kendala Pembangunan Provinsi Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau. Politicia, Vol 4: 50-75.

Hidayati, dan Widayatun 2008. Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, Kawasan Pulau Tiga Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna. Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Jakarta.

Imron, M. dan T. Sutopo. 2008. Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, Kawasan Pulau Tambelan Kecamatan Tambelan, Kabupaten Kepulauan Riau. Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Jakarta.

Imron, M. 2012. Problematika Permodalan pada Nelayan Tradisional; Kasus Sebatik, dalam Ratna Indrawasih dan Masyhuri Imron. Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2012 dan Pertemuan Ke IV INFISERN. Departemen Kelautan dan Perikanan, LIPI dan IMFISERN. Jakarta.

Indrawasih, R. 2012. Nelayan Pelintas Batas dari Kepulauan Raas-Madura. *In* Ratna Indrawasih dan Masyhuri Imron. Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2012 dan Pertemuan Ke IV INFISERN. Departemen Kelautan dan Perikanan, LIPI dan IMFISERN. Jakarta.

Iskandar, I. 2011. Ekspedisi 92 Pulau-pulau Kecil Terluar Nusantara: Data dan Informasi Awal Potensi Sumberdaya di 40 Pulau Kecil Terluar Indonesia di Wilayah Barat. Wanadri-Perhimpunan Rimba dan Pendaki Gunung. Bandung.

Kompas. 2012. Catatan Akhir Tahun 2012. Bersiasat di Perairan Kaya Rahmat. Kompas, 30 Desember 2012

Kompas. 2013a. Luas Pulau Terdepan Berkurang, Reklamasi Cegah Abrasi. Kompas, 22 Februari 2013.

Kompas. 2013b. Titik Perbatasan Terancam Hilang. Kompas, 2 Maret 2013.

Noveria, M., A. Raharto dan A. Latifa. 2006. Dinamika Mobilitas Penduduk di Wilayah Perbatasan. Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Jakarta.

Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. Indonesia Laporkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB. News.kkp.go.id/index.php/Indonesia laporkan 16.056 pulau bernama ke PBB (diakses tanggal 14 Juli 2018).

Raharto, A., S. Bandiyono dan M. Noveria. 2007. "Mobilitas Internasional Penduduk di Wilayah Perbatasan Indonesia" dalam Mita Noveria dkk. Dinamika Mobilitas Penduduk di Wilayah Perbatasan. Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Jakarta.

Redjo, S.I., H. As'ari. 2017. Pengelolaan Pemerintah dalam Pengaturan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia. Jurnal Agregasi, Vol 5(2): 174-201.

Republika. 2006. Pemerintah Akan Urus 92 Pulau Terluar. Republika, tanggal 20 April 2006.

Republika. 2016. Daerah Pemekaran Sering Jadi Ladang Korupsi. https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/07/26/oawmpe282-daerah-pemekaran-sering-jadi-ladang-korupsi (diakses 14 Juli 2018).

Romdiati, H. dan E. Djohan. 2008. Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Jakarta.

Sarana, J. (editor). 2015. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Antara Harapan dan Kenyataan. Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta.

Setiawan, B., A. Soekarni dan H. Basyar. 2011. Kompleksitas Pembangunan dan Strategi Pemberdayaan Keluarga perbatasan SEBATIK. Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Jakarta.

Tempo. 2017. PBB Verifikasi 16.056 Nama Pulau di Indonesia. https://nasional.tempo.co/read/901350/pbb-verifikasi-16-056-nama-pulau-di-indonesia. (diakses 8 Maret 2018).

Tribunnews.com. 2013. 87 Persem Pulau Di Indonesia Belum Berpenghuni. www.tribunnews.com/nasional/2013/05/15/87-persen pulau di Indonesia belum berpenghuni (diakses tanggal 14 Juli 2018}.

Waluyo, A. 2014. Permodelan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu yang Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Pulau Raas Kabupaten Sumenep Madura). Jurnal Kelautan, Vol 7(2): 75-85.

Widyastuti, S.R. 2012. Kabupaten Nunukan. http://64.203.71.11/KOMPAS-cetak/0306/12

Zaelany, A.A., Titik Handayani, Vanda Ningrum, Ngadi, Makmuri dan Soewartoyo. 2014. Kualitas Tenaga Kerja Perikanan. IPB Press. Bogor.

Zulfikar. 2012. Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Perairan Selatan Pelabuhanratu. Tesis. Fakultas MIPA, Program Pascasarjana, Departemen Biologi, Universitas Indonesia. Depok.

Zulkarnaen, I. 2011. “Infrastruktur Pemukiman Untuk Pulau-Pulau Kecil : Sumberdaya Air di Pulau-Pulau Kecil”. Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI. Bandung.

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PESISIR DI DESA BENTUNG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA

Coastal Tourism Development Strategy in The Bentung Village, Sangihe Islands Regency of North Sulawesi

***Aldy Adrianus Tatali, Ridwan Lasabuda,**
Jardie A. Andaki dan Bet E. S. Lagarense

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia
Jl. Kampus Unsrat Bahu, Kleak, Manado.

Diterima tanggal: 22 Maret 2018 Diterima setelah perbaikan: 8 Mei 2018
Disetujui terbit: 6 Juni 2018

*email: aldy07tatali@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan pariwisata pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe telah banyak diteliti namun penelitian yang menekankan pada pengembangan potensi pariwisata pesisir desa bentung belum dilakukan. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan kabupaten bahari yang memiliki Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan PERDA Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008, yaitu kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan Desa Bentung mempuyai atraksi wisata Mairokang Beach Game (MBG) yang diselenggarakan setiap tahun. Penelitian ini berfokus pada pengembangan atraksi wisata pesisir di Desa Bentung dengan bentuk diversifikasi produk-produk wisata yang masih banyak selain lomba MBG. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2016 hingga Maret 2017 mengunakan metode observasi, kualitatif dan kualitatif (campuran). Metoda analisis deskriptif dan SWOT digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian mmenunjukkan bahwa potensi sumber daya pesisir di Desa Bentung seperti terumbu karang, hutan mangrove yang memiliki luas 2,82 Ha, keadaan hutan Mangrove tergolong dalam kondisi tidak rusak. Potensi pariwisata pantai Desa Bentung memiliki tiga kawasan pantai yang memiliki pasir yang berbeda yaitu Pantai Bulo, Pantai Nagha, Pantai Mairokang Bentung. MBG melaksanakan kegiatan – kegiatan yang bernuansa budaya Sangihe dan menjadi daya tarik wisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, lomba ini merupakan lomba balap perahu. Hasil penelitian menyarankan perlunya fokus pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

Kata Kunci: strategi pengembangan pariwisata; pesisir; Desa Bentung; Mairokang Beach Game

ABSTRACT

Management of Sangihe coastal tourism has been extensively researched; however, research emphasizing on the development of coastal tourism potentials in Bentung Villages has yet been carried out. The regency of Kepulauan Sangihe which is a maritime regency has a Tourism Strategic Area in Sangihe Islands Local Regulation No. 15 Year 2008 which tell that a region that has a major function of tourism or has potential for tourism development that has an important influence in one or more aspects such as economic, social and cultural growth, natural resources empowerment, environmental carrying capacity, defense and security. Bentung Village a tourist attraction such as Mairokang Beach Game (MBG) that held annually. This study focuses on the development of coastal tourism attractions in the village of Bentung with a diversified form of tourism products that are still many other than the MBG competition. This research was conducted between October 2016 until March 2017 using qualtitaive and quantitative observation method (mix method). A descriptive and SWOT analysis were used in this study. Results of the research showed that potential of coastal resources in Bentung Village such as coral reefs, mangrove forest has an area of 2.82 Ha and classified as undamaged. Bentung Beach tourism has three areas that have different sand such as Bulo Beach, Nagha Beach and Mairokang Beach. MBG carries out cultural activities of Sangihe and becomes a tourist attraction of Kepulauan Sangihe Regency, This attraction is a boat racing competition. The research suggests the need to be focused on the development of tourism's infrastructure and facilities.

Keywords: tourism development strategy; coastal; Bentung Village; Mairokang Beach Game

**Korespodensi Penulis:*
Program Pasca Sarjana Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Unsrat Bahu, Kleak, Manado

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan potensi pariwisata pesisir yang di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki potensi pariwisata pesisir yang besar, tapi belum dikelola dengan maksimal, maka dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe diperlukan kajian lebih spesifik tentang strategi perkembangan karakteristik dan potensi pariwisata pesisir khususnya di Desa Bentung Kecamatan Tabukan Selatan, mengingat sebagian besar objek wisata di kawasan ini belum dikembangkan. Kajian ini diharapkan selain untuk memperkenalkan dan mengembangkan objek wisata yang ada, juga untuk meningkatkan kunjungan wisatawan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe disektor pariwisata bahari. Salah satu desa di Kabupaten Kepualauan Sangihe mempunyai potensi dalam pariwisata pesisir yaitu Desa Bentung di Kecamatan Tabukan Selatan. Desa Bentung mempuyai atraksi wisata yang diselenggarakan setiap tahun yaitu lomba balap perahu yaitu *Mairokang Beach Game* (*MBG*) yang sudah dua kali dilaksanakan. Penelitian ini berfokus pada pengembangan atraksi wisata pesisir di Desa Bentung dengan bentuk diversifikasi produk-produk wisata yang masih banyak selain lomba MBG.

Pariwisata (*tourism*) atau kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha (UU 10/2009). Pengertian pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat lain yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Yoeti, 1996). Pariwisata atau *tourism* memiliki ruang lingkup dan kegiatan yang luas, setidaknya meliputi lima jenis kegiatan meliputi wisata bahari (*beach and sun tourism*), wisata pedesaan (*rural and agro tourism*), wisata alam (*natural tourism*), wisata budaya (*cultural tourism*), atau perjalanan bisnis (*business travel*). Posisi pariwisata pesisir (*ecotourism*) memang agak unik, berpijak pada tiga kaki sekaligus, yakni wisata pedesaan, wisata alam dan wisata budaya (Nugroho, 2006).

Menurut Dahuri *et al.* (2001) Kegiatan pariwisata memiliki banyak jenis baik pariwisata buatan dan pariwisata alam, dalam pariwisata alam ada beberapa bentuk kegiatan pariwisata, salah satu kegiatan pariwisata alam tersebut adalah kegiatan pariwisata pesisir, Kegiatan wisata pesisir adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan sekitar pantai seperti berenang, berselancar, berjemur, menyelam, snorkeling, berjalan-jalan atau berlari-lari di sepanjang pantai, menikmati keindahan suasana pesisir, dan bermeditasi.

Pokok masalah dalam penelitan ini ialah: Strategi pengembangan atraksi wisata di kawasan pesisir di Desa Bentung. Pokok masalah ini dapat disusun secara rinci dalam rumusan sebagai berikut:

(1) Bagaimana potensi pariwisata di Desa Bentung?
(2) Bagaimana atraksi wisata pesisir yang ada di Desa Bentung?
(3) Apa dan bagaimana strategi pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata pesisir di Desa Bentung?

Tujuan penelitian ini merupakan tindak lanjut dari masalah yang telah dirumuskan. Dengan kata lain tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

(1) Mengidentifikasikan potensi sumberdaya pesisir untuk pengembangan pariwisata pesisir di Desa Bentung.
(2) Mendeskripsikan atraksi wisata pesisir Mairokang Beach Game di perairan desa bentung Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
(3) Menyusun strategi pengembangan wisata pesisir di Desa Bentung sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran (*mixed-method*). Metode ini dipilih karena penelitian ini menggabungkan hasil dari dua metode penilaian yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Adapun input data yang digunakan dalam metode kualitatif antara lain kesesuaian kawasan pantai dan peran serta pemerintah. Data luasan terumbu karang dan kepadatan hutan Mangrove menjadi input data dalam metode kuantitafif (Creswell, 2010).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data didapat dari studi lapangan dan studi pustaka, pengamatan langsung dan wawancara. Adapun jumlah responden yang menjadi narasumber wawancara adalah 3 orang dengan rincian 2 orang dari Dinas Kebudayaan (Kepala Dinas dan Sekretaris) dan 1 orang dari BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Sangihe (Sekretaris).

1. Metode Pengamatan Terumbu Karang

Pengamatan terumbu karang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui kondisi terumbu karang beserta luas terumbu karang pada lokasi penelitian, yaitu dengan cara pengamatan *Snorkling* dan *Manta Tow*, yaitu pengamatan dengan mengunakan perahu dan papan manta yang berfungsi sebagai tempat pengikat tali dari perahu ke pengamat.

$$\%\ Coverage = \frac{\begin{matrix} Panjang\ Penutupan \\ Jenis\ Spesies - i \\ (Species - i\ coverage \\ area\ length) \end{matrix}}{\begin{matrix} Total\ Panjang \\ Jalur\ (Total\ of\ Path \\ Length) \end{matrix}} x100\% \quad (1)$$

2. Metode Analisis Hutan Mangrove

Pengamatan kondisi hutan Mangrove di desa bentung mengunakan peneltian Transek dalam penelitian ini digunakan dua pengamatan dan dalam setiap pengamatan mengunakan dua kuadran dapat dilihat pada Tabel 1.

3. Metode Analisis Kesesuaian Kawasan Pantai

Analisis kesesuaian yang dilakukan dalam penelitian ini hanya difokuskan untuk peruntukan kawasan ekowisata bahari (jenis kegiatan selam, *snorkeling* dan wisata pantai). Pemberian bobot berdasarkan tingkat kepentingan suatu parameter, sedangkan pemberian skor berdasarkan kualitas setiap parameter.

4. Metode Analisis SWOT

Strategi pengembangan mengunakan metode analisis SWOT dengan melihat kekuatan, kelemahan dan ancaman yang ada dalam pengembangan pariwisata pesisir di Desa Bentung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Sumberdaya Pesisir

Sumber daya pesisir dapat dibedakan dari sumberdaya perairan pesisir dan daratan pesisir. Sumber daya perairan pesisir meliputi semua yang ada di wilayah perairan, misalnya sumber daya ikan, terumbu karang, *Mangrove*, atau kandungan mineral di dasar perairan. Sedangkan sumber daya daratan pesisir meliputi semua yang ada di wilayah daratan yang masih termasuk kawasan pesisir, seperti hutan, perkebunan, atau bahkan perairan tawar (Bengen, 2001).

2. Terumbu Karang

Terumbu karang merupakan salah satu daya tarik di kawasan pesisir bagi para pencinta *snorkeling* dan *diving*. Kawasan terumbu karang desa Bentung terbagi menjadi dua stasiun yang pertama berada di pingiran pantai Desa Bentung yang kedua dikawasan karang timbul atau Terumbu Karang Maritekang. Pengambilan penelitian dalam luasan terumbu karang di kedua stasiun itu mengunakan metode penelitian *Manta Tow*, data luasan terumbu karang ini dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Peningkatan pariwisata diharapkan akan jadi semakin membaik dengan kegiatan pemanfaatan pariwisata pesisir misalnya lomba *Mairokang Beach Game* di Desa Bentung. Pada lokasi di stasiun I diperlukan rehabilitasi terumbu karang di wilayah ini, karena perusakan di wilayah ini sudah besar selain rehabilitasi diperlukan konservasi kawasan terumbu karang di wilayah ini.

Tabel 1. Parameter Hutan Mangrove.
Table 1. Mangrove Forest Parameter.

Parameter	Kriteria Kerusakan/ *Damage citeria*	Nilai/*Value*
Jumlah Pohon/	Berat/*Heavy*	*N < 1000* pohon *(tress)/ ha*
Number of trees (N)	Sedang/*Intermediate*	*N = 1500-1000* pohon *(tress)/ ha*
	Tidak rusak/ *Not damage*	*N> 1500/ ha*

Tabel 2. Tutupan Karang Pada Station I.
Table 2. Coral Coverage in Station I.

No	Jenis Karang Hidup/ *Type of Coral Life*	Tutupan Karang// *Coral Cover (%)*	Jenis Karang Mati/*Type of Coral Dead*	Tutupan Karang/ *Coral Cover (%)*
1	*Coral Submassive*	6.31	*Dead Coral Algea*	15.32
2	*Acropora Branching*	9.57	*Dead Coral*	37.13
3	*Acropora Tabulate*	8.22		
4	*Zoanthids*	2.11		
5	*Ascidians*	1.32		
6	*Coral Millepora*	2.31		
7	*Aeopora Digitate*	2.45		
8	*Coralas Massive*	5.24		
9	*Coral Mushoorm*	5.78		
	Jumlah/*Total*	**43.31**		**52.45**

Tabel 3. Tutupan Karang Pada Station II.
Table 3. Coral Coverage in Station II.

No	Jenis Karang Hidup/ *Type of Coral Life*	Tutupan Karang// *Coral Cover (%)*	Jenis Karang Mati/*Type of Coral Dead*	Tutupan Karang/ *Coral Cover (%)*
1	*Coral Submassive*	10.53	*Dead Coral Algea*	13.32
2	*Acropora Branching*	12.88	*Dead Coral*	18.27
3	*Acropora Tabulate*	11.04		
4	*Zoanthids*	4.31		
5	*Ascidians*	1.15		
6	*Coral Millepora*	2.45		
7	*Aeopora Digitate*	4.08		
8	*Coralas Massive*	5.35		
9	*Coral Mushoorm*	8.27		
	Jumlah/*Total*	**60.06**		**31.59**

Hasil penelitian di atas mengunakan metode penelitian observasi lapangan dengan Kondisi tutupan karang pada stasiun II yang merupakan karang timbul (*maritekang*), rata-rata tutupan karang 60,06% dengan kondisi tutupan karang baik, dan kondisi kerusakan terumbu karang yaitu 31,59%. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan kondisi tutupan karang pada stasion I.

Kondisi terumbu karang yang baik pada stasion II menjadi tempat yang baik untuk kegitana pariwisata pesisir seperti snorkeling dan diving, tapi masih perlu peningkatan sarana prasarana dalam mengembangkan kawasan ini menjadi objek pariwisata.

3. Hutan Mangrove

Hutan *Mangrove* atau yang sering disebut warga sebagai *bentung pahepa* ini memiliki potensi dalam pengembangan pariwisata, luas hutan *Mangrove* Desa Bentung sebesar 2,82 Ha Desa Bentung memiliki beberapa jenis tumbuhan *Mangrove* (*Aegiceras corniculatum, Sonneratia alba, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata*).

Hasil penelitian kawasan hutan Mangrove dengan mengunakan metode transek didapatkan hasil penelitian pada dua pengamatan, bahwa kondisi hutan Mangorve di Desa Bentung tergolong pada kondisi tidak rusak.

4. Pantai

Wisata pesisir tidak jauh dari wisata pantai dimana para wisatawan melakukan aktivitas mandi dan berjemur serta main pasir dan melakukan kegiatan olahraga di daerah pantai. Lokasi-lokasi pantai mencakup: (1) Pantai Bulo memiliki pasir putih dengan kondisi pantai indah dan panjang; (2) Pantai Nagha pasir dua warna yang menurut warga awalnya hitam tapi sekarang sudah bercampur dengan pasir putih, ini karena karang mati yang terjadi hingga munculnya pasir-pasir putih di pantai

tersebut, dan; (3) Pantai Mairokang atau pantai Desa Bentung yang merupakan lokasi kegiatan lomba mairokang dan satu-satunya pantai yang dihuni masyarakat.

5. Atraksi Wisata Mairokang Beach Game

Sesuai dengan implementasi visi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Kabupaten Bahari yang sejahtera dan bermartabat serta meningkatkan potensi bahari di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya di Kecamatan Tabukan Selatan, maka "*Mairokang Beach Game*" (MBG) Kampung Bentung melaksanakan kegiatan–kegiatan yang bernuansa budaya Sangihe. Kegiatan Lomba MBG baru berlangsung yang kedua kalinya di tahun 2016, kegiatan lomba MBG pertama di mulai pada Tahun 2015 dan akan dilaksanakan di tiap tahunnya dan rencananya untuk tahun 2017 akan di selengarakan di Bulan September, dan kegiatan ini akan terus di selengarakan pada pantai Desa Bentung (*Mairokang*).

Kegiatan atraksi wisata *Mairokang Beach Game* baru saja dimasukkan dalam kalender wisata di Kabupaten Sangihe. Kegiatan ini memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan lomba yang sudah masuk dalam kalender pariwisata nasional seperti lomba *Manggurebe Arumbae* yang hanya terdiri dari dua kegiatan lomba balap perahu (Kertopati, 2016) :

(1) Lomba perahu tradisional atau *Manggurebe Arumbae* adalah lomba balapan mendayung perahu hingga batas terakhir. Satu perahu terdiri dari 28-31 peserta lelaki, dan;

(2) Lomba perahu semang (bercadik), yakni lomba balapan perahu di laut yang didayung oleh perempuan yang memakai pakaian tradisional Maluku.

Kegiatan *Mairokang Beach Game* berkembang dari tahun ke tahun. Terjadi pertumbuhan peserta di tahun 2015 jumlah peserta 52 peserta dan jumlah peserta bertambah hingga 79 peserta pada tahun 2016.

6. trategi Pengembangan Wisata Pesisir Desa Bentung

Pengembangan pariwisata diperlukan perencanaannya tidak hanya mementingkan wisatawan, tetapi harus melibatkan semua pihak yaitu para *stakeholder*, pemerintah, dan kalangan masyarakat umum (lokal). Sehingga diperlukannya kesepahaman mengenai seluk beluk kepariwisataan, dampak positif dan negatifnya dan juga timbal balik antara sektor pariwisata dengan sektor lainnya.

Menurut Nawawi (2005:147) secara etimologis (asal kata) penggunaan kata strategi dalam manajemen sebuah organisasi diartikan sebagai kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang secara sistematik dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan organisasi. Berbicara tentang strategi tidak dapat dipisahkan dari pengertian manajemen strategik. Menurut Siagian (2011:15) manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Menurut David (2009:5) manajemen strategik dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap, yaitu: (a) perumusan strategi; (b) penerapan strategi, dan; (c) penilaian strategi. Menurut Soebagyo, 2012 pengembangan pariwisata yang menunjang pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

(1) Perlu ditetapkan beberapa peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu pelayanan pariwisata dan kelestarian lingkungan wisata, bukan berpihak pada kepentingan pihak-pihak tertentu. Selain itu perlu diambil tindakan yang tegas bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan;

(2) Pengelola pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat. Hal ini penting karena pengalaman pada beberapa Daerah Tujuan Wisata (DTW), sama sekali tidak melibatkan masyarakat setempat, akibatnya tidak ada sumbangsih ekonomi yang di peroleh masyarakat sekitar. Contoh kasus: pengelolaan DTW di Pantai Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, NTT. Pada DTW tersebut masyarakat tidak berkesempatan untuk terlibat, baik untuk menjual hasil-hasil pertanian, kerajinan maupun menjadi karyawan di tempat itu;

(3) Kegiatan promosi yang dilakukan harus beragam, selain dengan mencanangkan cara kampanye dan program *Visit Indonesian Year* seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, kegiatan promosi juga perlu dilakukan dengan membentuk sistem informasi yang handal dan membangun kerjasama yang baik dengan pusat-pusat informasi pariwisata pada negara-negara lain, terutama negara-negara yang potensial;

(4) Perlu menentukan DTW- DTW utama yang memiliki keunikan dibanding dengan DTW lain, terutama yang bersifat tradisional dan alami. Kebetulan saat ini obyek wisata yang alami dan tradisional menjadi sasaran utama para wisatawan asing. Obyek ini sangat banyak ditemukan di luar Jawa, misalnya di daerah-daerah pedalaman Kalimantan, Papua dan lain-lain;

(5) Pemerintah pusat membangun kerjasama dengan kalangan swasta dan pemerintah daerah setempat, dengan sistem yang jujur, terbuka dan adil. Kerja sama ini penting untuk lancarnya pengelolaan secara profesional dengan mutu pelayanan yang memadai. Selain itu kerjasama di antara penyelenggara juga perlu dibangun. Kerjasama di antara agen biro perjalanan, penyelenggara tempat wisata, pengusaha jasa akomodasi dan komponen-komponen terkait lainya merupakan hal yang sangatpenting bagi keamanan kelancaran dan kesuksesan pariwisata;

(6) Perlu dilakukan pemerataan arus wisatawan bagi semua DTW yang ada di Seluruh Indonesia. Dalam hal ini pemerintah juga harus memberikan perhatian yang sama kepada semua DTW, perhatian DTW yang sudah mandiri hendaknya dikurangi dan memberikan perhatian yang lebih terhadap DTW yang memerlukan perhatian lebih;

(7) Mengajak masyarakat sekitar DTW agar menyadari peran, fungsi dan manfaat pariwisata serta merangsang mereka untuk memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta bagi berbagai kegiatan yang dapat menguntungkan secara ekonomi. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memasarkan produk-produk lokal serta membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan dan pengadaan modal bagi usaha-usaha yang mendatangkan keuntungan;

(8) Sarana dan prasarana yang dibutuhkan perlu dipersiapkan secara baik untuk menunjang kelancaran pariwisata. Pengadaan dan perbaikan jalan, telepon, angkutan, pusat perbelanjaan wisata dan fasilitas lain di sekitar lokasi DTW sangat diperlukan.

Ketika melakukan perjalanan, pasti terdapat daerah yang dituju. Daerah inilah yang disebut Daerah Tujuan Wisata. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Destinasi pariwisata harus memenuhi tiga syarat (Yoeti, 1996), yaitu:

(1) Harus memiliki *something to see*, yaitu di tempat tersebut harus ada obyek dan atraksi wisata khusus, yang berbeda dengan apa yang dimiliki daerah lain untuk dilihat;

(2) Harus menyediakan *something to do*, yaitu di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk melakukan kegiatan reaksi yang dapat membuat betah wisatawan, dan;

(3) Harus menyediakan *something to buy*, yaitu di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk belanja, terutama oleh-oleh dan barang kerajinan khas yang dapat dibawa pulang ketempat asal oleh wisatawan.

Daya tarik wisata adalah segalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Berhasilnya suatu tempat berkembang menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) sangat tergantung pada tiga faktor utama (Samsuridjal & Kaelany, 1997).

(1) Atraksi:

a. Atraksi Tempat : umpamanya tempat dengan iklim yang baik, pemandangan yang indah atau tempat-tempat bersejarah

b. Atraksi Kejadian/ Pariwisata : Kongres, pameran atau peristiwa peristiwa olah raga, festival dan sebagainya.

(2) Mudah dicapai (Aksesibilitas) :

Tempat tersebut dekat jaraknya, atau tersedia transportasi ke tempat itu secara teratur, sering, mudah, nyaman, dan aman.

(3) Amenitas:

Tersedianya fasilitas-fasilitas seperti tempat penginapan, restoran, hiburan, transportasi, lokal yang memungkinkan wisatawan berpergian ke tempat itu serta alat-alat komunikasi lainnya.

Proses perencanaan menggambarkan lingkungan yang meliputi elemen-elemen: politik, fisik, sosial, budaya dan ekonomi, sebagai komponen yang saling berhubungan dan saling tergantung, yang memerlukan berbagai pertimbangan (Paturusi, 2001). Pengembangan potensi pariwisata di Desa Bentung memerlukan pengembangan dalam sektor wisata alam yang mencakup penambahan sarana dan prasarana pariwisata dalam rangka menarik minat wisatawan. Dukungan masyarakat, pemerintah daerah dan swasta di perlukan dalam pengelolaan dan pengembagan pariwisata di Desa Bentung. Perencanaan pengembangan wisata pesisir tersaji dalam bentuk kawasan wisata yang ditampilkan pada Gambar 1.

Pengembangan pariwisata Desa Bentung memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di Lokasi Penelitian, karena termasuk dalam desa pesisir sehingga dimanfaatkan potensi pariwisata yang ada di kawasan peisisr. Terdapat empat kawasan pesisir yang akan dimanfaatkan dalam pengembangan kawasan pariwisata Desa Bentung seperti di tandai dengan tanda Titik-titik berbeda warna yang tampak dalam Gambar 1:

(1) Pantai Bulo: pantai dengan tanda warna putih, pantai tersebut pada lokasi-lokasi tertentu memiliki gelombang yang cukup lumayan dapat setinggi 2-3 meter, sehingga lokasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai wisata selancar dan kegiatan wisata pantai lainnya.

(2) Pantai Nagha: lokasi yang ditandai dengan tanda warna merah, pantai tersebut keadaan perairannya lebih tenang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan jet ski dan banana boat, dan pemanfaatan kegiatan pesisir lainnya.

(3) Kawasan karang Timbul (*Maritekang*): lokasi yang ditandai dengan tanda warna kuning, kawasan ini memiliki potensi pariwisata dalam terumu karang sehingga kegiatan yang dapat dilakukan adalah snorkeling.

(4) Kawasan Hutan *Mangrove* Desa Bentung: lokasi yang ditandai dengan warna hijau, pemanfaatan kegiatan wisata di kawasan ini berbeda dengan kawasan wisata *Mangrove* yang lain kegiatan wisata hutan *Mangrove* di Desa Bentung dengan mengunakan kayak dalam menyusuri kawasan wisata hutan *Mangrove*.

Pengembangan kawasan wisata di Desa Bentung memerlukan dukungan dari semua pihak khususnya dukungan pemerintah daerah dalam persetujuan rencana dan bantuan dalam pengembangan kawasan wisata.

Gambar 8. Rencana Kawasan Wisata Pesisir Desa Bentung.
Figure 8. Bentung Coastal Tourism Area Plan.
Sumber: Google Earth dan ArcGIS 10.3/*Source: Google Earth and ArcGIS 10.3*

7. Dukungan Pemerintah

Konsep pariwisata pesisir berkelanjutan (*sustainable coastal tourism*) adalah pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan maupun daerah tujuan wisata pada masa kini, sekaligus melindungi dan mendorong kesempatan serupa dimasa yang akan datang. Pariwisata berkelanjutan mengarah pada pengelolaan seluruh sumberdaya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, estetika dapat terpenuhi sekaligus memelihara integritas kultural, proses ekologi esensial keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan (WTO, 1980).

Menurut UU No. 32 Tahun 2004. memberikan wewenang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kepada pemerintahan provinsi, kota dan kabupaten. Provinsi diberi wewenang mengelola sejauh 12 mil mil laut, sementara kota serta kabupaten diberi wewenang 1/3 dari wilayah provinsi. Daerah-daerah yang memiliki wilayah pesisir dapat menggali potensi sebagai salah satu sentra produksi baru dalam mendorong pembangunan.

Masyhudzulhak (2011) menyatakan bahwa perspektif otonomi daerah dapat menjadi guideline dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dengan tujuan (i) secara ekologis haruslah dapat menjamin kelestarian sumber daya pesisir, (ii) secara ekonomi dapat mendorong dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap mempertahankan stabilitas produktivitas sumberdaya pesisir, (iii) secara sosial budaya memberikan ruang bagi kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan dan pembangunan, (iv) secara kelembagaan dan hukum dapat menjadi payung dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan menjamin tegaknya hukum serta penguatan kelembagaan, (v) dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagai garda terdepan dalam mewaspadai potensi-potensi yang akan mengganggu kepertahanan dan kemanan baik di perairan maupun Zona Ekonomi Eksklusif, terutama dalam menjaga sumber daya pesisir dan kelautan.

Dukungan pemerintah dalam pengembangan pariwisata Sangihe sendiri sudah semakin membaik karena sudah langsung bekerja sama dengan kementrian pariwisata nasional telah di lakukan kegiatan pesona sangihe dalam memperkenalkan kabupaten sangihe di kanca nasional dan internasional.

> *Promosi pariwisata dilakukan dengan melaunching pariwisata Sangihe di kementrian pariwisata dengan melakukan kegiatan kalender even festival pesona Sangihe ini dilakukan agar pemerintah pusat mengintervensi kegitan kalender even dan kebijakan dalam pengembangan pariwsata di Kabupaten Kepulauan Sangihe*. (Wawancara, Sekretaris DIPARBUD Kab. Kep. Sangihe, 30-01-2017).

Desa Bentung sendiri memiliki banyak potensi yang belum di lirik dinas pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe seperti pantai, terumbu karang, *Mangrove* dan wista-wisata yang lain, dalam dinas pariwisata pada Kecamatan Tabukan Selatan untuk wisata pendukung ada Teluk Manalu yang terletak di Desa Hangke dan Binebas berupa wisata pantai yang berpotensi pengembangan wisata *water sport*.

Pengembangan pariwisata di Desa Bentung selain kegiatan MBG didukung oleh seluruh masyarakat karena menurut masyarakat Desa Bentung memiliki potensi pariwisata pesisir, diharapkan ada partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata untuk memajukan wisata di Desa Bentung. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pesisir perlu ditingkatkan, seperti perlindungan lingkungan pada hutan *Mangrove* dan kawasan terumbu karang, dari tahun ke tahun sudah semakin baik dan sadar masyarakat dengan dampak keuntungan dari hutan *Mangrove* dan terumbu karang. Partisipasi merupakan salah satu faktor penting yang mendukung berkembangnya wisata pesisir seperti yang ada di Kelurahan Muarareja, Kota Tegal dimana persentase partisipasi masyarakat mencapai 54% dan kelompok sadar wisata telah terbentuk (Muttaqin *et al.*, 2015). Berbagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan tidak akan efektif jika tidak didukung oleh masyarakat luas, khususnya penduduk setempat. Hal ini akan bermuara pada manfaat yang diperoleh penduduk setempat berupa pningkatan kesejahtraan hidup (Suwantoro, 2004)

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa desa Bentung berpotensi sangat baik pada pariwisata

pesisir ini dapat di lihat dari 4 kawasan pesisir yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata di Desa Bentung seperti; Kawasan Terumbu Karang yang memiliki luas 0,391 Km^2, Kawasan *Mangrove* dengan luas 2,82 Ha dengan memiliki 4 jenis *Mangrove* yang hidup di Kawasan Hutan *Mangrove* Desa Bentung, Kawasan Pantai Bulo, dan Kawasana Pantai Nagha. Lomba *Mairokang Beach Game* merupakan lomba balap perahu satu-satunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kegiatan ini mendapat dukungan langsung oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan dukungan masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk menunjukkan jati diri sebagai masayarakat bahari. Strategi pengembangan pariwisata pesisir di Desa Bentung dengan pembuatan peta rencana pengembangan wisata pesisir serta menggunakan analisis SWOT, dan empat pilar strategi pengembangan pariwisata Nasional, 1. Destinasi Pariwisata, 2. Industri Pariwisata, 3. Pemasaran Pariwisata, 4. Kelembagaan Pariwisata.

Implikasi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan jadi bahan pertimbangan dagi pemerintah daerah Kab. Kep. Sangihe dalam pengembangan pariwisata pesisir, diperlukan koordinasi dan keterlibatan setiap stekholder dalam pengembangan Pariwisata pesisir khusunya dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kawasan pariwisata pesisir seperti infrastruktur pariwisata berupa penginapan serta kesiapan bandara dari kota-kota besar dan dibuat ruang zonasi daerah perlindungan ruang pesisir dan laut pengunaan lahan, agar tidak jadi tumpang tindih pemanfaatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan Masyarakat Desa Bentung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Sangihe.

DAFTAR PUSTAKA

Bengen, D.G. 2001. Sinopsis Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir. Pusat Kelautan Institut Pertanian Bogor.

Creswell, J. W. 2010. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. PT Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Dahuri, R., Rais, Y., Putra, S.G., Sitepu, M.J. 2001. Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

David, F. 2009. Strategic Management: Manajemen Strategis Konsep. Salemba Empat. Jakarta.

Kertopati, L. 2016. Mengarunggi Tradisi Maluku dengan Manggurebe Arumbare. CNN Indonesia: https://m.cnnindonesia.com/hiburan/mengarungi-tradisi-maluku-dengan-manggurabe-arumbae/ (Diakses: 22 September 2017).

Labesi. 2017. Distant Voices, Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sangihe. 4 Menit.

Masyhudzulhak, D. 2011. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dalam Perspektif Otonomi Daerah (Tinjauan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Proceeding Book Simposium Nasional Ilmu Administrasi Negara Untuk Indonesia. 331-339

Muttaqin, M.F., Anggoro, S., Purwanti, F. 2015. Strategi Pengembangan Wisata Pesisir di Kelurahan Muarareja Kota Tegal. Management of Aquatic Resources Journal. Vol 4, No. 4, hlm 136-145.

Nawawi, H. 2005. Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan. Gadjah Mada Press. Yogyakarta.

Nugroho, I. 2006. Pengembangan Pariwisata pesisir dalam Pembangunan Daerah.

Paturusi, S.A. 2001. Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pariwisata, Materikuliah Perencanaan Kawasan Pariwisata Program Magister (S2) Kajian Pariwisata, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar.

Samsuridjal dan Kaelany. 1997. Peluang di bidang pariwisata. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.

Siagian, S. P. 2011. Manajemen Strategik. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Smith, S.L.J. 1989. Tourism Analysis, a Handbook. Longman Scientific & Technical.

Soebagyo. 2012. Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia. Jurnal Liquidity. Vol 1, No. 2, hlm 153-158.

Suwantoro, G. 2004. Dasar-Dasar Pariwisata. Andi. Yogyakarta. 67 hlm.

World Tourism Organization. 1980. The World Tourism Conference held in Manila (Philippines) adopts the Manila Declaration on World Tourism.

Yoeti, O.A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Angkasa. Bandung. hlm 178.

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat 4.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Bumi Aksara. Jakarta.

SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KEPULAUAN ARU

Profit Sharing System of Fishing Business in The Aru Islands

***Retno Widihastuti dan Lathifatul Rosyidah**
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

Diterima tanggal: 22 Maret 2018 Diterima setelah perbaikan: 8 Mei 2018
Disetujui terbit: 6 Juni 2018

*email: echamichelle@gmail.com

ABSTRAK

Sistem bagi hasil usaha perikanan merupakan sistem yang diberlakukan dari pemilik kapal/ perahu atau juragan kepada awak kapal. Sistem bagi hasil memiliki pengaruh penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup nelayan. Dari hasil pembagian usaha, ABK mendapatkan presentase yang paling rendah jika dibandingkan dengan awak lainnya. Sehingga pada musim paceklik, ABK seringkali menemui masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan ini menjadi masalah abadi yang menjadikan ABK di Kabupaten Kepulauan Aru terlilit oleh hutang dengan pihak peminjam informal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem bagi hasil pada usaha perikanan di Kepulauan Aru dan menyusun opsi rekomendasi sebagai strategi dalam mengatasi permasalahan ekonomi ABK sebagai nelayan kecil. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan Juli 2016. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis sistem bagi hasil pada usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Aru. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis pendapatan dari pemilik dan awal kapal/perahu. Hasil peneltian menunjukan bahwa pada sistem bagi hasil nelayan yang diberlakukan pada nelayan di Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan jenis alat tangkapnya, memiliki pendapatan diatas Upah Minimum Regional (UMR) per bulan. Meskipun demikian, nelayan ABK masih menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya ketika musim paceklik.Hal ini karena nelayan masih memiliki ketergantungan pada pemilik baik ketika akan melakukan kegiatan melaut, maupun ketika akan memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin tinggi. Dari analisa tersebut, maka disarankan perlunya kebijakan yang menjamin ketersediaan modal untuk nelayan kecil dan perlu adanya pendampingan usaha dari pemerintah. Hal ini penting agar nelayan kecil tidak tergantung kepada pemilik sehingga nelayan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya pada atau bukan saat musim paceklik.

Kata Kunci: sistem bagi hasil; anak buah kapal; Kepulauan Aru; upah minimum regional; modal, pendampingan

ABSTRACT

Profit sharing system in the fishery is a system applied by the ship / boat owner or skipper to the crew. The profit sharing system has an important role influencing in fishers's life needs. From the results of the division of fishing business earning, crews received the lowest percentage of earning compared to other crew position members. This, in turn, creates problems for lowest level crew to fulfill their household-life needs. Finally, these crews keep entangling with debts with informal borrowers. This study aimed at describing profit sharing system of fishing business in the Aru Islands and formulating recommendations as a strategy to overcome problem of lowest crew members as a small-fisher. Study was conducted in Aru Islands Regency in July 2016. Sampling was carried out using purposive sampling method. A qualitative analysis was used to analyze the profit sharing system in fishing business in the Aru Islands Regency. A quantitative data analysis was used to analyze the owner's income and the start of the ship / boat. Results of the study showed that the fishers profit sharing system was applied to fishers in the Aru Islands Regency based on the type of fishing gear generating an income above the Regional Minimum Wage (UMR) per month. Even so, lowest level crew fishers still have difficulties in fulfilling their living needs, especially when the season is famine. This was because fishers still have a dependency on the owner both when going to sea activities, and when they will meet the needs of higher families. From the analysis, this study suggest the need for policies to ensure availability capital for small fishers and assistantship of fishing business from the government. This is important in order to ensuring small fishers are not dependent on the owner so that small fisher can fulfill their household needs during high and low fishing seasons.

Keywords: profit sharing system; lowest crews member; Aru Islands, regional minimum wage, capital; assistanships.

**Korespodensi Penulis:*
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk menjalankan amanat tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan beberapa upaya, salah satunya adalah dengan membentuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Salah satu WPPNRI adalah WPP 718 dengan salah satu lokasi adalah Kabupaten Kepulauan Aru.

Kepulauan Aru merupakan salah satu pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara yang berada di wilayah Provinsi Maluku dengan dasar pembentukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2003. Kepulauan Aru memiliki 547 pulau dengan panjang garis pantai 3.987 km dan wilayah pesisir yang kaya dengan berbagai potensi sumber daya alam atau laut. Potensi sumber daya perikanan di Kepulauan Aru adalah pelagis kecil dan ikan demersal. Dari potensi tersebut, pada tahun 2015 produksi perikanan mencapai 133.989 ton (BPS Kepulauan Aru, 2015). Hal tersebut menjadi indikator bahwa Kepulauan Aru menjadi penyumbang produksi perikanan di Indonesia.

Potensi perikanan tangkap di Kepulauan Aru memberikan peluang adanya produksi perikanan yang berdampak pad atingkat pendapatan masyarakat nelayan. Disamping itu, tingkat pendapatan masyarakat neyalan juga dipengaruhi oleh sistem bagi hasil yang mereka terapkan, yang didasarkan pada kesepakatan. Sistem bagi hasil memiliki mekanisme dan perhitungan yang beragam, sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing kelompok nelayan.

Menurut UU No. 16 tahun 1964 pasal 1 ayat 1 bahwa perjanjian hasil adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, dan masing-masing menerima bagian dari hasil usaha menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya. Namun pada kondisinya, Anak Buah Kapal (ABK) sebagai nelayan hanya menerima bersih dan sulit untuk menyampaikan keinginan memperoleh kenaikan presentase bagi hasil. Pola kerjasama antara majikan dan ABK pada masyarakat nelayan didasarkan atas kebiasaan setempat dan sangat sulit dihindari karena berdasarkan adat kebiasaan (Brenner, 1998). Hal tersebut yang tentunya dapat menghambat perubahan ekonomi masyarakat nelayan (Kusnadi, 2009).

Keragaman ketentuan sistem bagi hasil pada masyarakat nelayan di Kepulauan Aru disesuaikan dengan jenis alat tangkap yang digunakan. Pada kondisi ini, nelayan khususnya ABK tidak memiliki hak untuk ikut memberikan masukan mengenai penentuan besaran bagi hasil. Pemilik akan memberikan tawaran yang membuat ABK tertarik untuk bekerja pada kapal/perahunya. Seperti halnya pendapat dari Pratama *et al*. (2016), pemilik atau juragan membuat ketentuan bagi hasil yang akan ditawarkan secara menarik kepada ABK agar bersedia bekerja pada kapalnya.Tanpa berpikir panjang, ABK biasanya akan langsung menerima tawaran juragan untuk melakukan penangkapan ikan sesuai ketentuan yang diberlakukan.

Dengan adanya permasalahan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sistem bagi hasil usaha perikanan yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Aru dan menyusun opsi rekomendasi yang harapannya dapat menjadi pilihan strategi mengatasi permasalahan ekonomi ABK sebagai nelayan kecil. Diharapkan dari gambaran tersebut, dapat dipilih sistem bagi hasil yang ideal atau sistem yang bukan saja menguntungkan pemilik, namun juga ABK. Karena sistem bagi hasil yang ideal merupakan mekanisme yang berpihak pada semua pelaku perikanan tangkap.

METODOLOGI

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2016 di Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Lokasi ini dipilih karena merupakan sentra perikanan dengan tipologi perikanan tangkap. Adanya pertimbangan pemilihan lokasi tersebut, karena masih ditemukannya permasalahan terkait sistem bagi hasil yang belum berpihak pada nelayan kecil. Diharapkan adaya gambaran sistem bagi hasil dari penelitian, dapat ditentukan opsi rekomendasi berupa pilihan sistem bagi hasil yang berpihak pada seluruh pelaku penangkapan ikan.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan primer serta memanfaatkan

beberapa hasil penelitian berupa laporan penelitian, serta publikasi seperti dokumen dinas kelautan dan perikanan. Adapun data diperoleh dari sampel yang dipilih secara *purposive*. Menurut Sugiyono (2008), *purposive sampling* adalah suatu proses penentuan sampel dengan didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu. Kriteria penentuan sampel adalah pada satu lokasi kegiatan yang merupakan sentra perikanan dengan tipologi perikanan tangkap. Penelitian ini mendeskripsikan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal/perahu kepada seluruh awak kapal/perahu di Kepulauan Aru. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan observasi di tingkat pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis sistem bagi hasil pada usaha perikanan tangkap. Pada data kualitatif, informasi dari penelitian dikelompokkan, disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan berdasarkan infomasi yang diperoleh dari data sekunder, wawancara, serta observasi lapang. Analisis data kuantitatif untuk menganalisis pendapatan dari pemilik dan awak kapal/perahu. Data kuantitatif dianalisis dalam bentuk tabulasi statistik sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BIAYA DAN SISTEM BAGI HASIL USAHA PERIKANAN TANGKAP

Pancing Tonda

Pancing tonda merupakan jenis alat tangkap yang banyak digunakan oleh nelayan Kepulauan Aru untuk menangkap ikan pelagis kecil terutama ikan tongkol. Operasi penangkapan dilakukan oleh 2 (dua) orang ABK. Berikut adalah biaya investasi dari penangkapan ikan pelagis kecil dengan alat tangkap pancing tonda (Tabel 1).

Biaya investasi untuk nelayan pancing tonda digunakan untuk pengadaan perahu, mesin, dan pancing. Untuk operasionalisasi investasi tersebut diperlukan solar dan oli serta beberapa perbekalan dapat dilihat pada Tabel 2.

Biaya operasional terbesar yang dikeluarkan oleh nelayan pengguna pancing tonda ketika melaut adalah solar, sedangkan untuk kebutuhan makan minum hanya sekitar 5.84% dari kebutuhan seluruhnya. Hasil dari kegiatan penangkapan nelayan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 1. Biaya Investasi Perikanan Pancing Tonda di Kepulauan Aru, 2015.
Table 1. Investment Cost of The Tonda Fishery In Aru Island, 2015.

Jenis Investasi/ *Type of Investment*	Jumlah/ *Amount*	Harga Satuan (Rp) / Unit *Price (IDR)*	Jumlah (Rp)/ *Sub Total (IDR)*
Perahu ukuran (7mx0,8mx0,8m)/ *Boat size (7m x 0.8m x 0.8m)*	1 unit/*1 unit*	6,000,000	6,000,000
Mesin 20 PK/*Machine 20 PK*	1 unit/*1 unit*	5,000,000	5,000,000
Pancing Tonda/*Tonda Fishing Line*	4 pasang/*4 pairs*	75,000	300,000
Total			**11,300,000**

Tabel 2. Biaya Operasional Perikanan Pancing Tonda di Kepulauan Aru Per Trip, 2015
Table 2. *Operating Cost of The Tonda Fishery in The Aru Islands Per Trip, 2015.*

Pengeluaran/ *Cost*	Jumlah/ *Amount*	Harga Satuan (Rp) / *Unit Price (IDR)*	Jumlah (Rp) / *Sub Total (IDR)*
Solar/*Solar*	60 liter/*60 liters*	6,900	414,000
Oli/*Oil*	3 liter/*3 liters*	90,000	270,000
Air minum aqua/*Mineral drink*	3 botol sedang/*3 medium bottles*	1,500	4,500
Kopi+Gula/*Coffee + Sugar*	6 sachet/*6 sachets*	2,000	12,000
Makan Siang/*Lunch*	2 bungkus/*2 pax*	13,000	26,000
Total			**726,500**

Tabel 3. Produksi dan Nilai Hasil Tangkapan Perikanan Tonda Menurut Jenis Ikan di Kepulauan Aru Per Trip, 2015

Table 3. Production and Value Fish Caught of Tonda Fishery According to Fish Species In The Aru Islands Per Trip, 2015.

Hasil Tangkapan/ *Catch Result*	Jumlah (kg)/ *Amount (kg)*	Harga Satuan (Rp)/ *Unit Price (IDR)*	Nilai Hasil Tangkapan (Rp)/ *Catch Value (IDR)*
Tongkol/*Cob*	100	10,000	1,000,000
Tengiri/*Mackerel*	20	37,500	750,000
Kakap Merah/*Red Snapper*	20	40,000	800,000
Katamba/*Ketamba*	15	18,000	270,000
Total			2,820,000

Tabel. 3 menunjukan bahwa kakap merah menjadi jenis tangkapan yang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan jenis lainnya, walaupun hasil tangkapannya tergolong rendah dibandingkan dengan jenis tongkol, namun ikan kakap merah memiliki harga yang lebih tinggi.

Berdasarkan aktivitas dari nelayan pancing tonda, jumlah trip operasi dalam satu bulan maksimum hanya 20 hari. Nelayan melakukan aktivitas melaut pada musim puncak dan sedang. Hasil penangkapan tersebut selanjutnya dijual dan dikurangi dengan biaya operasional melaut. Berikut adalah nilai tangkapan rata-rata per trip dari musim puncak dan musim sedang pada nelayan pengguna pancing tonda.

Pada musim puncak, pendapatan bersih tertinggi pada sekali penangkapan, rata-rata sejumlah Rp2.093.500,- dengan pembagian bagi pemilik 50%. Sisa pendapatan bersih sejumlah 50% dibagi menjadi 60% untuk nahkoda dan ABK 40%. Sedangkan pada musim sedang, nelayan memperoleh pendapatan bersih dari hasil rata-rata sebesar Rp1.212.000. Hasil tersebut dibagikan kepada pemilik, nahkoda, dan ABK sesuai presentase masing-masing.

Lama melaut, pada musim puncak, selama 53 hari dan musim sedang selama total 27 hari penangkapan dalam setahun. Dari data diatas dapat diketahui pendapatan secara keseluruhan pada musim puncak sebesar Rp110.955.500,- dan musim sedang sebesar Rp13.108.500,-. Dari pendapatan tersebut, pemilik selama 1 tahun memperoleh pendapatan sebesar Rp62.032.000 dengan pendapatan rata-rata per bulan Rp5.169.333, nahkoda memperoleh pendapatan sebesar Rp37.216.550 dengan pendapatan rata-rata perbulan sebesar Rp3.101.379, dan untuk ABK memperoleh pendapatan setahun sebesar Rp24.823.600 yang akan dibagikan kepada dua orang ABK, sehinga masing-masing ABK sebesar Rp12.411.800,- dalam setiap tahun. Dengan demikian pendapatan rata-rata untuk masing-masing ABK dalam setiap bulan adalah sebesar sebesar Rp1.034.310,-.

Dari pendapatan yang dibagikan kepada pemilik, nahkoda, dan ABK pengguna pancing tonda, maka dapat digambarkan mengenai model sistem bagi pada Gambar 1.

Dari model diatas menunjukan bahwa

Tabel 4. Nilai Penjualan Usaha Nelayan Pancing Tonda Per Trip Pada Musim Puncak Serta Musim Sedang Di Kepulauan Aru, 2015.

Table 4. Value of Production of The Tonda Fishery Per Trip During Peak Season and Between Peak and Famine Season In The Aru Island, 2015.

Pendapatan Usaha / *Bussiness Review*	Bagi Hasil/*Profit Sharing*		
	Pemilik/*Owner*	Nahkoda/*Captain*	ABK/*Crew*
Musim Puncak/*Peak Season*			
Rp2,820,000 - Rp726,500 = Rp2.093.500	50% x Rp2,093,500 = Rp1,046,750	60% x Rp1,046.750 = Rp628,050	40% x Rp1,046,750 = Rp418,700s
Musim Sedang/*Between Peak and Famine Season*			
Rp1,212,000 - Rp726,500 = Rp485,500	50% x Rp485,500 = Rp242,750	60% x Rp242,750 = Rp145,650	40% x Rp242,750 = Rp97,500

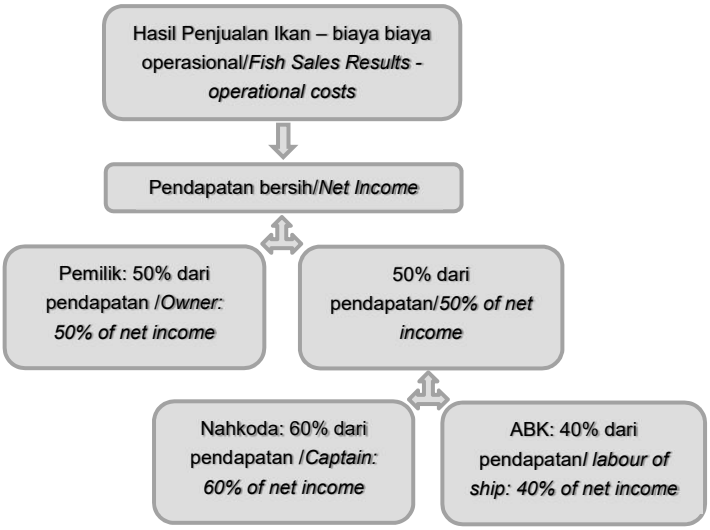
Hasil Penjualan Ikan – biaya biaya operasional/Fish Sales Results - operational costs
Pendapatan bersih/Net Income
Pemilik: 50% dari pendapatan /Owner: 50% of net income
50% dari pendapatan/50% of net income
Nahkoda: 60% dari pendapatan /Captain: 60% of net income
ABK: 40% dari pendapatan/ labour of ship: 40% of net income

Gambar 1. Model Sistem Bagi Hasil Nelayan Pengguna Alat Tangkap Pancing Tonda.
Figure 1. The Sistem Model of Fishers Profit Sharing of The Tonda Fishing Line Users.

nelayan pengguna pancing tonda di Kepulauan Aru memberlakukan sistem bagi hasil setelah diperoleh pendapatan bersih dari hasil penjualan ikan dikurangi biaya operasional. Setelahnya, dibagi 50% antara pemilik dan awak kapal. Pendapatan dari pemilik adalah sebesar 50% dari pendapatan bersih tersebut. Selanjutanya 50% untuk awak mendapat pembagian yaitu 60% untuk nahkoda dan 40% untuk ABK.

Perikanan Jaring Millenium

Nelayan di Kepulauan Aru menggunakan alat tangkap jaring millenium untuk menangkap ikan tongkol. Operasi penangkapan ikan tongkol umumnya dilakukan pada Musim Barat (September – April). Nelayan diberangkatkan dari Dobo sekitar tanggal 10 s/d 16 (penanggalan bulan di langit) menuju lokasi penangkapan ke arah Aru Timur Pulau Aru hingga sampai Muara Buaya yang berjarak ± 50 mil (berdekatan dengan perbatasan Australia) dengan waktu tempuh 24 jam. Penangkapan ikan tongkol dilakukan pada siang hari dengan menggunakan jaring insang ukuran mata jaring 6-7 inchi yang dioperasikan oleh 6 ABK. Hasil tangkapan berupa ikan tongkol (95%) sisanya (5%) ikan tuna dan ikan hiu. Tangkapan terbanyak adalah 15 ton/trip dan paling sedikit 5 ton/trip. Hasil tangkapan dijual kepada kapal penampung yang berlabuh di perairan sekitar P. Marabal dan ke Dobo. Berikut adalah jumlah investasi untuk penangkapan tersebut pada Tabel 5.

Investasi yang diperlukan nelayan pengguna jaring millennium lebih besar digunakan untuk pengadaan armada, mesin dan alat tangkap. Biaya yang diperlukan mencapai 97.73% dari biaya keseluruhan. Untuk mengoperasikannya diperlukan biaya operasional seperti pada Tabel 6.

Selama kegiatan penangkapan selama 22 hari diperlukan biaya sebesar Rp15.983.000 dengan hasil ikan tongkol dengan nilai hasil dapat dilihat pada Tabel 7.

Sesuai Tabel. 6 dan Tabel. 7 dapat

Tabel 5. Biaya Operasional Perikanan Jaring Millenium Per Trip di Kepulauan Aru, 2015
Table 5. Operational Cost The Millenium Net Fishery Per Trip in The Aru Islands, 2015

Jenis Investasi/ *Type of Investment*	Jumlah/ *Amount*	Harga Satuan (Rp)/ *Unit* Price*(IDR)*	Sub Total (Rp)/ Sub *Total (IDR)*
Kapal/*Ship*	1 unit/*1 unit*	157,000,000	157,000,000
Mesin Kapal/*Ship machine*	1 unit/*1 unit*	79,500,000	79,500,000
Genze & Lampu/*Lamp & Genze*	1 set/*1 set*	7,550,000	7,550,000
Jaring Millenium /*Millenium net*	1 set/*1 set*	90,000,000	90,000,000
Total			**334,050,000**

Tabel 6. Biaya Operasional Perikanan Jaring Millenium Per Trip di Kepulauan Aru, 2015.
Table 6. Operational Cost of The Millenium Net Fishery Per Trip in The Aru Islands, 2015.

Pengeluaran/*Cost*	Jumlah/*Amount*	Harga Satuan (Rp)/ *Unit Price (IDR)*	Sub Total (Rp)/ *Sub Total (IDR)*
Solar/*Solar*	1,320 liter/*1.320 liters*	6,900	9,108,000
Oli/*Oil*	66 liter/*66 liters*	90,000	5,940,000
Air minum Aqua/*Mineral Drink*	66 botol sedang/ *66 medium bottles*	1,500	99,000
Kopi+Gula/*Coffee + Sugar*	132 sachet/*132 sachets*	2,000	264,000
Makan Siang/*Lunch*	44 bungkus/*44 packs*	13,000	572,000
Total			**15,983,000**

Tabel 7. Hasil Tangkapan Nelayan Pada Jaring Millenium Per Trip di Kepulauan Aru, 2015.
Table 7. Fish Caught by Fishers of The Millenium Nets Fishing Per Trip in The Aru Islands, 2015.

Hasil Tangkapan/ *Catch Result*	Jumlah (kg)/ *Amount (kg)*	Harga Satuan (Rp)/ *Unit Price (IDR)*	Nilai Hasil Tangkapan (Rp) / *Catch Value (IDR)*
Ikan Tongkol	9.500	8.000	76.000.000
Total			**76.000.000**

Tabel 8. Sistem Bagi Hasil Perikanan Jaring Millenium Di Kepulauan Aru, 2015.
Table 8. Profit Sharing System in The Millenium Nets Fishery in The Aru Islands, 2015.

Nilai Penjualan Bersih/ *Net sales value*	Bagi Hasil /*Profit Sharing*		
	Pemilik/*Owner*	Nahkoda/*Captain*	ABK/*Crew*
76,000,000-15,983,000 = 60,017,000	50% x 60,017,000 = 30,008,500	2 x 3,751,063 = 7,502,125	30,008,500 : 8 = 3,751,063

digambarkan bahwa dengan hasil tangkapan sekitar 9.500 kg, dan kebutuhan operasional sebesar Rp15.983.000, maka hasil bersih adalah sebesar Rp60.017.000,-. Nelayan pengguna jarring millennium hanya melakukan kegiatan melaut, hanya selama musim puncak. Tabel 8 menggambarkan bagi hasil dari kegiatan melaut kepada pemilik dan awak kapal.

Dari data Tabel. 8, diketahui rata-rata pendapatan per trip adalah Rp76.000.000, maka selama 8 trip penangkapan diperoleh hasil penjualan sebesar Rp608.000.000 dengan penjualan bersih sebesar Rp480.136.000. Dari hasil tersebut akan dibagikan kepada pemilik 50%, sedangkan 50% sisa hasil akan dibagi 8. Pembagian tersebut akan diberikan kepada pemilik sejumlah 2x, sedangkan masing ABK 1x dari bagi hasil. Dari hasil tersebut selama 8 kali trip pemilik memperoleh Rp240.068.000,- nahkoda memperoleh Rp60.017.000,- dan masing-masing ABK memperoleh sebesar Rp30.008.504,-.

Perikanan Jaring Insang Lingkar

Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan jaring insang lingkar merupakan kegiatan penangkapan ikan yang relatif modern/ maju bagi masyarakat nelayan Kepulauan Aru. Tujuan utama jenis alat tangkap ini adalah ikan pelagis kecil (kembung dan kurao). Operasi penangkapan dilakukan oleh 7 (tujuh) ABK. Musim ikan untuk Kepulauan Aru bagian Utara/Barat terjadi antara bulan Mei s/d Desember berlokasi di wilayah perairan sekitar Pulau Babi, sedangkan untuk Kepulauan Aru Bagian Timur musim ikan terjadi pada bulan Januari s/d April dengan lokasi *fishing ground* di sekitar Panambulai hingga P. Jeudin yang berbatasan langsung dengan Australia (5 mil) ke wilayah perbatasan. Pada bulan Mei s/d Desember, nelayan melakukan penangkapan ikan di Kepulauan Aru bagian Utara/Barat tepatnya di sekitar Pulau Babi yang ditempuh sekitar 1 (satu) jam dari Dobo. Operasi penangkapan ikan dilakukan pada bulan gelap selama 20 hari dalam tiap bulannya. Berikut adalah biaya investasi dan usaha pengguna jaring lingkar (*mini purse seine*).

Tabel 9. Biaya Investasi Perikanan Jaring Insang Lingkar *(Mini Purse Seine) di Kepulauan Aru, 2015.*
Table 9. Investment Cost of The Mini Purse Seine Fishery in The Aru Islands, 2015.

Jenis Investasi/ *Type of investment*	Jumlah / *Amount*	Harga Satuan (Rp) / *Unit Price (IDR)*	Sub Total (Rp) / *Sub Total (IDR)*
Kapal (13 x 3 x 1,75)m/*Ship (13x3x1.75m)*	1	100,000,000	100,000,000
Mesin Merk Mitsubishi/*Mitsubishi Machine*	1	250,000,000	250,000,000
Jaring lingkar/*Gill ring nets*	1	60,000,000	60,000,000
		Total	**410,000,000**

Pada nelayan pengguna jaring insang lingkar, biaya investasi lebih besar untuk pengadaan kapal dan mesin yaitu 85% dari biaya keseluruhan. Untuk mengoperasikan armada tersebut pada setiap trip diperlukan biaya rata-rata sejumlah Rp2.131.000 dengan rincian seperti pada Tabel 10.

Biaya operasional tersebut digunakan ketika melaut, baik pada musim puncak dan musim sedang. Sedangkan pada musim paceklik, nelayan tidak melaut. Tabel 11 menunjukan hasil tangkapan dan nilai hasil tangkapannya.

Nilai hasil tangkapan tersebut dibagi kepada pemilik, ABK yang berjumlah 7 (tujuh) orang, serta nahkoda. Tabel 12 menggambarkan pendapatan pemilik dan awak kapal pengguna jaring insang lingkar.

Berdasarkan data diatas, bahwa hasil bagi untuk pemilik adalah sebesar 50% dengan perolehan rata-rata Rp1.734.500 setiap trip musim puncak. Sedangkan 50% sisa hasil akan dibagikan 9 yang hasilnya akan diperoleh Rp192.722,-. Per trip nahkoda akan memperoleh 2x dengan total sejumlah Rp385.444,- dan setiap ABK memperoleh Rp192.722,-

Tabel 10. Biaya Investasi Perikanan Jaring Insang Lingkar *(Mini Purse Seine) di Kepulauan Aru, 2015.*
Table 10. Investment Cost of The Mini Purse Seine Fishery in The Aru Islands, 2015.

Pengeluaran/*Cost*	Jumlah/*Amount*	Harga Satuan (Rp) / *Unit Price (IDR)*	Sub Total (Rp) / *Sub Total (IDR)*
Solar/*Solar*	120 liter/*120 liters*	6,900	828,000
Oli/*Oil*	9 liter/*9 liters*	90,000	810,000
Air minum Aqua/*Mineral Drink*	30 botol sedang/*30 medium bottles*	1,500	45,000
Kopi+Gula/*Coffee + sugar*	20 sachet/*20 sachets*	2,000	40,000
Beras dan bumbu/*Rice and spices*	1 paket/*1 package*	408,000	408,000
Total			**2,131,000**

Tabel 11. Hasil Tangkapan Perikanan Mini *Purse Seine* Per Trip di Kepulauan Aru, 2015.
Table 11. Fish Caught By The Mini Purse Seine Fishery Per Trip in The Aru Island, 2015.

Hasil Tangkapan / *Catch Result*	Jumlah/*Amount*	Harga Satuan (Rp)/ *Unit Price (IDR)*	Sub Total (Rp)/ *Sub Total (IDR)*
Kembung/*Long jawed mackerel*	700	8,000	5,600,000
Total			**5,600,000**

Tabel. 12. Sistem Bagi Hasil Perikanan Jaring Insang Lingkar *(Mini Purse Seine)* Pada Musim Puncak - Sedang di Kepulauan Aru, 2015.
Table 12. Profit Sharing System of The Mini Purse Seine Fishery During Peak - Famine Seasons in The Aru Islands, 2015

Nilai Penjualan Bersih/ *Net sales value*	Bagi Hasil /*Profit Sharing*		
	Pemilik/*Owner*	Nahkoda/*Captain*	Nahkoda/*Captain*
Musim Puncak/*Peak Season*			
5,600,000 - 2,131,000= Rp3,469,000	50% x 3,469,000 = Rp1,734,500	2 x 192,722 = Rp385,444	1.734,500: 9 = Rp192,722
Musim Sedang/*Between Peak to Famine Season*			
4,000,000 - 2,131,000= Rp1,869,000	50% x Rp. 1,869,000 = Rp934,500	2 x 103,833 = Rp207,666	934,500: 9 = Rp103,833

Pada musim sedang rata-rata diperoleh pemilik dalam setiap trip sebesar Rp934.500. Nahkoda menerima sejumlah Rp207.666,- Sedangkan ABK menerima pendapatan Rp. 103.833. Dengan demikian pendapatan selama satu tahun untuk pemilik adalah Rp352.280.000, nahkoda menerima Rp22.780.384,- per tahun, sedangkan ABK masing-masing menerima pendapatan selama setahun sebesar Rp5.695.096,-. Model atau sistem bagi hasil yang digunakan pada nelayan pengguna jaring insang lingkar adalah sama dengan nelayan pengguna jaring millenium.

Sesuai Gambar 2, bahwa nelaya pengguna jaring millenium dan jaring insang lingkar memberikan bagi hasil untuk pemilik 50% dan 50% yang dibagikan kepada seluruh awak +1. Presentase tersebut diambil dari pendapatan bersih yaitu hasil penjualan komoditas ikan dikurangi dengan biaya operasional. Hal ini karena untuk nahkoda memperoleh 2x hasil bagi tersebut. Sedangkan untuk SBK menerima 1x bagi hasil.

Jaring Insang Hanyut untuk Ikan Pelagis Besar (Cakalang)

Nelayan di Desa Siwalema sebagai nelayan pengguna armada kapal 5GT dengan alat tangkap jaring insang hanyut, jaring dioperasikan oleh 4 (empat) ABK pada musim Timur yaitu bulan April s/d Agustus. Daerah penangkapan berada di wilayah perairan Jambu Air dan di Pulau Karang yang berjarak ± 5 mil dari Dobo dengan lama perjalanan 6 jam menggunakan kapal motor bermesin Dongfeng 15 PK. Potensi terbesar dari lokasi penangkapan di luar Jambu Air dan Pulau Karang tersebut adalah cakalang. Oleh karenanya hasil tangkapan tertinggi dari nelayan adalah berupa cakalang. Adapun jenis ikan hasil tangkapan lain adalah berupa ikan putih dan bawal.

Untuk sekali melaut, nelayan menggunakan waktu kurang lebih selama lebih 14 hari, meskipun perjalanan yang dibutuhkan menuju lokasi penangkapan adalah selama 6 jam. Untuk memenuhi kebutuhan penangkapan selama 14 hari, biaya operasional yang dibutuhkan nelayan adalah sebagai berikut:

Sesuai Tabel 13, bahwa bahan bakar yang digunakan pada armada kapal pengguna jaring insang hanyut adalah berupa solar. Solar memiliki pengeluaran tertinggi dengna jumlah sebesar 36.26% dibanding 9 (sembilan) jenis pengeluaran lain. Armada ini digunakan untuk melaut selama 14 hari per trip. Armada dikendarai oleh nahkoda dengan 3 (tiga) ABK. Selama melaut, ra-rata hasil tangkapan adalah seperti pada Tabel 14.

Dari hasil jual tangkapan sebesar Rp161.200.000 dan biaya operasional sebesar Rp11.416.000, maka diperoleh sisa hasil Rp149.784.000. Dari pendapatan bersih tersebut akan dibagikan sesuai presentase kepada pemilik, nahkoda, dan ABK dapat dilihat pada Tabel 15.

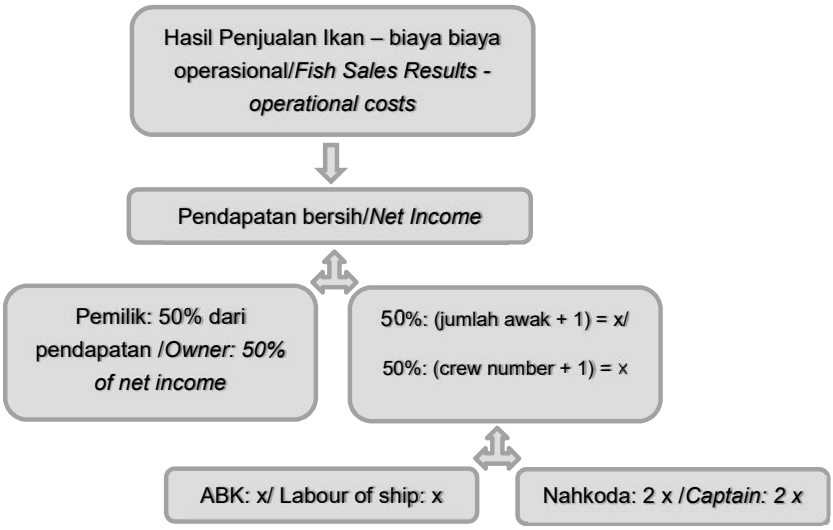
Hasil Penjualan Ikan – biaya biaya operasional/Fish Sales Results - operational costs
Pendapatan bersih/Net Income
Pemilik: 50% dari pendapatan /Owner: 50% of net income
50%: (jumlah awak + 1) = x/
50%: (crew number + 1) = x
ABK: x/ Labour of ship: x
Nahkoda: 2 x /Captain: 2 x

Gambar 2. Model Sistem Bagi Hasil Perikanan Jaring Milenium dan Jaring Insang Lingkar di Kepulauan Aru, 2015.

Figure 2. Profit Sharing System Model For The Millenium Nets and Mini Purse Seine Fisheries in The Aru Islands, 2015.

Tabel. 13. Biaya Operasional Perikanan Jaring Insang Per Trip di Kepulauan Aru, 2015.
Table 13. Operating Cost of The Drift Gillnet Fishery Per Trip in The Aru Islands, 2015.

No.	Pengeluaran/*Cost*	Jumlah /*Amount*	Harga Satuan (Rp)/ *Unit Price (IDR)*	Sub Total (Rp)/ *Sub Total (IDR)*
1.	Solar/*Solar*	600 liter/*600 liters*	6,900	4,140,000
2.	Oli/*Oil*	25liter/*25 liters*	30,000	750,000
3.	Kopi + Gula/*Coffee + Sugar*	60sachet/*60 sachets*	2,000	120,000
4.	Rokok/*Cigarette*	15 dus/15 boxes	100,000	1,500,000
5.	Beras/*Rice*	5 karung (isi 15 kg*)/5 sacks (15 kg)*	180,000	900,000
6.	Bahan dapur/*Spices*	1 drum/1 drum	500,000	500,000
7.	Minyak Goreng/*Cook oil*	5 liter/*5 liters*	80,000	400,000
8.	Indomie/*Noodle*	2 dus/*2 boxes*	28,000	56,000
9.	Air Bersih/*Mineral*	2 galon/*2 gallons*	25,000	50,000
10.	Es Balok/*Ice*	5 ton/ *5 tons*	600,000	3,000,000
	Total			**11,416,000**

Tabel 14. Hasil Tangkapan Perikanan Jaring Insang Hanyut Menurut Jenis Ikan Per Trip di Kepulauan Aru, 2015.
Table 14. Fish Caught of The Drift Gillnet Fishery According To Species Per Trip in The Aru Islands, 2015.

Hasil Tangkapan/ *Catch Result*	Jumlah/*Amount*	Harga Satuan (Rp)/ *Unit Price (IDR)*	Sub Total (Rp)/ *Sub Total (IDR)*
Bawal/*Pomfret fish*	100	12,000	1,200,000
Putih/*White fish*	200	50,000	10,000,000
Cakalang/*Skipjack tuna*	3,000	50,000	150,000,000
Total			**161,200,000**

Tabel 15. Sistem Bagi Hasil Perikanan Jaring Insang Hanyut Per Trip di Kepulauan Aru, 2015.
Table 15. Profit Sharing System of The Drift Gillnet Fishery Per Trip in The Aru Islands, 2015.

Nilai Penjualan Bersih/ *Net sales value*	Bagi Hasil /*Profit Sharing*		
	Pemilik/*Owner*	Nahkoda/*Captain*	Nahkoda/*Captain*
161.200.000-11.416.000= Rp149.784.000	50% x149,784,000= Rp74,892,000	51.5 % x 74,892,000 = Rp38,569,380	48,5% x 74,892,000 = Rp36,322,620

Hasil penjualan dari awak kapal pengguna alat tangkap jaring insang hanyut dibagi dengan presentase pemilik 50%. Sedangkan 50% sisanya akan dibagikan kepada nahkoda dengan 51.5% dan ABK 48.5%. Jika awak kapal melaut selama 5 (lima) bulan dalam setahun, maka pemilik akan memperoleh pendapatan selama setahun sebesar Rp374.460.000 dengan rata-rata pendapatan per bulan Rp31.205.000. Nahkoda memperoleh pendapatan sebesar Rp192.846.900, dengan pendapatan rata-rata perbulan sebesar Rp16.070.575,-. Selanjutnya ABK memperoleh pendapatan dalam setahun sebesar Rp45.403.275, rata-rata perbulan Rp3.783.606. Model sistem bagi hasil yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.

Sesuai data diatas, bagi hasil nelayan pengguna jaring insang hanyut untuk ikan pelagis besar (cakalang) menggunakan presentase sebesar 50% untuk pendapatan bersih. Pendapatan bersih diperoleh dari hasil penjualan komoditas ikan dikurangi biaya operasional. Sedangkan untuk 50% akan dibagikan untuk nahkoda sejumlah 51.5% dan ABK sejumlah 48.5% (jumlah ABK).

Pendapatan Nelayan Kabupaten Kepulauan Aru

Analisa pendapatan ABK terhadap Upah Minimum Reguler (UMR) di Kab. Kepulauan Aru dapat dihitung dengan pendapatan berdasarkan penggunaan alat tangkap per bulan dan perhitungan UMR di Kab. Kepulauan Aru.

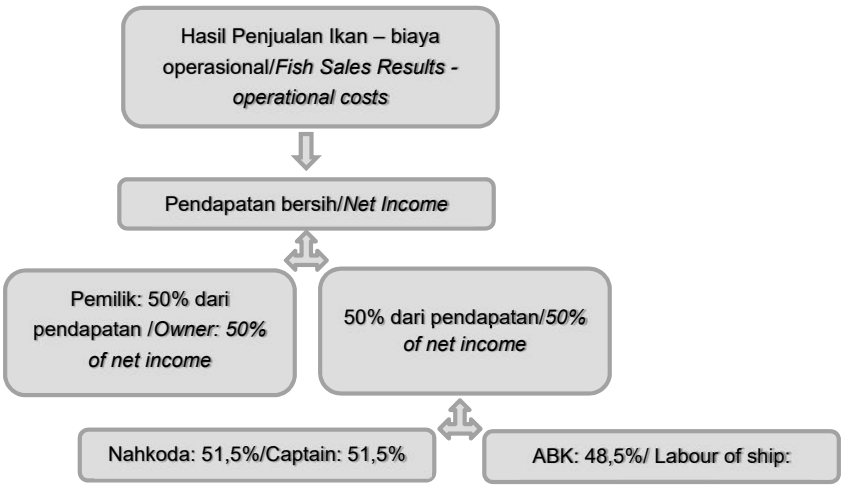
Hasil Penjualan Ikan – biaya operasional/Fish Sales Results - operational costs
Pendapatan bersih/Net Income
Pemilik: 50% dari pendapatan /Owner: 50% of net income
50% dari pendapatan/50% of net income
Nahkoda: 51,5%/Captain: 51,5%
ABK: 48,5%/ Labour of ship:

Gambar 3. Model Sistem Bagi Hasil Perikanan *Drift Gillnet* Per Trip di Kepulauan Aru, 2015.
Figure 3. Profit Sharing System Model For The Drift Gillnet Fishery Per Trip in The Aru Islands, 2015.

UMR di Kab. Aru pada tahun 2015 adalah sebesar Rp1.275.000,- Upah dapat diartikan sebagai balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja dengan jumlah berdasar nilai yang telah disepakati (Hasibuan, 2007). Hal ini sesuai pendapat dari (Pratama *et al*., 2012) dengan membandingkan pendapatan nelayan dan UMR dapat terlihat tingkat kesejahteraan nelayan. Tabel 16 menggambarkan pendapatan nelayan di Kab. Kepulauan Aru.

Sesuai data pada Tabel 16 diketahui bahwa pendapatan nelayan pada seluruh jenis alat tangkap yang digunakan memiliki pendapatan di atas rata-rata pendapatan minimum reguler di Kab. Kepulauan Aru yang berjumlah Rp1.650.000,- Pendapatan atau upah minimum reguler adalah standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Dalam hal ini masyarakat di Kepulauan Aru menggunakan upah yang diterima dengan mengutamakan kebutuhan pokok seperti beras dan lauk. Sedangkan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain seperti listrik, dan kebutuhan sandang.

Tabel 16. Pendapatan Rata-Rata Per Bulan Pada Nelayan Berdasarkan Usaha Perikanan yang Digunakan di Kepulauan Aru, 2015.
Table 16. Average Montly Revenue of Fishers Based on Types of Fishery in The Aru Island, 2015.

No	Nelayan Berdasarkan Pengguna Alat Tangkap/ *Fisher's Base on Fishing Gear Used*	PendapatanRata-Rata / *Average income (IDR.000)*								
		Per Trip/*Per Trip*			Per Tahun/*Per Year*			Per bulan/*Per Month*		
		Pemilik/ *Owner*	Nahkoda/ *Captain*	ABK/ *Crew*	Pemilik/ *Owner*	Nahkoda/ *Captain*	ABK / *Crew*	Pemilik/ *Owner*	Nahkoda/ *Captain*	ABK/ *Crew*
1.	Nelayan Pengguna Pancing Tonda/ *Fisher's of theTonda Fishery*	1,289.5	773.7	516.2	62,032	37,216.55	12,411.8	5,169.33	3,101.37	1,034.31
2.	Nelayan Pengguna Jaring Milenium/ *Fisher's of the Millenium Gillnet Fishery*	30,008.5	7.502.12	3,751.06	240,068	60,017	30,008.50	20,005.66	5,001.41	2,500.70
3.	Nelayan Pengguna Jaring Insang Lingkar/*Fisher's of the Mini Purse Seine Fishery*	2,669	593.11	296.55	352,280	22.780.38	5,695.09	29,356.66	1,898.36	474.59
4.	Nelayan Pengguna Jaring Insang Hanyut/*Fisher's of the Drfift Gillnet Fishery*	74,892.0	38,569.38	9,080.65	374,460	198,846.9	45,403.27	31,205	16,070.57	3,783.60

Sesuai data diatas diketahui bahwa pendapatan nelayan pada seluruh jenis alat tangkap yang digunakan memiliki pendapatan di atas rata-rata pendapatan minimum reguler di Kab. Kepulauan Aru yang berjumlah Rp. 1.650.000,- Pendapatan atau upah minimum reguler adalah standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Dalam hal ini masyarakat di Kepulauan Aru menggunakan upah yang diterima dengan mengutamakan kebutuhan pokok seperti beras dan lauk. Sedangkan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain seperti listrik, dan kebutuhan sandang.

Melihat perbandingan antara hasil penelitian dan data pendapatan rata-rata per bulan dengan jumlah kebutuhan diatas, dapat diketahui bahwa ABK ABK pengguna pancing tonda dan jaring insang memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun hal tersebut juga terjadi pada nelayan pengguna jaring miilenium dan nelayan pengguna jaring insang hanyut yang memiliki pendapatan rata-rata per bulan yang lebih besar. Ssistem bagi hasil sepintas kelihatan adil. Namun jika dicermati lebih jauh, sistem bagi hasil yang demikian sebenanrnya sangat timpang. Semakin banyak awak kapal yang melaut, maka ketimpangan semakin besar, (Imron, 2013). Melihat masalah tersebut diperlukan adanya implikasi kebijakan pemerintah yang berpihak pada nelayan ABK.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Pelaku perikanan tangkap terdiri dari pemilik, nahkoda, dan ABK. Sistem bagi hasil yang yang lebih besar diterima pemilik atau 50%, masih menjadi keputusan yang memberatkan awak kapal lainnya, terutama ABK. Karena 50% sisa hasil masih dibagi dengan nahkoda dan jumlah ABK yang bekerja. Disamping itu, pemilik sebagai penyedia biaya operasional, telah menambahkan keuntungan dari harga kebutuhan operasional seperti beras, kopi, gula, dan lainnya. Kebutuhan yang tidak dikenakan keuntungan oleh pemilik adalah es balok.

Kondisi diatas merupakan masalah kongkrit yang dihadapi oleh ABK khususnya. Namun karena sudah menjadi kebiasaan pada saat berangkat melaut, nelayan tidak memperhitungkannya. Nelayan terbiasa dengan sistem yang berjalan, namun akan menjadi permasalahan berat bagi mereka ketika menghadapi musim paceklik. Permasalahan nelayan ABK menjadi berkurang jika ketergantungan dengan pemilik lebih besar. Seperti halnya penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kabupaten Muko Muko oleh IT.Tiara (2016), bahwa nelayan pengguna jaring insang atau *gillnet* memiliki ketergantungan yang sangat kecil terhadap pemilik atau juragan dalam hal modal yang digunakan untuk melaut.

Kondisi nelayan ABK yang memiliki ketergantungan tinggi dengan pemilik adalah adanya kondisi sebagai berikut:

1. Harga kebutuhan pokok di Kab. Kepulauan Aru seringkali melonjak dan diiringi kebutuhan lain dari rumah tangga nelayan yang mendesak;
2. Nelayan pengguna jaring millenium dan jaring insang hanyut hanya melaut pada saat musim puncak. Sedangkan nelayan pengguna jaring tonda dan jaring insang lingkar melaut pada musim puncak dan musin sedang. Diluar musim tersebut, nelayan tidak bekerja;
3. Nelayan pengguna jaring millenium dan jaring insang hanyut masih memiliki ketergantungan pada pemilik mengenai penyediaan biaya operasional melaut. Diketahui bahwa pemilik telah menambahkan keuntungan pada sebagian besar jenis kebutuhan. Dengan demikian pemilik telah memiliki beberapa keuntungan yaitu dari sistem bagi hasil dan biaya operasional yang disediakan;
4. Budaya menghemat yang belum kental pada jiwa nelayan di Kepulauan Aru. Sebagian besar nelayan membelanjakan uang pendapatannya secara langsung setelah mendapatkan bagi hasilnya. Hal ini disebabkan adanya budaya besar pasak daripada tiang. Nelayan memiliki pengeluaran banyaks etelah memperoleh pendapatan langsung dari bagi hasil. Oleh karenanya nelayan akan menemui permasalahan ketika memiliki kebutuhan mendesak,atau musim packelik.

Ketergantungan nelayan dengan pemilik menjadi hal yang perlu dikhawatirkan apabila berjalan terus menerus. Nelayan menjadi selalu terikat dengan pemilik. Sistem bagi hasil menjadi hal yang penting didalamnya. Sistem bagi hasil yang memiliki peran utama dalam menentukan besaran pendapatan terutama bagi ABK, dapat mengurangi permasalahan ABK sebagai nelayan kecil, terutama jika terdapat opsi kebijakan tambahan dari pemerintah.

Implikasi Kebijakan

Untuk mengatasi masalah diatas, memerlukan adanya implikasi kebijakan pemerintah yang berpihak pada nelayan kecil, khususnya ABK. Sistem bagi hasil perikanan tangkap yang telah diatur pada UU No. 16 tahun 1964, penting untuk diberikan kebijakan tambahan mengenai hal-hal lain yang tidak diperkenankan dilakukan pada pemilik, meliputi:

a) Pemilik yang menyediakan perlengkapan operasional melaut, tidak boleh mengambil keuntungan dari item-item perlengkapan;
b) Perlengkapan yang disediakan akan dibayar sesuai dengan harga beli. Jika pemilik merupakan penjual perlengkapan biaya operasional tersebut, tentunya harus menggunakan harga yang sama kepada konsumen lain yang bukan nelayan;
c) Menyisihkan 1% dari hasil pendapatan nelayan dan ABK untuk kepentingan pinjaman awak kapal yang dapat dijadikan modal simpan pinjam pada musim paceklik. Modal ini diatur oleh nelayan dan ABK yang dijadikan satu kelompok nelayan.
d) Pendapatan awak kapal yaitu nahkoda dan ABK harus di sampaikan kepada istri sah atau jika belum menikah diberikan kepada orang tua yang bertanggung jawab. Kondisi ini diantisipasi untuk mencegah hal-hal yang bersifat pemborosan serta kondisi paceklik. Tujuan lain adalah untuk membiasakan para nelayan agar dapat memprioritaskan pemenuhan kebutuhan utama;

Pemerintah hendaknya juga memperhatikan dan mengimplementasikan program yang berorientasi pada nelayan kecil. Program tersebut adalah melalui bantuan modal usaha. Pemberian modal usaha diberikan kepada nelayan kecil untuk penyediaan bahan-bahan pokok dalam melaut serta untuk mata pendaharian alternatif. Pemberian modal juga dilengkapi dengan sosialisasi mata pencaharian alternatif yang diikuti ABK dan istrinya, sosialisasi manajemen usaha. Karena, pada umumnya modal masih menjadi kendala bagi nelayan, khususnya nelayan perikanan tangkap skala kecil (Masyhuri, 2014).

Pendampingan terhadap kelompok nelayan diperlukan, karena rata-rata nelayan memiliki tingkat pendidikan rendah. Hal ini ditujukan agar program pemerintah dapat meminimalisir kendala di lapangan (Vibriyanti, 2014). UU tentang sistem hasil juga dapat dimanfaatkan oleh nelayan kecil dengan optimal tanpa adanya tambahan beban lain seperti kesalahan dalam managemen pengelolaan usaha, maupun ketergantungan kepada pemilik. Hal tersebut ditujukan semata-mata adalah untuk kesejahteraan masyarakat melalui terpenuhinya kesejahteraan yang diterima oleh para nelayan (Pratama *et al.*, 2012).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Ir. Toni Ruchimat, M.Sc sebagai plt Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP), serta tim riset *Baseline Survey* dan *Mapping* Sosial Ekonomi, serta para pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kep. Aru. 2015. Data Statistik Perikanan Kep. Aru, 2015.

Brenner, S.A. 1998. The Domestication of Desire Women, Wealth, and Modernity in Java. Princeton University Press. New Jersey.

Hasibuan, M. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta.

Imron, M . 2013. Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Vol. 5 (1): 63-78.

Kusnadi. 2009. Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir. Ar-ruzz Media. Yogyakarta.

Masyhuri. 2014. Pembiayaan Usaha Perikanan Tangkap dan Mobilitas Sosial Nelayan. Jurnal Masyarakat Dan Budaya. Vol. 16(1): 125-136.

Pratama, D.S., I. Gumilar, dan I. Maulina. 2012. Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Pancing Ulur di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Jurnal Perikanan dan Kelautan. Vol.3 (3): 107-116.

Pratama, M.A.D., T.D. Hapsari, dan I. Triarso. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Produksi Unit Penangkapan Purse Seine (Gardan) di Fishing Base PPP Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Jurnal Saintek Perikanan. Vol. 2 (2): 120-128

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung.

Tiara, I. D. 2016. Sistem Bagi Hasil Nelayan Perikanan Tangkap di Pantai Indah Muko Muko. Skripsi.

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Vibriyanti, D. 2014. Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal, Jawa Tengah. Jurnal Kependudukan Indonesia. Vol. 9(1): 45-58.

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33 ayat (3) tentang Kekayaan Negara dan Kemakmuran Rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Aru di Povinsi Maluku.

PENILAIAN SOSIAL DALAM MEMBANGUN ENTITAS BISNIS PERIKANAN PADA SKPT SELAT LAMPA, NATUNA

Social Assessment on The Development of The Fishery Business Entity in SKPT Selat Lampa, Natuna

***Armen Zulham**
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 22 Januari 2018 Diterima setelah perbaikan: 8 Maret 2018
Disetujui terbit: 6 Juni 2018
*email: keude_bing@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kehadiran nelayan asing pelaku *Illegal Unreported and Unregulated fishing* (*IUU- Fishing*) pada Laut Natuna Utara merupakan sinyal, perairan tersebut cukup potensial. Keberhasilan menangkap pelaku *IUU Fishing* pada perairan itu, seharusnya mendorong pelaku usaha perikanan Natuna memanfaatkan peluang itu. Namun, hal itu belum terwujud, karena struktur sosial dan jaringan sosial entitas bisnis perikanan diluar SKPT Selat Lampa, kapasitasnya belum dipetakan. Pemetaan perlu dilakukan untuk mengukur: kemampuan pemupukan modal, kemampuan akses potensi ikan, membangun industri pengolahan, membangun akses pasar dan jaringan perdagangan ikan, serta perilaku bisnis pelaku usaha perikanan di Natuna. Upaya meningkatkan peran entitas bisnis perikanan di Natuna, dilaksanakan melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa. SKPT yang dimulai sejak tahun 2016. Lokasi ini dipilih karena kontruksi sosialnya masih *premature* sehingga perlu strategi untuk memfungsikannya. Penilaian sosial ini, bertujuan memberi informasi tentang struktur sosial dan jaringan sosial entitas bisnis perikanan diluar SKPT Selat Lampa, sebagai bahan untuk operasionalisasi SKPT tersebut. Informasi tulisan ini diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di Ranai. Informasi FGD itu, diperkaya dengan mewawancara 50 nelayan, 5 pedagang, 5 pengolah dan 3 pengusaha yang melakukan bisnis perikanan di Natuna. Informasi dikumpulkan pada bulan Juli dan Oktober 2017. Hasil analisis merekomendasikan pedagang besar pada jaringan bisnis ikan di Natuna harus diintegrasikan dalam entitas bisnis usaha patungan, sebagai wadah pedagang tersebut berperan di SKPT Selat Lampa.

Kata Kunci: perikanan; Natuna; struktur sosial; jaringan sosial

ABSTRACT

The presence of foreign fishermen committing Illegal Unreported and Unregulated fishing (IUU-Fishing) in North Natuna Sea indicates that the sea is highly potential. The arrest of IUU-Fishing actors is supposed to encourage the local businessmen to take the opportunities. However, the role has not been established yet due to lack of capacity mapping of social structure and social networking for the fishing business outside SKPT Lampa Strait. The mapping was required to measure the ability of capital accumulation, access to fish resources, development of processing industry, development of market access and fish trading network, and behaviour of fish businessmen in Natuna. The Integrated Centre of Marine and Fisheries (SKPT) in Lampa Strait, which has been initiated since 2016, is developed to empower the role of fish business in Natuna. This location was chosen due to the prematurity social construction, therefore, a particular strategy is necessary to function it. This social assessment aimed to inform social structure and social networking of fish business outside SKPT Lampa Strait as a subject to operate the SKPT. The information of this article were collected through Focus Group Discussion (FGD) in Ranai, as well as interview with 50 fishermen, 5 traders, and 3 businessmen doing fish business in Natuna. The information was collected on July and October 2017. The result of the analysis recommended that fish wholesaler in Natuna network business should be integrated in joint venture to encourage their engagement in business activities at SKPT Lampa strait.

Keywords: fishing; Natuna; social structure; social networking

**Korespodensi Penulis:*
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

PENDAHULUAN

Perairan Laut Natuna Utara mulai dikenal pada Juli 2017 (Suryadinata, 2017). Perairan ini merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-711). Menurut Supryanto (2015) potensi bisnis perairan tersebut sering dimanfaatkan armada perikanan China, Vietnam dan Thailand. Pemerintahan China dan Vietnam secara sepihak mengakui perairan Laut Natuna Utara adalah *fishingground* tradisional nelayan mereka (Riska, 2017).

Laporan dari nelayan Desa Sepampang, Desa Bandarsyah Pulau Bunguran Besar, menunjukkan kegiatan *illegal fishing* kapal ikan Vietnam sampai 2018 masih terjadi, namun jumlahnya jauh berkurang. Kehadiran kapal ikan asing pada perairan Laut Natuna Utara merupakan tanda, bahwa:

a. Laut Natuna adalah salah satu sumber pasokan ikan. Analisis yang dilakukan lembaga *S. Rajaratnam School of International Study Nanyang Technology University Singapore,* perairan Natuna dapat menghasilkan 500 ribu ton ikan per tahun (Supryanto, 2015). Estimasi tersebut termasuk ikan dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara. Pada tahun 2015 ikan yang didaratkan di Natuna mencapai 48.968,85 ton (Dinas Perikanan Natuna, 2017). Jika keberadaan armada perikanan Muara Angke, Muara Baru, Tegal dan Pekalongan yang beroperasi pada Laut Natuna Utara diperhitungkan, maka jumlah ikan yang ditangkap dari perairan itu diperkirakan mencapai 60 ribu ton – 70 ribu ton ikan per tahun. Angka tersebut, menurut Kepmen KP No. 45/MEN/2011, Kepmen KP No. 47/Kepmen-KP/2016 dan Kepmen KP No. 50 / Kepmen KP/ 2017 menunjukkan produksi ikan dari perairan Natuna telah lebih tangkap.
b. Armada perikanan tangkap di Natuna tidak memadai. Pada tahun 2017, jumlah armada perikanan Kabupaten Natuna sekitar 4.107 unit. Armada itu terdiri dari kapal / perahu 1GT – 5GT (58,4%); 9,3% armada perikanan 5 GT – 10 GT dan 27,6% armada Perahu Motor Tempel. Armada perikanan > 30 GT tidak tercatat pada Statistik Perikanan Kabupaten Natuna. Namun, armada perikanan > 30 GT yang beroperasi di Laut Natuna Utara merupakan kapal ikan asal Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau, Muara Angke, Muara Baru, serta Pekalongan dan Tegal yang jumlahnya terbatas.
c. Fasilitas pendukung penangkapan ikan di Natuna tidak memadai. Distribusi ikan ke pasar tujuan misalnya, adalah tantangan yang dihadapi nelayan asal Natuna. Hal ini disebabkan karena jumlah *Cold Storage*, Pabrik Es dan Tempat Pendaratan Ikan tidak memadai. Selain itu pasokan bahan bakar minyak untuk penangkapan ikan di Natuna juga terbatas. Permasalahan semakin pelik ketika produksi ikan di Natuna melimpah, daya serap pasar lokal terbatas sehingga harga ikan sangat rendah. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan oleh struktur sosial yang ada. Jika dipelajari statistik Kabupaten Natuna (BPS Kabupaten Natuna, 2017), hal ini disebabkan oleh kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Natuna, belum memprioritaskan lapangan usaha sektor primer (termasuk perikanan).

Uraian diatas, secara implisit menunjukkan aktivitas bisnis (Reniati, 2013), kontruksi sosial (Radcliffe_Brown, 1940), jaringan sosial (Blau, 1964) Lapangan Usaha Perikanan di Natuna telah berjalan, namun struktur sosial dan entitas bisnisnya belum dipetakan dengan baik, sehingga Lapangan Usaha Perikanan tersebut belum mampu mendorong perekonomian Natuna.

Pada sisi lain, untuk memanfaatkan potensi ikan dan mengantikan peran kapal ikan asing yang ditangkap dan ditenggelamkan di Laut Natuna Utara, pemerintah melakukan kontruksi sosial dengan Kepmen KP No. 51/Kepmen-KP/2016, membangun SKPT Selat Lampa serta memberi bantuan armada dan alat tangkap perikanan kepada nelayan di Natuna. Artinya pemerintah mengintervensi struktur sosial di luar SKPT Selat Lampa dengan Kepmen KP No. 51/Kepmen-KP/2016, agar berintegrasi dengan struktur sosial yang dibuat pemerintah di Selat Lampa (Radcliffe-Brown, 1940). Harapan ini tidak mudah diwujudkan, karena entitas bisnis perikanan diluar SKPT Selat Lampa tidak terintegrasi. Apalagi setiap jaringan sosial pada entitas bisnis perikanan yang ada sudah mapan dan ikatannya cukup kuat. Jaringan sosial pada entitas bisnis perikanan dapat disebut sebagai keterlekatan kuat (Damsar dan Indriyani, 2013). Sementara, entitas bisnis pada SKPT Selat Lampa sedang dirintis dan jaringan sosialnya *premature*.

Penilaian sosial cara yang digunakan untuk mempercepat berfungsinya suatu program (Taylor *et al*., 1990). Penilaian sosial tulisan ini, dilakukan untuk mempelajari strategi, kemampuan dan fungsi dari entitas bisnis pada struktur sosial perikanan Natuna, agar informasi pemanfaatan potensi ikan, akses teknologi, kemampuan akumulasi modal, akses pasar dapat dipetakan. Sehingga jaringan sosial pada entitas bisnis yang ada diluar kawasan SKPT Selat Lampa itu, dapat berintegrasi dengan jaringan sosial yang dibangun pada SKPT Selat Lampa di Natuna. Pengumpulan data untuk mewujudkan tujuan diatas dilakukan pada bulan Juli dan Oktober 2017. Data dan informasi diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di Ranai. *In depth study* dilakukan dengan wawancara pada 50 nelayan, 5 pedagang, 5 pengolah dan 3 pengusaha/koperasi yang melakukan bisnis perikanan di Natuna. Responden tersebut tersebar pada Desa Pulau Tiga, Desa Tanjung, Desa Bandarsyah, Desa Cemaga Tengah dan Desa Sepampang. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan preskriptif (Huisman, 2015; de Lange, 2017; dan Heaney, 2015). Analisis preskriptif digunakan dengan memanfaatkan hasil analisis deskriptif tersebut untuk mendorong jaringan sosial diluar SKPT Selat Lampa dapat berintegrasi dengan aktivitas pada SKPT Selat Lampa.

CAKUPAN BAHASAN ENTITAS BISNIS DAN JARINGAN SOSIAL PERIKANAN NATUNA

Struktur sosial dan jaringan sosial di Natuna membentuk entitas bisnis perikanan melalui proses interaksi sosial (Bardis, 1978). Struktur sosial itu menurut Parsons (1951) adalah sistem sosial yang terdiri dari pedagang ikan, pemilik kapal ikan, pengusaha maupun pengolah hasil perikanan. Dan menurut Crossman, (2017); Lauer, (1982) struktur sosial itu dapat berupa institusi/organisasi/ lembaga/kelompok dengan peran dan status sosial tertentu. Sistem sosial itu akan berfungsi, jika punya kemampuan adaptasi, tujuan yang sama, mampu berintegrasi dan menjaga pola relasi yang sudah dibangun (Poloma, 2007).

Tulisan ini melihat, entitas bisnis perikanan di Natuna adalah bentuk operasionalisasi bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha perikanan di Natuna. Berdasarkan batasan itu maka di Natuna terdapat 4 tipe entitas bisnis (Moore, 1974 dan Kimmitt & Esquire, 2013), yaitu: kepemilikan sendiri, kongsi, kongsi terbatas, kongsi dengan penyertaan modal (saham).

Entitas bisnis kepemilikan sendiri, umumnya mencakup kegiatan penangkapan ikan dengan perahu tanpa motor dan pengolahan ikan skala rumah tangga. Karakteristik entitas bisnis ini adalah pemilik tunggal, keuntungan dan berbagai keperluan dalam kegiatan usaha adalah tanggung jawab pemilik usaha.

Entitas bisnis Kongsi terdapat pada kegiatan penagkapan ikan dengan motor tempeL, kapal motor dan koperasi. Entitas Kongsi ini merupakan bentuk kerja sama 2 orang atau lebih dalam pengelolaan dan pembiayaan usaha, pengunaaan keuntungan serta membayar kewajiban usaha.

Entitas bisnis kongsi terbatas umumnya terdapat dalam perdagangan ikan antara eksportir / pengumpul dan pemilik kapal ikan. Entitas bisnis ini merupakan kerjasama dua orang atau lebih dimana mitra hanya ikut dalam investasi, tetapi pengelolaan usaha dan kewajiban lain adalah tanggung jawab yang menjalankan usaha.

Entitas bisnis kongsi dengan penyertaan modal (saham). Entitas ini terdapat pada kegiatan ekspor hasil perikanan, pengelolaan *cold storage*, pabrik es atau Stasiun Pengisi Bahan Bakar Nelayan. Pada entitas bisnis ini, usaha dijalankan oleh profesional, namun keputusan pengelolaan usaha, kewajiban usaha dan keuntungan dari usaha diatur berdasarkan saham yang dimiliki.

Kekuatan jaringan sosial pada entitas bisnis itu tergantung dari kapasitas struktur sosial dalam masyarakat perikanan Natuna. Pada entitas bisnis penangkapan ikan (kongsi) misalnya, kekuatanya tergantung dari pengaruh pemilik kapal ikan (juragan) pada nahkoda dan anak buah kapal; atau kongsi terbatas tergantung pengaruh pedagang ikan (pengumpul dan eksportir) dengan pemilik kapal (juragan). Demikian juga halnya, pada kegiatan perdagangan dan distribusi ikan kekuatan jaringan sosial itu terletak pada pedagang besar (eksportir). Kekuatan bisnis entitas kongsi dengan penyertaan modal tergantung kesepakatan antara pedagang besar (eksportir di Tanjung Balai Karimun) dengan pedagang pengumpul ikan di Natuna. Peran jaringan sosial pada entitas bisnis perikanan Natuna dapat dipelajari menurut dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Pada dimensi horizontal pelaku usaha pada jaringan sosial tersebut punya peran berbeda dan status sosial yang setara, sedangkan pada dimensi vertikal pelaku usaha pada jaringan sosial punya peran dan status sosial yang berbeda satu dengan lainnya (Schmitz, 2012).

Tulisan ini melihat jaringan sosial bisnis perikanan di Natuna dalam dimensi horizontal dan dimensi vertikal perlu dipahami, agar mereka dapat melakukan kegiatan bisnis pada SKPT Selat Lampa. Saat ini entitas bisnis perikanan di Natuna aktivitasnya belum terintegrasi, karena aktivitas mereka tersebar pada berbagai desa di Pulau Bunguran, Pulau Tiga, dan Sedanau.

Entitas Bisnis Perikanan di Luar SKPT Selat Lampa

Jaringan sosial entitas bisnis perikanan Natuna dalam dimensi horizontal menggambarkan diferensiasi sosial karena perbedaan peran dalam membangun relasi. Pelaku usaha pada jaringan sosial ini menurut fungsi ekonomi terdiri dari: pemilik kapal ikan – pedagang - pengolah – dan pengusaha.

Jaringan bisnis perikanan pada struktur sosial diatas dapat membangun entitas bisnis kongsi terbatas. Kekuatan jaringan bisnis itu terletak pada "ikatan". Ikatan menjadi "wadah" adaptasi pelaku usaha untuk berkerjasama karena tingginya persaingan bisnis. Jaringan sosial pada entitas kongsi terbatas akan berlanjut jika para pelaku usaha mempunya komitmen dan tujuan yang sama dan akan berakhir jika komitmen dan tujuan berbeda. Integrasi yang berlanjut disebut keterlekatan kuat dan yang tidak berlanjut disebut keterlekatan lemah (Granovetter, 1995; Damsar & Indrayani, 2013).

Jaringan sosial pada entitas bisnis "keterlekatan kuat" terjadi karena pelaku usaha "diikat" dengan investasi atau bantuan biaya operasional oleh pelaku lain. Sebaliknya jaringan sosial dengan "keterlekatan lemah" pelaku usahanya belum diikat / terikat dengan investasi atau bantuan biaya.

Pada nelayan di Bunguran Timur hasil penelitian Zulham *et al*. (2017), menunjukkan 50% nelayan menerima investasi pembuatan armada dari pedagang. Selain itu, pedagang juga memberi "jaminan sosial" (*social safety fund*) kepada rumah tangga nelayan (pemilik kapal). Jaringan sosial pada entitas bisnis kongsi yang diikat pedagang, umumnya sulit beradaptasi dengan jaringan sosial yang dibentuk pedagang ikan lain, karena akan mengganggu bisnis mereka. Di Pulau Tiga 80% investasi armada perikanan berasal dari modal pribadi, namun biaya operasional penangkapan ikan tetap dari pedagang. Dengan demikian, jaringan bisnis perikanan di luar SKPT Selat Lampa dapat disebut sebagai jaringan sosial dengan keterlekatan kuat. Jika demikian halnya, diperlukan langkah terobosan agar jaringan sosial pada berbagai entitas bisnis di Natuna dapat beradaptasi dengan jaringan bisnis /jaringan sosial baru yang dirintis pada SKPT Selat Lampa.

Pada dimensi vertikal, jaringan sosial bisnis perikanan di Natuna dibangun pelaku usaha tujuannya adalah untuk mempertahankan eksistensi investasi mereka. Oleh sebab itu, pada dimensi vertikal jaringan sosial dapat dikelompokkan menurut:

a. Kegiatan penangkapan ikan:
    1. Pemilik kapal ikan (juragan) – nahkoda - dan anak buah kapal.
    2. Pemilik kapal (juragan) - pedagang besar/ pedagang pengumpul
b. Kegiatan perdagangan dan distribusi ikan:
    1. Pedagang besar – pedagang pengumpul - pemilik kapal ikan (juragan).
    2. Pedagang besar - pedagang pengumpul.

Relasi yang dibangun oleh pelaku usaha menurut dimensi vertikal pada jaringan sosial tersebut peran dan status sosialnya tidak sama. Kekuatan relasi juga ditentukan oleh ikatan modal, investasi atau bantuan lainnya. Jaringan sosial bisnis tersebut sangat resisten, dan sulit bergabung dengan jaringan bisnis perikanan lain atau jaringan bisnis yang dibangun di Selat Lampa.

Relasi pada dimensi vertikal ini, terbentuk karena berbagai hal: pada pemilik kapal penangkap ikan karena keterbatasan modal dan pendapatan; pada ABK & nahkoda karena memerlukan uang. Pada pedagang karena persaingan ketat dalam mendapatkan pasokan ikan akibat kuota ikan yang harus dipenuhi untuk pasar tujuan.

Relasi pada struktur sosial dimensi horizontal dan dimensi vertikal membentuk ikatan *patron – client*. Bentuk relasi yang demikian umum ditemui pada bisnis produk primer (Saptana & Ashari, 2007). Pada dimensi horizontal terdapat antara pedagang (*patron*) – pemilik kapal (*client*); pengusaha (*patron*) – pedagang (pengumpul) & nelayan (*client*). Sedangkan pada dimensi vertikal adalah antara: pemilik kapal/juragan (patron) – nahkoda / ABK (*client*); pedagang pengumpul /

pedagang besar (*patron*) - pemilik kapal ikan (*client*); pedagang besar (*patron*) – pedagang pengumpul dan pemilik kapal ikan (*client*) dan pedagang besar sebagai *patron* dengan pedagang pengumpul sebagai *client* (Humaidi, 2010; Minaro *et al*., 2010).

Entitas Bisnis Perikanan Pada SKPT Selat Lampa

Tersedianya berbagai fasilitas pada SKPT Selat Lampa, maka pemerintah mendorong entitas bisnis memanfaatkan berbagai fasilitas yang terdapat pada SKPT itu. Jika diperhatikan pada SKPT Selat Lampa baru terdapat tipe entitas bisnis kongsi terbatas.

Entitas bisnis kongsi terbatas terjadi karena kerjasama antara Perum Perindo (pedagang ikan) dengan pemilik armada/kapal penangkap ikan di Midai Natuna. Kerjasama tersebut merupakan bentuk jaringan sosial dari dimensi horizontal. Para pelaku usaha pada jaringan sosial itu, mempunyai peran yang berbeda dan status sosial yang setara. Entitas bisnis kongsi terbatas yang dibangun Perum Perindo tersebut dibentuk secara formal dengan perjanjian. Pemilik armada perikanan sebagai "*client*" diikat dengan bantuan biaya penangkapan ikan oleh Perum Perindo. Selanjutnya pemilik armada penangkapan ikan menjual hasil tangkapan kepada Perum Perindo sebagai *patron*. Kekuatan jaringan sosial yang fomal ini membentuk "keterlekatan kuat". Namun keterlekaan itu dapat melemah jika bantuan biaya tersebut dikurangi atau dihentikan.

Pada dimensi horizontal Perum Perindo diperkirakan sulit membangun jaringan sosial dengan berbagai armada perikanan lain yang ada di sekitar Selat Lampa (Pulau Tiga dan Bunguran Besar) untuk mendukung usahanya di SKPT Selat Lampa. Pemilik armada perikanan pada lokasi Pulau Tiga dan Bunguran Besar (diluar SKPT Selat Lampa) telah "diikat" oleh pedagang pengumpul lain yang berkongsi dengan pedagang di Tanjung Balai Karimun dan Batam. Hal ini diduga menjadi penyebab armada perikanan di Pulau Tiga dan Bunguran Besar tidak beraktivitas pada lokasi SKPT Selat Lampa. Untuk mendorong mereka masuk ke SKPT Selat Lampa diperlukan kontruksi sosial baru berupa perda dari Pemerintah Daerah Natuna dan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Perda dan peraturan Menteri tersebut akan mendorong terdapatnya entitas bisnis kepemilikan sendiri dan kongsi terdapat dalam SKPT Selat Lampa.

Pada SKPT Selat Lampa terdapat pengusaha SPDN, pengusaha ini merupakan entitas bisnis kongsi dengan penyertaan modal. Pengusaha SPDN di Selat Lampa mendapat hak untuk mengelola SPDN di SKPT Selat Lampa dengan penyertaan modal untuk mendapat pasokan BBM dari Pertamina.

Ikatan yang dibangun oleh dua entitas bisnis di Selat Lampa tersebut walaupun merupakan kelekatan kuat, tetapi terbentukknya sangat formal (dengan surat perjanjian), sehingga jika satu pihak merasa dirugikan maka jaringan sosial itu akan lepas satu dengan lainnya.

Dengan entitas bisnis yang ada dan untuk mewujudkan tumbuhnya jaringan sosial dalam dimensi vertikal dalam SKPT Selat Lampa diperlukan kontruksi sosial baru yang harus dibuat oleh Pemda dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sehingga di SKPT Selat Lampa akan ditemui jaringan sosial pemilik kapal – nahkoda – ABK atau eksportir - pedagang pengumpul – pemilik kapal ikan.

Penilaian Sosial Dimensi Horizontal Bisnis Perikanan Natuna

Pelaku usaha pada jaringan sosial menurut dimensi horizontal dipandang memiliki peran yang berbeda dan status sosial yang setara. Di Natuna, pemilik kapal berperan dalam menangkap ikan; pedagang berperan membeli dan mendistribusikan ikan; pengolah membeli dan mengolah bahan baku ikan; pengusaha berinvestasi untuk mendukung bisnis perikanan. sRelasi pemilik kapal / nelayan – pedagang – pengolah – pengusaha bertujuan agar investasi mereka pada bisnis perikanan di Natuna dapat berlanjut.

Keberlanjutan investasi itu dapat dipetakan dari kemampuan dan fungsi pelaku usaha, sehingga kapasitas dari pelaku usaha perikanan pada struktur sosial dalam perekonomian Natuna dapat diketahui.

Hasil pemetaan pada Tabel 1 menurut Soerjono (1985), dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki relasi dan kapasitas pelaku usaha dalam membangun perekonomian Natuna.

Tabel 1. Pemetaan Kemampuan dan Fungsi Pelaku Usaha Dalam Bisnis Perikanan Pada Dimensi Horizontal, di Natuna 2017.

Table 1. Mapping of Capacity and Function for Businessmen in Fishery Business on Horizontal Dimension, in Natuna 2017

Struktur Sosial Menurut Dimensi Horizontal/*Horizontal Dimension of Social Structure*	Komponen Penilaian Sosial Bisnis Perikanan/ *Social Assessment Components of fisheries Business*			
	Akses *Sumber Daya* Perikanan/ *Access to Fish Resource*	Strategi Akumulasi Modal/*Capital Accumulation Strategy*	Akses Teknologi/ *Access of Technology*	Akses Pasar/ *Market Access*
Nelayan /*Fishers*	Penangkapan ikan, umumnya dengan armada 1 – 5 GT. Tujuannya mensuplai ikan untuk pedagang / *mostly used 1 – 5 GT fishing fleet for fishing. The purpose to supply fish for traders*	Tidak mampu mengakumulasi dan mengakses sumber modal resmi. Menggunakan modal pedagang untuk menangkap ikan. / *Limited ability to accumulate and access formal funding institution. For fishing used funding from trader.*	Tidak mampu mengakses sumber teknologi dan memanfaatkan teknologi yang ada./ *Limited ability to access sources of technology. And used existing technology*	Kemampuan mengakses pasar sangat terbatas. Hanya menjual ikan di lokasi pendaratan ikan./ *limited ability to access market. Fish sold at fishing port only.*
Pedagang ikan/*Fish trader*	Membiayai kegiatan penangkapan ikan. Tujuan mendapatkan ikan ekspor./ *Offer funding for fishing operation. The purpose to find the quality of export fishes*.	Akses pada sumber modal dan mengakumulasi modal. Berfungsi sebagai penyedia modal untuk penangkapan ikan, handling dan distribusi ikan. / *Have the ability to access and accumulate capital. The role as supplier of funding for fishing & fish processing*	Akses pada sumber teknologi dalam kasus tertentu siap membeli teknologi agar ikan yang diperdagangkan bermutu premium / *have the ability to access source of technology to find the premium quality of fish*.	Punya kemampuan mengakses pasar ekspor. Ekspor per pedagang besar ± 20 ton – 30 ton per bulan. / *Ability to access fish export market. Export capacity each trader 20 tonnes – 30 tonnes per month*.
Pengolah/*Processor*	Tidak mampu mengakses *sumber daya*. Kebutuhan ikan dibeli pada tempat pendaratan ikan, daya serap terbatas./ *have no ability to access to fish resources. Fish supply buy at the fish landing site with limited capacity*.	Hanya beberapa yang dapat mengakses Bank. Kegiatan produksi mampu mengakumuasi modal ± Rp. 500 ribu per proses produksi./ *only limited fish processor have access to bank. Production process could be accumulated capital ± 500 thousand for each production cycle.*	Akses teknologi diperoleh melalui petugas pemerintah / peneliti. Menggunakan teknologi yang ada./ *Access technology found from governmen official / reseach person. Used the existing technology.*	Punya kemampuan mengakses pasar, dan tidak mampu memenuhi persyaratan pasar. Memasok produk olahan skala rumah tangga. / *Have the ability to access market but unable to fulfill market requirement*.
Pengusaha / *Businessmen*	Kegiatan utama berinvestasi untuk penangkapan ikan, menjual es balok dan membeli ikan hasil tangkapan nelayan./ *the main activities are to invest in fishing activities, sold ice and buy fresh fish from fisher's.*	Mampu mengakses perbankan. Berfungsi menyerap dan menyediakan akomodasi untuk kegiatan penangkapan ikan./ *able to access bank. The main function to absorb and provide accommodation for fishing activities.*	Tidak mau mengakses sumber teknologi. Hanya memanfaatkan teknologi/infrastruktur yang telah ada./ *Do not want to access sources of technologi. Only utilize technology/ infrastructure. Avability.*	Punya akses dan relasi pada pasar ekspor. Berfungsi sebagai grader, dan broker eksportir ikan. / *have the access and relation in export market. The role as grader and broker for fish"s exporter.*

Assessmen pada Tabel 1, menunjukkan peran pedagang pada dimensi horizontal sangat dominan dalam menjalankan fungsi ekonomi pada bisnis hasil perikanan di Natuna. Peran tersebut terutama pada: (a). penyediaan modal operasional dan investasi untuk mengakses *sumber daya* pada kegiatan penangkapan ikan. Bantuan modal pedagang tersebut diarahkan untuk menangkap ikan karang. Rata-rata setiap pedagang membantu biaya operasional per trip (2 -3 hari) Rp1.182.527. yang terdiri dari biaya solar Rp567.968; biaya es Rp274.227; biaya umpan Rp100.000 dan perbekalan Rp240.282. (b). Kemampuan akumulasi modal pedagang ikan Natuna, cukup tinggi. Sumber modal cadangan untuk mendukung bisnis perikanan berasal dari eksportir ikan di Batam dan Singapura. Seorang pedagang ikan di Ranai setiap hari harus menyediakan dana tunai minimal Rp. 25 Juta untuk membiayai kegiatan penangkapan ikan dan membeli ikan. (c). Mutu dan jenis ikan menjadi perhatian utama dalam membeli ikan, dan (d). mampu membangun akses pasar dan jaringan distribusi ikan.

Pelaku usaha lain, nelayan (pemilik kapal), pengolah dan pengusaha) perannya terbatas (Tabel 1). Peran nelayan dalam struktur sosial tersebut, lebih dominan untuk akses *sumber daya*. Kemampuan nelayan untuk mengakses sumber modal usaha pada lembaga finansial tidak ada, karena kendala persyaratan perbankan. Hal inilah yang menyebabkan sumber biaya operasional atau investasi kegiatan penangkapan ikan diperoleh dari pedagang. Relasi pedagang – nelayan menjamin pasokan ikan untuk pedagang. Relasi ini dipertahankan dan semakin kuat, karena pedagang memerlukan ikan untuk tujuan pasar ekspor. Perilaku ini mendorong nelayan menangkap jenis ikan tertentu untuk pasar ekspor saja.

Hasil tangkapan nelayan Natuna pada tahun 2017 terdiri dari ikan Kerapu 301,9 ton; Kurisi Bali 233,1 ton; Kakap Merah (*Anggoli*) 208,9 ton; Kurisi 252 ton; Manyung 318,1 ton; Gurita 138,5 ton; Cumi-cumi 237,9 ton; Ikan Tongkol dan ikan Layang masing-masing 311,2 ton dan 451,7 ton. Tiga jenis hasil tangkapan yang terakhir umumnya dijual ke Jakarta dan Pemangkat (Kalimantan Barat), sedangkan ikan lainnya tujuan pasarnya adalah Singapura.

Peran pengolah hasil perikanan dalam struktur bisnis perikanan di Natuna masih terbatas. Keberadaan pelaku usaha pengolahan di Natuna, karena program pemberdayaan masyarakat "kelompok pengolah dan pemasar" (Poklahsar) yang dimulai pada tahun 2012. Poklahsar diharapkan dapat mendorong tumbuhnya industri pengolahan skala komersial di Natuna.

Jumlah poklahsar sampai dengan tahun 2016 telah mencapai 122 unit. Poklahsar yang dominan dalam struktur sosial itu adalah: usaha kerupuk ikan (63%), usaha ikan asin (17%) dan usaha bakso ikan 15%. Selain itu, terdapat usaha pengolahan teri kering dan fermentasi ikan teri (pedé), abon ikan, kerupuk cumi dan ikan salai masing-masing sekitar 1% – 2% dari jumlah poklahsar yang ada. Usaha rumah tangga tersebut terkonsentrasi pada desa Cemaga Tengah (Bunguran Selatan), ikan Salai di Bunguran Selatan dan Bunguran Timur, Ikan Asin di Bunguran Tengah, kerupuk tersebar di Midai, Pulau Tiga, Bunguran Tengah, Bunguran Timur Laut, Bunguran Timur, Bunguran Selatan.

Seluruh pelaku usaha pada struktur sosial ini termasuk sebagai usaha rumah tangga skala kecil, mutu hasil produksi tidak stabil dengan kemasan yang tidak standar, serta pasar hasil produksi yang terbatas di Ranai dan Batam, proses produksi dilakukan secara konvensional. Struktur sosial tersebut belum berhasil menumbuhkan pengolah hasil perikanan dalam skala komersial.

Pengusaha pada struktur sosial bisnis perikanan di Natuna dapat dikatagorikan sebagai pengusaha yang memanfaatkan infrastruktur yang dibangun pemerintah. Mereka tidak berinvestasi pada infrastruktur, karena resiko bisnis sangat tinggi, apalagi jumlah ikan hasil tangkapan berfluktuasi tergantung musim ikan. Biaya investasi perikanan sangat tinggi dan ongkos distribusi barang dan jasa relatif mahal. Oleh sebab itu, perilaku bisnis pengusaha perikanan di Natuna lebih dominan dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah atau koperasi dalam bentuk penyertaan modal untuk mengelola *Cold Storage, Ice Flake,* dan dan armada penangkapan ikan. *Cold Storage* yang dikelola pengusaha terdapat di SKPT Selat Lampa dan di dekat pasar tradisional Ranai. Armada perikanan dan *ice flake* yang telah diserahkan kepada koperasi akhirnya dikelola oleh pengusaha. Dengan fasilitas yang dikelolanya, pengusaha membeli ikan dari nelayan dan menyimpannya dalam jumlah yang banyak dan setelah volume ikan mencukupi dikirim dengan kapal ke Batam, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, atau Pemangkat (Kalimantan Barat).

Tabel 1, menunjukkan pedagang ikan merupakan kunci utama dalam mengembangkan perikanan Natuna. Jumlah pedagang besar ikan di pulau Bunguran (Natuna) sekitar 3 pedagang, Tanjung Balai Karimun dan Sedanau masing-masng satu pedagang.

Setiap pedagang memiliki jaringan sosial yang terpisah satu dengan lainnya. Pedagang besar ikan di Bunguran Besar (Natuna) berperan mendistribusikan ikan segar kualitas ekspor melalui jaringan distribusi di Batam dan Tanjung Balai Karimun serta Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Pengiriman ikan segar kualitas ekspor dilakukan setiap hari kecuali hari minggu. Rata-rata pengiriman ikan berkisar antara 3 kuintal – 5 kuintal ikan segar per pedagang. Pengiriman lewat jalur udara hanya menggunakan Sriwijaya Air dan dibatasi kapasitas kargo pesawat.

Pada perdagangan ikan di Natuna, pedagang besar memerlukan pasokan es curah yang cukup banyak, karena ikan hasil tangkapan nelayan harus sampai ke Singapura dalam waktu 24 jam. Saat ini pasokan es terbatas, sumber pasokan es untuk mengawetkan ikan berasal dari pabrik es dan es yang diproduksi oleh rumah tangga. Jika terdapat ikan yang tidak terkirim ke Singapura, maka akan disimpan dalam "*box*" penyimpan ikan dan ikan tersebut akan dikirim ke Batam dan Tanjung Pinang dengan kapal pengangkut ikan melalui jaringan distribusi yang biasa dilakukan pedagang.

Penilaian Sosial Dimensi Vertikal Bisnis Perikanan Natuna

Assessmen sosial dimensi vertikal, menggambarkan kemampuan dan fungsi dari setiap pelaku usaha pada jaringan sosial bisnis perikanan dimana peran dan status sosialnya berbeda antar pelaku usaha. Pada dimensi ini, pelaku usaha dengan jaringan sosialnya bersaing dengan pelaku / jaringan sosial lain dalam pasar. Tabel 2, mengambarkan hasil pemetaan kemampuan dan fungsi jaringan ringan sosial bisnis perikanan di Natuna.

Tabel 2. Pemetaan Kemampuan dan Fungsi Pelaku Usaha Dalam Bisnis Perikanan Pada Dimensi Vertikal, di Natuna 2017.

***Table 2. Mapping of Capacity and Function for Businessmen in Fishery Business on Vertical Dimension, in Natuna 2017*.**

Struktur Sosial Menurut Dimensi Vertikal/ *Vertical Dimention of Social Structure*	**Komponen Penilaian Sosial Bisnis Perikanan/ *Social Assessment Components of Fisheries Business***			
	Akses *Sumber Daya* Perikanan/ *Fish Resource Access*	**Strategi Akumulasi Modal/ *Capital Accumulation Strategy***	**Akses Teknologi/ *Technology Access***	**Akses Pasar/ *Market Access***
Jaringan Bisnis Kegiatan Penangkapan Ikan /*Fishing Business Network*				
Pemilik kapal ikan – nahkoda - ABK/ *Fish boat owners – fishing master –boat labor*	Akses sumber daya semakin kuat karena relasi *patron* (pemilik kapal) dengan *client* (nahkoda & ABK). Fungsinya untuk mendapat ikan dan pendapatan agar usaha tetap eksis./ *resources access getting stronger due to patron relation (boat owner) – client (fishing master ? boat labor. The function is to get supply of fish & income*	Akumulasi modal hanya pada pemilik kapal. Modal digunakan sebagai pengikat *client* (nahkoda + ABK). Fungsinya mengikat nahkoda & ABK agar usaha penangkapan ikan dapat beroperasi / *capital accumulation only at boat owner. The capital use to tie up fishing master & boat labor*.	Sumber teknologi yang diakses pemilik kapal adalah kerabat, penyuluh dan pedagang ikan/ *The boat owner source of technology is relative, extension agent & fish trader*	Akses pasar pemilik kapal terbatas pada lokasi pendaratan ikan. Fungsinya hanya untuk menjual ikan dan mendapat uang tunai untuk rumah tangga dan melanjutkan usaha./ *boat owner access to market only at landing place. The function only to get fresh money and income for fishing household*.

Lanjutan Tabel 2/*Continue Table 2.*

Struktur Sosial Menurut Dimensi Vertikal/ *Vertical Dimention of Social Structure*	**Komponen Penilaian Sosial Bisnis Perikanan/ *Social Assessment Components of Fisheries Business***			
	Akses *Sumber Daya* Perikanan/ *Fish Resource Access*	**Strategi Akumulasi Modal/ *Capital Accumulation Strategy***	**Akses Teknologi/ *Technology Access***	**Akses Pasar/ *Market Access***
Pemilik kapal ikan – pedagang / *boat owner - trader*	Pemilik kapal sebagai *client* - pedagang (*patron)*. Fungsinya menjamin pasokan ikan dari nelayan untuk pedagang pengumpul dan pedagang besar) / *Boat owner client – trader patron. The fuction is to gurantee fish supply*.	Akumulasi modal sangat kuat pada pedagang (*patron*). Modal digunakan agar mendapat pasokan ikan dengan mengikat pemilik kapal./ *capital accumulation only at trader. . The capital use to tie up boat owner.*	Sumber teknologi adalah penyuluh. Teknologi fungsinya hanya untuk menangkap ikan./ t*he sources of technology is extension agent. The function of technology only for fishing activities.*	Akses pasar dilakukan pedagang (besar). Pedagang pengumpul hanya membeli ikan dari nelayan. Fungsi pengumpul adalah menjamin suplai ikan untuk pedagang besar. / *market access conducted by trader only to buy fish from fisher's.*
Jaringan Bisnis perdagangan dan distribusi ikan / *Trader network and distribution*				
Pedagang - pemilik kapal ikan/ *Trader – boat owner*	Pedagang (patron) mengakses *sumber daya* melalui pemilik kapal ikan. Fungsinya adalah untuk mendapat pasokan ikan sesuai dengan permintaan pasar./ *trader access to resources through boat owner to collect fish from boat owner.*	Akumulasi modal dilakukan pedagang (*patron*) dan mengikat pemilik kapal agar mendapat pasokan ikan. / *capital accumulation only at trader and binding the fishermen, and to binding fishing owner to provide supply of fish.*	Sumber teknologi yang diakses adalah penyuluh. Teknologi yang dicari adalah untuk mengawetkan ikan./ *.the sources of technology is extension agent. The function of technology only for preservation*	Akses pasar ekspor dilakukan pedagang (besar). Pengumpul hanya membeli ikan dari nelayan. Fungsi pengumpul memasok ikan agar disortir oleh pedagang besar./ *Export market undertaken by fish trader and collector only buy fish from fishermen. The role of collector only to supply fish for traders*
Pedagang besar – pedagang pengumpul / *Fish trader – fish collector*	Mencari pasokan ikan dari nelayan. Fungsinya mengikat nelayan mendapatkan ikan segar berkualitas sehingga memenuhi kuota./ *The role, looking for fish from fishermen. The role binding fishermen to supply the quality of fish for export market.*	Akumulasi modal dilakukan pedagang (*patron*) dan mengikat pedagang pengupul. Fungsinya mendapat jenis ikan ekspor. / *capital accumulation carried out bay trader and binding fish collector.*	Sumber teknologi adalah penyuluh dan pameran. Teknologi yang dicari adalah untuk distribusi ikan. / *The source of technology is extension agent and exhibition. Technology only for distribution of fish*.	Membangun akses pasar. Fungsi: melakukan sortasi dan distribusi sesuai pasar tujuan./ *To construct market access. The function is for sortation and distribution*.

Pada jaringan bisnis penangkapan ikan, pemilik kapal ikan – nahkoda – ABK, kekuatan relasi berada pada pemilik kapal. Pemilik kapal adalah *patron* dan nahkoda serta ABK merupakan *client*. *Patron* memiliki kekuasaan "mengikat" *client* dengan uang (dalam bentuk pinjaminan atau bonus). Pinjaman diperhitungkan dalam bagi hasil sedangkan bonus tidak diperhitungkan dan dianggap penghargaan yang diberikan pemilik kapal kepada nahkoda dan ABK. Besar bonus ditentukan pemilik kapal, dan bonus itu dapat dikatakan sebagai insentif untuk mendorong nahkoda dan ABK bekerja menangkap ikan lebih banyak dari biasanya.

Sebagai pemilik aset, pemilik kapal punya posisi strategis untuk menentukan lokasi penangkapan ikan dan mengakumulasi modal dari penangkapan ikan agar usahanya tetap bertahan. Di Natuna, tidak ditemukan pemilik kapal yang dapat mengakses langsung sumber teknologi penangkapan ikan. Informasi teknologi tangkap ikan diperoleh dari kerabat dengan profesi yang sama, penyuluh dan pedagang. Pada relasi pemilik kapal – nahkoda – ABK, pemilik kapal hanya mampu mengakses pasar di lokasi pendaratan ikan. Akses pasar diluar lokasi pendaratan ikan tidak dikuasai oleh pemilik kapal dan kemampuan tersebut ada pada pedagang (besar dan pengumpul).

Pada relasi pemilik kapal – nahkoda – ABK, kekuasaan pemilik kapal sangat besar, terutama jika pemilik kapal merangkap pengurus koperasi dan menjadi penerima kapal bantuan penangkap ikan > 30 GT. Kapal batuan perikanan 30 GT memerlukan nahkoda trampil yang menguasai operasi kapal besar. Pada nelayan Natuna jumlah nahkoda untuk mengoperasikan kapal ikan besar (> 30GT) terbatas jumlahnya, dari 4.107 unit armada perikanan, hanya terdapat 0,2% armada ≥ 30 GT. Upaya untuk menyediakan nahkoda kapal ikan pernah dilakukan oleh Koperasi Nelayan Perbatasan Mutiara Ujung Utara di Natuna pada tahun 2017 dengan menyewa nahkoda kapal ikan dari Bitung Sulawesi Utara menjadi pelatih nelayan setempat agar mereka dapat menjadi nahkoda. Nahkoda kapal ikan di Natuna umumnya nahkoda belum bersertifikat. Hal ini terjadi, karena 58,4% armada perikanan Natuna ukuran 1-5GT dan 9,3% ukuran 5-10 GT, dan jumlah ABK per kapal berkisar antara 2 sampai 3 orang dengan trip penangkapan rata-rata 2-3 hari. Adanya kapal bantuan tersebut, mendorong perubahan relasi pada dimensi vertikal dari pemilik kapal ikan (juragan) - nahkoda dan ABK menjadi relasi baru dengan pelaku baru yaitu antara koperasi (sebagai juragan pemilik kapal) – nahkoda – juru mesin – juru masak dan anak buah kapal. Perubahan ini memerlukan keterampilan dalam manajemen maupun pengelolaan aset.

Perubahan relasi diatas adalah perubahan sosial dalam masyarakat perikanan di Natuna. Perubahan itu memunculkan konflik antara beberapa kelompok nelayan perikanan di Natuna dengan pengusaha yang membiayai operasi penangkapan ikan dan manajemen operasional armada perikanan tersebut.

Perubahan sosial juga terjadi karena bantuan alat tangkap bubu lipat dari pemerintah. Bubu lipat ditolak nelayan, karena kontruksi dan jaringnya tidak sesuai dengan kondisi setempat serta kebiasaan nelayan untuk menangkap ikan. Permasalahan sosial bantuan alat tersebut muncul karena kebiasaan nelayan di Natuna belum dipetakan dengan cermat.

Pada relasi pemilik kapal (juragan) – pedagang (besar dan pengumpul), kekuatan relasi terletak pada pedagang (besar atau pengumpul). Pedagang merupakan *patron*, mempunyai uang dan kekuasaan, sedangkan pemilik kapal adalah *client* yang memiliki armada dan mempunyai tenaga kerja. Pada relasi yang demikian, pedagang berinvestasi atau membantu biaya operasional penangkapan ikan. Konsekuensinya, pemilik kapal harus memasok ikan hasil tangkapan kepada pedagang.

Pada dimensi vertikal, dalam perdagangan dan distribusi ikan di Natuna peran pedagang sangat penting. Pedagang besar dengan status sosial sebagai “toke” selalu mendapatkan pasokan ikan dari pemilik kapal dan pedagang pengumpul yang menjadi *client*-nya. Sebagai “toke”, pasokan ikan dapat juga diperoleh dari pemilik kapal yang bukan *client*. Kondisi ini terjadi, jika suplai ikan melimpah dan daya serap pasarikan Natuna terbatas. Hal ini disebabkan karena daya serap pasar di Natuna yang terbatas. Penyerapan ikan oleh satu industri pengolahan skala rumah tangga rata rata 5 kuintal per minggu. Sementara, permintaan ikan untuk konsumsi rumah tangga berkisar antara 15 - 17 Kg per bulan. Jumlah rumah tangga di Natuna pada tahun 2015 adalah 19.296 kepala keluarga.

Akses pedagang besar pada potensi ikan dilakukan melalui dua cara, yaitu: berinvestasi pada armada penangkapan ikan dan mengikat pedagang pengumpul untuk menjamin pasokan ikan. Perilaku yang demikian dilakukan karena: pedagang besar telah memiliki kontrak dengan pasar. Pedagang besar ikan di Natuna setiap hari minimal harus memiliki dana tunai berkisar antara Rp. 25 juta. Dana tunai tersebut sebagai cadangan untuk mendapat pasokan ikan, sementara dana hasil penjualan ikan pedagang besar masih ada direkanan berkisar antara Rp. 115 juta – 120 juta per hari.

Bagi pedagang besar Natuna teknologi *handling* ikan belum menjadi perhatian utama.

Prinsip mereka adalah agar ikan yang didaratkan tersebut sebelum 24 jam sampai ke Tanjung Balai Karimun atau Batam. Pedagang mendapat informasi teknologi handling ikan dari penyuluh, pameran atau eksportir ikan di Batam. Handling ikan yang dilakukan pedagang besar umumnya menggunakan "*steroform*" dan *box* ikan yang berinsulasi. Ikan yang akan dikirim tersebut dimasukkan dalam "*steroform*" dan*box* ikan tersebut dan diberi es curah, dengan komposisi 60% ikan segar dan 40% es curah. Ikan kualitas ekspor dikirim melalui cargo pesawat ke Batam rata-rata 1 sampai 2 kuintal. Pengiriman ikan juga dilakukan dengan kapal laut, untuk tujuan Tanjung Balai Karimun, Batam dan Tanjung Pinang.

Integrasi Sosial Entitas Bisnis Perikanan Pada SKPT Selat Lampa

Prospek ekonomi perikanan tangkap Natuna telah dianalisa oleh Wardono *et al*., (2017) dan aspek teknis ditulis Fauzi *et al*., (2015). Namun, pengembangan bisnis perikanan di Natuna tidak mudah dilakukan, karena struktur sosial dan jaringan bisnis pada setiap entitas bisnis di luar SKPT tidak lentur dan resisten terhadap perubahan.

Mengintegrasikan jaringan sosial yang ada diluar SKPT dengan jarigan sosial yang dibangun SKPT, melalui pemetaan akan membantu menemukan *entry point* mendorong entitas bisnis diluar SKPT Selat Lampa berintegrasi dengan aktivitas pada SKPT Selat Lampa. Selain itu menurut, Mularska-Kucharek & Brzezinki (2012) entitas bisnis perikanan di Natuna perlu memahami arah pembangunan perikanan Natuna, agar mereka berkembang bersama program tersebut.

Demikian juga jaringan sosial entitas bisnis pada dimensi vertikal harus didorong agar berintegasi dengan jaringan sosial yang dirintis pada SKPT Selat Lampa, sehingga pada SKPT itu terdapat berbagai jaringan sosial dengan entitas bisnisnya. Walaupun menurut Bardis (1978) jaringan bisnis pada struktur sosial itu sulit beradaptasi, namun jika patron dari jaringan bisnis telah beraktivitas di SKPT maka *client* akan ikut beroperasi di SKPT Selat Lampa. Karena jaringan bisnis *patron -client* itu harus memasok ikan kepada pasar.

Integrasi sosial pada bisnis perikanan di Natuna dapat terwujud melalui proses sosial yang digambarkan oleh Setiadi & Kolip (2015) sebagai hubungan timbal balik antara para pelaku usaha dalam mengakses *sumber daya*, permodalan, teknologi dan memanfaatkan peluang pasar. Proses sosial bisnis perikanan itu dapat berbentuk asosiatif dan disasosiatif. Proses sosial asosiatif ditandai dengan relasi timbal balik yang bermanfaat antara para pelaku usaha. Proses sosial yang demikian, harus dibina dan dikembangkan serta didorong agar dapat berperan memfungsikan SKPT Selat Lampa. Sebaliknya proses sosial disasosiatif merupakan relasi timbal balik, antara pelaku usaha yang mengedepankan konflik. Proses sosial ini harus dihindari, karena dapat menghambat partisipasi pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang bisnis perikanan di Natuna.

Proses sosial asosiatif pada struktur sosial dalam bisnis perikanan di SKPT Selat Lampa dapat dipelajari pada Tabel 3. Proses sosial pada Tabel 3, sudah tercakup (*embeded*) perilaku pelaku usaha terhadap sumber daya, permodalam, tekologi dan pasar yang telah ditampilkan pada Tabel 1 dan Tabel 2. Proses sosial asosiatif pada entitas bisnis itu terdiri dari 3 bentuk: kooperatif (kerja sama), akomodatif dan asimilasi.

Bentuk kooperatif pada bisnis perikanan di Natuna hanya terjadi antara pemilik kapal ikan – pedagang ikan dalam bentuk kongsi terbatas atau kongsi dengan penyertaan modal. Integrasi antar pelaku usaha itu terjadi karena tujuannya untuk mendapat ikan ekspor, kesepakatan jaminan pasokan perbekalan dan biaya operasional atau investasi kegiatan penangkapan ikan. Pada integrasi sosial ini, di Bunguran Besar potensi konflik antara beberapa pemilik kapal ikan dalam jaringan bisnis 3 pedagang ikan sangat kecil terjadi. Namun, persaingan antar 3 pedagang besar tersebut tetap ada.

Bentuk kerja sama kooperatif jaringan bisnis perikanan pada SKPT Selat Lampa dapat diwujudkan, jika yang berbeda peran tersebut ikut menyertakan modal untuk kegiatan usaha di SKPT.

Bentuk kerja sama lain adalah kerja sama akomodatif antara koperasi (pemilik kapal) dengan pengusaha dalam bentuk kongsi terbatas; antara pemilik kapal dengan nahkoda dan ABK pada entitas bisnis kepemilikan sendiri; serta dalam perdagangan dan distribusi ikan antara pedagang besar dengan pedagang pengumpul dalam entitas bisnis kongsi terbatas.

Tabel 3. Pemetaan Integrasi Sosial Bisnis Perikanan Pada SKPT Selat Lampa, 2017.
Table 3. Mapping the Social Integration for Fisheries Business in SKPT Selat Lampa, 2017.

Bentuk Struktur Sosial/*Type Social structure*	**Bentuk Asosiatif Bisnis Perikanan / *Type Associative Of Fisheries Business***		
	Kooperatif/ *Cooperative*	**Akomodatif/*Accomodative***	**Asimilasi/*Assimilative***
Dimensi horizontal/ *Horizontal dimension*	x	Koperasi (pemilik kapal) – Pengusaha / *Cooperative (boat owner) – businessmen.*	Pemilik kapal – Pengolah – pedagang – pengusaha / *Boat owner – fish processor – trader – businessmen.*
Dimensi vertikal / *Vertical dimension*	Kegiatan penangkapan ikan/*Fishing activities*		
	Pemilik kapal ikan – pedagang Besar / *Boat owner – Fish trader.*	Pemilik Kapal – Nahkoda – ABK / *Boat owner – Fishing master – boat labor*	X
	Perdagangan dan Distribusi ikan/*Fish trading & distribution*		
	x	Pedagang besar – pedagang pengumpul / *trader - collector*	X

Integrasi sosial yang disebutkan diatas, terjadi melalui kompromi: reduksi konflik, pengelolaan manajemen dan beban operasional penangkapan ikan, misalnya antara koperasi (seperti Koperasi Nelayan Perbatasan Mutiara Ujung Utara) dengan pengusaha (Perum Perindo) selaku penyedia biaya operasional penangkapan ikan. Dan mereduksi perbedaan perolehan pendapatan dari bagi hasil penangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nahkoda/ABK melalui pemberian bonus setelah penangkapan ikan. Integrasi akomodatif dalam bentuk kongsi terbatas dapat terjadi dengan memberi bantuan modal pembelian ikan kepada pedagang pengumpul oleh pedagang besar sesuai dengan kesepakatan. Integrasi akomodatif, punya potensi tidak terintegrasi, jika konflik dalam kerja sama tersebut muncul kembali, seperti antara Koperasi Nelayan Perbatasan Mutiara Ujung Utara dengan Perum Perindo.

Bentuk kerja sama asosiatif lain pada SKPT Selat Lampa adalah bentuk asimilasi. Kerja sama ini terjadi karena mengabaikan perbedaan dan dikuti kesatuan tindak yang saling mendukung antara pelaku usaha dalam melakukan bisnis masing-masing. Kerjasama yang demikian di Natuna terjadi antara: Pemilik kapal – Pengolah – pedagang – pengusaha. Proses sosial yang terakhir ini diwujudkan dalam bentuk suplai bahan baku ikan kepada pengolah dari pemilik kapal ikan atau suplai es curah dari pengusaha ke pedagang ikan.

Dari uraian diatas, relasi antara pedagang besar dengan pelaku usaha lain sangat penting di Natuan. Relasi pedagang dengan pemilik kapal (juragan) merupakan relasi yang dibangun dalam bentuk integrasi kooperatif. Satu pedagang besar Natuna membangun mitra dengan sekitar 25 – 35 pemilik kapal. Kekuatan integrasi sosial 3 pedagang besar – pemilik kapal ini dapat digunakan untuk mendorong mereka berpartisipasi beroperasi dan memfungsikan SKPT Selat Lampa.

Integrasi 3 pedagang besar beroperasi pada SKPT Selat Lampa dapat dilakukan dengan kesepakatan dagang dalam bentuk entitas bisnis kongsi dengan penyertaan modal (saham) yang disebut usaha patungan.

Usaha patungan ini dapat menjadi satu entitas bisnis di SKPT Selat Lampa, yang bergerak dalam bisnis pemanfaatan *sumber daya* ikan, penyediaan modal usaha sarana produksi, sumber teknologi perikanan dan memperbesar kapasitas pasar. Usaha patungan tersebut akan berintegrasi dengan SKPT, diperlukan kontruksi sisal dari pengelola SKPT. Kontruksi sosial itu mencakup aturan dan kesepakatan menjalankan kegiatan bisnis, dan menyediakan insentif agar 3 pedagang Natuna itu berkativitas pada SKPT Selat Lampa.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Pembangunan SKPT Selat Lampa di Natuna, merupakan jawaban pemerintah membangun dari pinggiran. Bagi Kabupaten Natuna SKPT Selat Lampa memiliki arti strategis untuk membangun

industri perikanan di Natuna. Saat ini momentum tersebut belum dimanfaatkan dengan baik, karena kemampuan dan fungsi entitas bisnis yang ada di Natuna belum dipetakan dengan baik.

Di Luar SKPT Selat Lampa terdapat empat entitas bisnis, yaitu: entitas bisnis kepemilikan sendiri, kongsi, kongsi terbatas dan kongsi dengan penyertaan modal (saham). Sementara di dalam SKPT Selat Lampa telah dibentuk entitas bisnis kongsi terbatas antara Perum Perindo dengan pemilik kapal di Midai. Entitas bisnis yang terakhir ini bersifat formal, namun integrasi antara keduanya dapat saja menjadi longggar jika salah satu pihak melanggar komitmen yang disepakati.

Entitas bisnis diluar SKPT Selat Lampa tersebut pada umumnya resisten terhadap perubahan. Namun dengan pemetaan kapasitas dan fungsi dari jaringan sosial pelaku usaha pada entitas bisnis tersebut dapat dipetakan peran dan fungsi pemilik kapal ikan, pedagang, pengolah serta pengusaha dalam bisnis perikanan di Natuna. Tiga pedagang besar di Bunguran Besar dapat dijadikan pelopor untuk beraktivitas pada SKPT Selat Lampa, melengkapi entitas bisnis kongsi terbatas yang dibangun Perum Perindo.

Implikasi Kebijakan

Pemerintah sebagai pembuat kontruksi sosial baru dalam SKPT Natuna, harus menyadari adanya entitas bisnis yang sudah terbangun lama dan kuat yang harus dirangkul diluar SKPT. Tiga pedagang besar di Bunguran Besar Natuna telah memiliki jaringan sosial yang permanen di Natuna merupakan entitas bisnis Natuna yang perlu dirangkul. Peran mereka dalam SKPT Selat Lampa, diperlukan untuk mendorong bergeraknya berbagai potensi yang ada pada SKPT tersebut.

Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus membuat kontruksi sosial dalam bentuk Perda atau Kepmen agar aktivitas perdagangan entitas tersebut harus dilakukan di SKPT Selat Lampa. Pemerintah menyiapkan insentif fiskal pada 3 pedagang besar agar mereka berintegrasi membentuk usaha kongsi dengan penyertaan modal (saham) agar kapasitas usaha mereka lebih besar dan dapat mengelola fasilitas dalam SKPT.

Aktivitas entitas bisnis kongsi dengan penyertaan modal ini, selain melakukan perdagangan ikan, bisnis yang dilakukan dapat berkembang, seperti: penyediaan modal kerja, pendampingan dan penyediaan teknologi, advokasi usaha dan perluasan pasar, serta ekspor ikan langsung dari Ranai. Entitas bisnis lain dapat saja berpartisipasi pada SKPT Selat Lampa, asalkan mengikuti kontruksi sosial (aturan) yang dibuat oleh pengelola SKPT Selat Lampa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kepala BBRSEKP dan Kepala Pusat Riset Perikanan yang memberi kepercayaan pada penulis untuk mempelajari perikanan di Natuna dan mencermati pembangunan SKPT Selat Lampa.

DAFTAR PUSTAKA

Blau, P.M. 1964. *Exchange and Power in Social Life*. New York. John Wiley & SonInc.

BPS Kabupatren Natuna. 2017. *Natuna dalam Angka 2016*. Ranai. BPS Kab. Natuna.

Bardis, P.D. 1978. *Social interaction and social process. Social Science*. Vol (53)3. Summer 1979: 147-167.

Crossman, A. 2017. *The Concept of Social Structure in Our Society*. https://www.thoughtco.com/social-structure-defined-3026594. Tangal 25 juli 2018.

Dinas Perikanan Natuna. 2017. *Produksi Perikanan Natuna Tahun 2015*. Dinas Perikanan Natuna. 2017.

Damsar & Indrayani. 2013. Pengantar Sosiologi Ekonomi. Edisi kedua. Kencana PRENADAMEDIA Group. p.316.

de Lange, G. (2017). *Understand Prescriptive Analytics in 20 Minutes*. AIMMS. Connecting Business & Optimization.

Fauzi, M., Efizon, D., & Yani, A.H. 2015. Potensi Perikanan Tangkap di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Prosiding Seminar Antar Bangsa ke 8: Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran, 2015. Universitas Riau. (pp:75-82).

Granovetter, .1995. The Economic Sociology of Firm and Enterpreneurs. In A. Portes (Eds). *The Economics Sociology of Immigration*. New York. Russel Sage Foundation.

Humaidi, M.A. 2010. Jeragan Nemen:dinamika hubungan bakul – langgan dalam perspektif politik ekonomi. *Masyarakat Indonesia.*XXXVI(2).2010. 125 – 156.

Huisman, D.O. 2015. *To what extend do predictive, descriptive and prescriptive supply chain analytics affect organization performance ?. 5th IBA thesis conference* 2 July 2015. (p.8). The Faculty of Behavioral, Management and Social Sciences. Univ. Twente. Netherland.

Heaney, B. (2015). *Supply Chain Intelligence: Descriptive, Prescriptive and Predictive Optimization*. ABERDEEN GROUP. A Harte Hank Company.

KEPMEN KP Republik Indonesia. No. 45/ Men/ 2011. (2011). Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta. KKP.

KEPMEN KP Republik Indonesia No. 47/KEPMEN KP/2016. (2016). Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta. KKP.

Kepmen KP Republik Indonesia. No. 50/ Kepmen-KP/ 2017. (2017). Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta. KKP.

Kimmitt & Esquire 2013. *Choice of Business Entity, Business, Tax and Legal Implication*. Whiteford, Taylor & Preston, LLP. Maryland. pp. 12

Lauer, R.H. 1982. *Perspectives on Social Changes*. Boston. Allyn & Bacon.

Moore, J.E. 1974. *Farm Business* Organization Considerations.

Minaro, S., Forero, G,N., Reuter, H., & van Putten, I.E. 2016. *The role of patron client relations on the fishing behavior of artisanal fishermen in the Spermonde Archipelago (Indonesia). Marine Policy*. 69 (2016): 73 – 83.

Mularska-Kucharek, M., & Brzezinki, K. 2012. *Horizontal and vertical dimensions of sosial trust – the case of Lodz and the districts of Lodz Voivodeship*. *European Spatial Research and Policy*. Vol 19(1)- 2012: 143 – 158.

Parsons, T. 1951. *The Social System*. New York. Free Press.

Poloma, M.M. 2007. Sosiologi Kontemporer. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Radcliffe - Brown, A.R. 1940. On Social structure. *The Journal of Antrophological Institute of Great Britain and Ireland*. (70) 1. 1940, 1 – 12.

Reniati. 2013. Kreativitas Organisasi dan Inovasi Bisnis. Bandung. Alfabeta. pp: 142

Riska, E. 2017. Diplomasi maritim Indonesia terhadap aktivitas penangkapan ikan illegal (illegal fishing) oleh nelayan China di ZEE Kepulauan Natuna. *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*. 3 (2) Juni 2017: 33 – 47.

Saptana & Ashari. 2007. Pembangunan kemitraan berkelanjutan melalui kemitraan usaha. Jurnal Litbang Pertanian. (26) 4, 123 – 130.

Setiadi, E.M & U. Kolip. 2015. Pengantar Sosiologi. Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya. Jakarta. Prenadamedia Group. pp. 960.

Supryanto, R.A. 2015. Indonesia's Natuna Islands: the next flashpoint in the South China Sea ?. Nanyang Tech. Univ. Singapore. RSIS Commentary No.033 – 16 February 2015.

Suryadinata, L. 2017. *Maksud* Sesungguhnya dari Penamaan Laut Natuna Utara: Analisis.https://www.matamatapolitik.com/maksud-sesungguhn-ya-dari-penamaan-laut-natuna-utara-analisis/. Retrived: 13 Agustus 2018.

Soerjono, S. 1985. Sosiologi, Ruang Lingkup dan Aplikasinya. Bandung, CV. Remaja Karya.

Schmitz, A. 2012. *Sociology: Comprehensive Edition. Social Structure and Social Interaction*. Chapter 5.http://2012.lardbucket.org/. pp: 145 – 185.

Taylor, C.N., C.H. Bryan., C.G. Goodrich. 1990. *Social assessment: theory, process and techniques. Centre for Resources Management.* Lincoln University New Zealand. pp. 246

Wardono, B., Suryawati, S.H & Erlina, M.D. 2017. Pengembangan perikanan tangkap melalui Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Natuna. Prosiding Seminar Nasional Kelautan ke XII. Inovasi Hasil Riset & Teknologi dalam Rangka Penguatan Kemandirian Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir. Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Univ. Hang Tuah. Surabaya. (pp: 58 – 69).

Zulham, A. Subaryono, R.F Anggawangsa. 2017. Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Natuna dan Sekitarnya. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Gedung Balitbang KP LT. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Web : www.bbrse.kkp.go.id
www.bbrse.net
email : pt.sosek@gmail.com

ISSN 2089-6980